BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Balai Besar POM di Jakarta















KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2025. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan kepemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja triwulan II juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan II tahun ini terhadap target tahun 2025 untuk periode rencana strategis 2025-2029, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta selanjutnya disebut BBPOM di Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki area pengawasan pada Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengemban tugas fungsinya, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis ”Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian sebesar 106,57% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
    1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 114,31% akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
    2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO capaian dihitung pada akhir tahun 2025.
    3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 116,14% akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
    4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 100%
    5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 113,19% akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
    6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian 100,04%
    7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 103,80%
    8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 119,56% akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
    9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 103,75%

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 125,51% akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian 107,63%

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” dengan capaian 142,84% kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” akan tetapi capaian ini dinormalisasi menjadi 110%.
3. Sasaran strategis “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP” dengan capaian 108,15% kategori “Sangat Baik”.
4. Sasaran strategis ” Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” dengan capaian sebesar 100,06% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
   1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian 100,24%
   2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian 100%
   3) Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100%
   4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian 100%
5. Sasaran strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dengan capaian 109,80% kategori “Sangat Baik”.
6. Sasaran strategis “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 104,49% kategori “Sangat Baik”.
7. Sasaran strategis “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” dengan capaian 91,67% kategori “Baik”. Dikarenakan Penyampaian laporan Patroli Siber dan profilling bulan Juni 2025 tepat waktu, capaian tidak 100% karena masih terimbas capaian Mei 2025.

8. Sasaran strategis “Layanan Publik UPT yang prima” dengan capaian 100% kategori” capaian dihitung pada akhir tahun 2025.
9. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” capaian dihitung pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 30 Juni 2025 dengan pagu sebesar 31,70% dari pagu Rp45.651.891.000, maka realisasi periode ini masih **di bawah** target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 47%.
Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai 50,47% dan belanja modal sebesar 49,52%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja barang sebesar 21,40%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan II, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja barang minimal 50%, belanja pegawai minimal 50%, dan belanja modal minimal 40%, terdapat selisih lebih sebesar 0,47% pada belanja pegawai dan 9,52% pada belanja modal; selisih kurang 18,6% pada belanja barang.

HIGHLIGHT KINERJA

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan kegiatan sebagai berikut :

1. BBPOM di Jakarta Raih Dua Penghargaan Green Laboratory BPOM 2025



Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada Green Laboratorium Laboratory Forum and Awards BPOM sebagai Juara Umum dan kategori Inovasi Terbaik tahun 2025. Penghargaan ini diperoleh setelah melalui serangkaian proses seleksi dan penjurian baik administrasi maupun visitasi. Tim Juri berasal dari PPPOMN, Biro Umum, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Ahli Utama BPOM. *Green Laboratory* merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan laboratorium yang tidak hanya efisien dalam penggunaan sumberdaya, tetapi juga bertanggungjawab terhadap lingkungan dan kesehatan personelnya. Lomba penerapan *green laboratory* bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip laboratorium yang ramah lingkungan, menyusun *baseline* data penerapan *green laboratory* serta mendapatkan laboratorium percontohan penerapan *green laboratory*.

2. BBPOM di Jakarta Ramaikan Jakarta Fair 2025 dengan Stan yang Edukatif dan Interaktif



Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta kembali ambil bagian dalam pameran dengan menghadirkan stan edukatif di Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hall C1. Kehadiran BBPOM bertujuan untuk menyampaikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seputar obat dan makanan kepada masyarakat luas. “Keikutsertaan BBPOM di Jakarta dalam Jakarta Fair ini menjadi salah satu sarana kami dalam melakukan KIE dan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dalam mengampanyekan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta pemanfaatan aplikasi BPOM *Mobile* sebagai bentuk pengawasan mandiri.” ujar Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar. Tak hanya memberikan informasi dan KIE Obat dan Makanan secara satu arah, BBPOM di Jakarta juga mengajak pengunjung untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang menarik. Pengunjung dapat berpartisipasi mengikuti berbagai *challenge* media sosial dan kuis yang edukatif dan interaktif serta mendapatkan *merchandise* yang menarik yang tersedia dalam informasi *digital* yang dikemas dalam “Garasi Jakarta-Galeri Informasi BBPOM di Jakarta”.

3. Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional



Balai Besar POM di Jakarta menghadiri kegiatan Seremonial Hari Kewirausahaan dan UMKM Expo. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian UMKM bersama HIPMI di Smesco Convention Hall.

BBPOM di Jakarta hadir mendampingi pelaku usaha UMKM Pangan Olahan menerima penyerahan Nomor Izin Edar secara simbolis oleh Ketua BPPHIPMI. Pelaku usaha tersebut merupakan binaan BBPOM

Jakarta dengan Dinas PPKUKM Jakarta tahun 2025. Pada momentum ini diselenggarakan pula UMKM Expo. Beberapa UMKM Pangan Olahan binaan BBPOM di Jakarta hadir meramaikan Expo. Selain itu, terdapat booth layanan konsultasi dari beberapa instansi pemerintah termasuk Badan POM.

Badan POM terus berkomitmen mendukung penuh peningkatan kualitas pelaku usaha di bidang Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Pangan Olahan sehingga memiliki produk aman, bermutu dan berdaya saing tinggi. Badan POM juga terus berkomitmen melindungi masyarakat dari produk yang aman dan bermutu. UMKM tangguh, berdaya saing dan masyarakat terlindungi.

4. Peringati Hari Keamanan Pangan Sedunia, BBPOM Jakarta Gelar Edukasi ke Masyarakat



Balai Besar POM di Jakarta bersama anggota DPR RI Komisi IX menggelar kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas. Kegiatan ini mengusung tema "*Science In Action*: Perjalanan Menjaga Keamanan Pangan" Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara edukatif, seperti sesi tanya jawab seputar pengenalan bahan berbahaya dalam pangan dan tips memilih pangan olahan yang aman, simulasi pengecekan produk menggunakan aplikasi BPOM *Mobile* serta CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluarsa) sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan pangan serta menjadi momentum memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem pangan yang aman dan berkelanjutan di Indonesia. Hari Keamanan Pangan Sedunia 2025 mengingatkan kita bahwa keamanan pangan berbasis sains adalah kunci melindungi kesehatan masyarakat. Ilmu pengetahuan selalu hadir dalam setiap upaya memastikan pangan aman: dari riset hingga regulasi, dari industri sampai ke dapur rumah kita. Keamanan pangan tanggung jawab kita bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 2
HIGHLIGHT KINERJA 6
DAFTAR TABEL 14
DAFTAR GAMBAR 19
BAB I 24
1.1. LATAR BELAKANG 24
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 25
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 26
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 27
1.5. PERMASALAHAN UTAMA 34
BAB II 38
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 38
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN 55
2.3. PERJANJIAN KINERJA 57
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 61
2.5. METODE PENGUKURAN 59
BAB III 63
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 63
SASARAN STRATEGIS I 69
SASARAN STRATEGIS II 112
SASARAN STRATEGIS III 130
SASARAN STRATEGIS IV 170
SASARAN STRATEGIS V 227
SASARAN STRATEGIS VI 270
SASARAN STRATEGIS VII 285
SASARAN STRATEGIS VIII 295
SASARAN STRATEGIS IX 314
SASARAN STRATEGIS X 323
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 347

3.3. REALISASI ANGGARAN 353
BAB IV 363
4.1. KESIMPULAN 363
4.2. SARAN 364

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta yang selanjutnya disebut BBPOM di Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan beredar di wilayah pengawasan Provinsi DKI Jakarta aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BBPOM di Jakarta mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, tugas fungsi dan kewenangan BBPOM di Jakarta ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kontribusi BBPOM di Jakarta terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BBPOM di Jakarta menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Pelaksanaan tugas fungsi BBPOM di Jakarta bersifat dinamis, penuh tantangan, dan membutuhkan kolaborasi berbagai *stakeholder* mengingat kompleksitas Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang menjadi pusat produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Perubahan kebijakan suprasistem terkait inovasi teknologi, globalisasi, pola konsumsi

masyarakat mengharuskan BBPOM di Jakarta untuk selalu bersikap responsif dan *agile*. Oleh karenanya perlu ditetapkan strategi baru yang dituangkan dalam Rencana Strategi BBPOM di Jakarta untuk RPJM 2025-2029.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM. Renstra dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk tetap sinergis dengan Renstra Badan POM serta relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Jakarta bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

   Melaksanakankan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

1) penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5) pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
7) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8) pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
9) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
12) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional. Perkuatan koordinasi internal dilaksanakan melalu penugasan Ketua Tim pada 4 kelompok fungsi yaitu Pengujian, Pemeriksaan, Informasi dan Komunikasi serta Penindakan. Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut:



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan mengenai aspek strategis yang dimaksud:

a. Lingkungan Internal

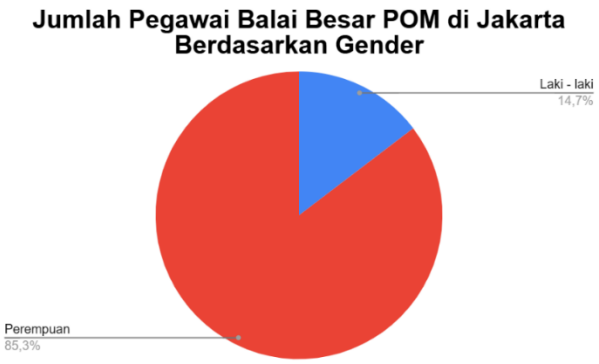
Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

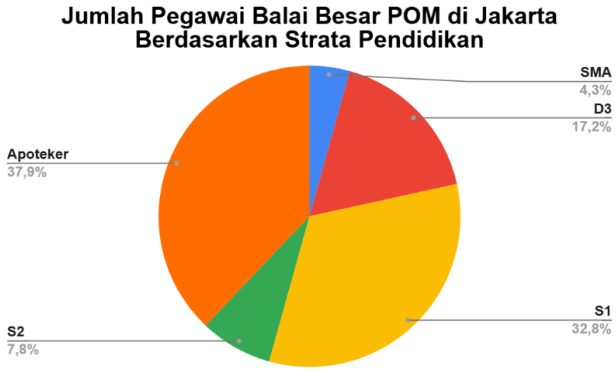
   Berdasarkan analisis beban kerja pada aplikasi SIREN SDM per TW I 2025, persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Jakarta adalah sebesar 68.64% dengan kebutuhan pegawai sebanyak 169 orang. Terdapat gap jumlah kebutuhan sebanyak 53 orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
4	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
5	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33.33%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	23	22	1	95.65%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	56	34	22	60.71%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	57	25	32	43.86%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	8	-8	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	3	-3	100%
12	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33.33%
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	2	2	0	100%
14	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
16	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
19	Pelaksana	Pelaksana	0	1	-1	100%
20	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
21	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%
22	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
23	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	0	1	-1	100%
24	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	2	-2	100%
25	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
26	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
27	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
28	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
29	Arsiparis Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
30	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2	0%
31	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
32	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	0	2	0%
33	Penata Laksana Barang Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
34	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
35	Perencana Ahli Muda	Fungsional	2	0	2	0%
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
37	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
38	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
39	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Pelaksana	0	0	0	100%
TOTAL			**169**	**116**	**53**	**68.64%**

Selain itu, masih terdapat pegawai di BBPOM Jakarta yang masih menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keterampilan (jenjang Terampil, Mahir dan Penyelia) sebanyak 13 orang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), kebutuhan PFM jenjang Keterampilan tidak diperhitungkan kebutuhannya dan bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) kategori Keterampilan yang masih menduduki jabatan tersebut, wajib ditingkatkan kompetensinya untuk memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV paling lama 10 tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Berdasarkan gender, pegawai Balai Besar POM Jakarta terdiri dari 100 orang perempuan dan 16 orang laki-laki sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 berikut:



Berdasarkan strata pendidikan, jumlah distribusi pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan non-sarjana sebanyak 23%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang berbasis saintifik seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sejalan dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut minimal pendidikan pegawai adalah S1 (Sarjana). Hal ini menjadikan pegawai yang saat ini telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Pendidikan di bawah tingkat Sarjana, secara bertahap telah ditingkatkan pendidikannya.

1. Sumber Daya Lainnya

   Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m^2 dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Balai Besar POM di Jakarta juga memiliki Laboratorium Uji BSL2 yang telah mendapat nomor NAR dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

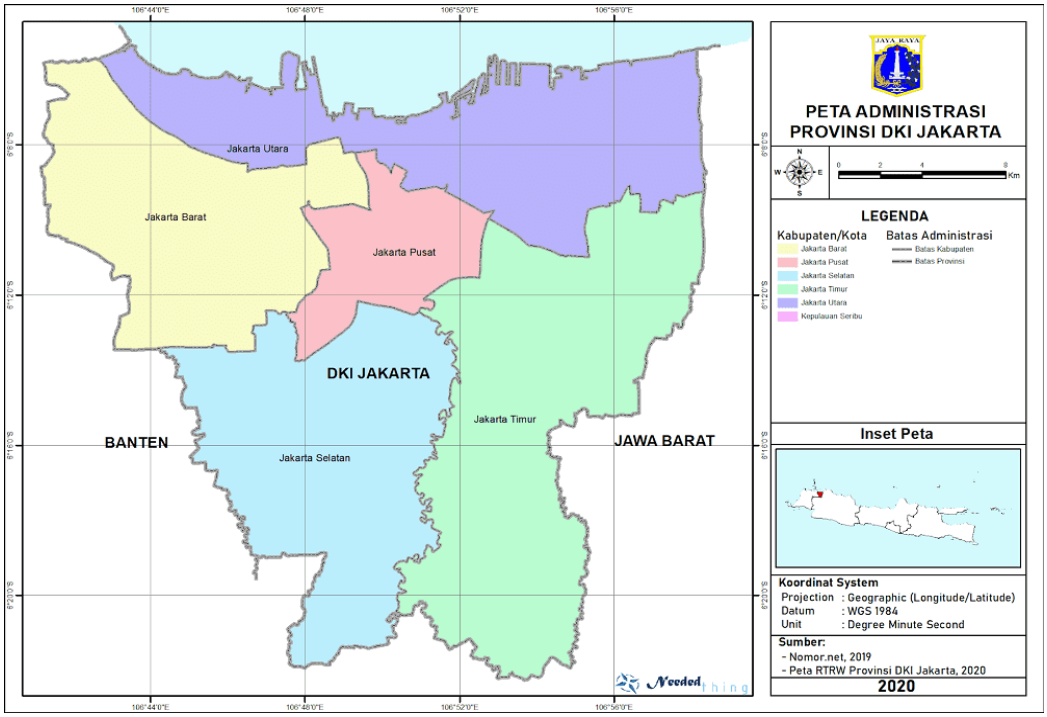
   Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta diantaranya adalah: (1) mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017; (2) digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020; (3) program UMKM Jawara dan Kerling Jakarta sejak tahun 2021; (4) fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020; (5) layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021; serta (6) UPT Balai Besar/Balai POM yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

a. Lingkungan Eksternal

Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12’ LS dan 106°48’ LS dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,34 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.165 jiwa/km^2 pada tahun 2025.



2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,

pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Aspirasi *Stakeholder*

BBPOM di Jakarta memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas yang bersifat *agile*, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Jakarta dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergen*t, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Jakarta dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BBPOM di Jakarta dapat mengimplementasikan penyesuaian kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karenanya, BBPOM di Jakarta membuka berbagai kanal untuk seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penjaringan aspirasi. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Jakarta 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia dapat menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Responden survey adalah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, setiap tahunnya, BBPOM di Jakarta melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi perwakilan pemangku kepentingan yag terdiri dari unsur Pengawas (Ombudsman), Instansi Pemerintah terkait, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BBPOM di Jakarta meningkatkan peran bukan hanya sebagai pengawas namun juga sebagai mitra kolaborasi
2. BBPOM di Jakarta secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan digitalisasi dan media sosial
3. BBPOM di Jakarta dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat sesuai kewenangan

1.6 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Jakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Jakarta dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Jakarta tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Jakarta periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Jakarta, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.7 *Kekuatan (Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Jakarta, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Jakarta di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif

dan inovatif sangat penting dalam memastikan BPOM mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kepala UPT BBPOM di Jakarta dipilih melalui seleksi terbuka yang bersifat adil, transparan dan obyektif berbasis manajemen talenta dengan tetap mengedepankan penilaian rekam jejak untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Kepala UPT BBPOM di Jakarta selama periode 2020-2024 telah berganti sebanyak 4 (empat kali). Namun hal ini tidak mengubah komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini terlihat dengan rapot kinerja yang secara konsisten terus meningkat, penyempurnaan sarana prasarana sesuai peraturan perundangan undangan terkini dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan dan kenyamanan pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia secara komprehensif, pengelolaan kinerja anggaran dan akuntabilitas yang semakin terukur serta implementasi nilai nilai Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan atas kolaborasi ditunjukan dengan jumlah kerja sama aktif BBPOM di Jakarta yang dibina sampai dengan 2024 mencakup *pentahelix* yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Akademisi (Universitas Pancasila), Pelaku Usaha dan Asosiasi (Ikatan Apoteker Indonesia),

Kelompok Masyarakat (Kwartir Daerah Pramuka Provinsi DKI Jakarta) dan Media (Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta). Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi terlihat dengan digitalisasi pada tiap proses bisnis yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM. Kolaborasi yang baik ini secara nyata telah mampu mengefisienkan anggaran dan memberikan *outcome* langsung kepada masyarakat. Highlight kegiatan kolaborasi diantaranya penyediaan konten KIE Obat dan Makanan pada videotron di 14 (empat belas) titik strategis Kota Jakarta dan penayangan konten pada angkutan transportasi umum Busway dan MRT secara berkala. Apabila mengeluarkan anggaran, penayangan konten pada videotron dan transportasi umum dapat mencapai Rp. 5.000.000.000 per tahun, namun dengan advokasi pimpinan serta kolaborasi yang tersistem dengan baik, BBPOM di Jakarta dapat menayangkan konten secara lebih luas dan tanpa biaya.

Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Jakarta sebagai bukti nyata komitmen pimpinan untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

a. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 s.d sekarang
b. Predikat Pelayanan Prima sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang
c. Kategori Gold pada Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award Tahun 2021
d. Badan publik dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan POM Tahun 2023 dan 2024
e. Agen Perubahan Badan POM Terbaik 1 Tahun 2022 dan 2024
f. Sertifikasi ISO 9001:2018 sejak tahun 2011
g. Akreditasi SNI ISO IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2003
h. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang

i. Berperan aktif mendukung Satu Dekade Opini WTP BPOM dikarenakan BBPOM di Jakarta merupakan lokus pemeriksaan BPK tiap tahunnya dan seterusnya

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

BBPOM di Jakarta telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat. Kerjasama ini memungkinkan percepatan pelaksanaan tugas fungsi, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar yang berdampak langsung untuk melindungi masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BBPOM di Jakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan, tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Jaringan kerja sama yang solid dengan pemangku kepentingan dibuktikan melalui kegiatan kolaboratif yang bersifat dinamis pada setiap fungsi BBPOM di Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Fungsi Pemeriksaan

a. Inovasi Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) merupakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini dilakukan dengan membuka layanan pada titik strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah layanan dan mempercepat waktu layanan. Program yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 ini, telah mendapat apresiasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas terkait

b. Inovasi Sultan Betawi (Konsultasi dan Layanan Informasi Sertifikasi bersama BBPOM di Jakarta) diinisiasi pada tahun 2021 berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka loket layanan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta setiap hari Selasa. Kerjasama ini menjadi solusi dari kendala jauhnya lokasi kantor BBPOM di Jakarta.

c. UMKM Jaw@ra (UMKM Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman) berkolaborasi sejak Tahun 2022 bersama Dinas PPKUKM telah membina 475 UMKM yang menghasilkan 2.571 izin edar. Jumlah ini jauh di atas target yang ditetapkan untuk BBPOM di Jakarta dan dilakukan tanpa adanya tambahan personil dan anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah menggunakan anggaran kolaborasi terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membentuk JakOfficer yaitu SDM PemProv yang diberdayakan sebagai perpanjangan tangan petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan UMKM. Sebagai upaya keberlanjutan program, UMKM Jaw@ra bersama Dinas PPKUKM menghidupkan Rumah Produksi Bakso Bersama di Rumah Susun yang mendukung Astacita Ketiga Penciptaaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan.

2) Fungsi Penindakan

Kolaborasi fungsi penindakan dengan Kantor Bea Cukai Pos Pasar Baru melahirkan inovasi Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta). Sistem ini dibangun untuk mencegah masuknya produk impor ilegal melalui jalur barang kiriman pos kepada pribadi. Inovasi ini mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di hulu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan impor ilegal serta melindungi produk domestik dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor ilegal. Selain itu, Laron Baja memberikan jaminan bagi petugas Bea Cukai dalam memberikan keputusan tegah atau rilis.

Kolaborasi penindakan Obat dan Makanan dengan skema *Criminal Justice System* dilaksanakan bersama Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta lembaga pengawasan sektoral lainnya seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Nasional.

3) Fungsi Pengujian

Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional.

BBPOM di Jakarta juga berperan aktif pada kegiatan *Food Security* pada *event* internasional yang dihadiri VVIP dan tamu negara serta penyelenggaraan persidangan sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

4) Fungsi Infokom

Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melahirkan penanyangan konten pada videotron dan media luar ruang transportasi umum. Hal ini memberikan jangkauan penerima KIE yang lebih luas di Provinsi DKI Jakarta tanpa tambahan anggaran. Selain itu kegiatan SAKA POM telah mampu membentuk 6 SAKA POM dengan jumlah anggota 243 yang akan berperan sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Jakarta melalui Krida Informasi Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan serta Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan. BBPOM di Jakarta secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan pameran berskala nasional seperti Pekan Raya Jakarta, SMESCO dan Festival Urban Farming 2025

Beberapa penghargaan yang didapatkan dari kegiatan kolaborasi adalah :

1. Terbaik 2 Lomba Inovasi Layanan Publik BPOM Tahun 2021 untuk Laron Baja
2. Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024
3. Apresiasi Pemerintah Kota Administrasi serta Dinas terkait di Provinsi DKI Jakarta atas sinergi dan kolaborasi kegiatan

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BBPOM di Jakarta

BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan manajemen ASN berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 221 tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN Badan POM dengan menempatkan kualifikasi dan kapabilitas ASN sebagai aset untuk mendorong eksistensi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

ASN BBPOM di Jakarta merupakan *Human Capital* yang memiliki peran utama dalam keberhasilan pengawasan obat dan makanan sehingga diperlukan program dan kegiatan pembelajaran kompetensi ASN dengan strategi yang tepat. Pengembangan kompetensi ASN BBPOM di Jakarta dilaksanakan dengan prinsip relevan (sesuai kebutuhan), mudah diaplikasikan (Applicable), memiliki dampak (impactfull) serta mudah diakses (Accesible). Sejak tahun 2022, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik teknis maupun manajerial dilakukan dengan memanfaatkan platform IDEAS dari PPSDM yang dapat diakses secara online dengan mudah dan lebih efisien.

Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan BBPOM di Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai diantaranya:

a. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal

   Sejak tahun 2020 – 2024 sebanyak 13 orang pegawai telah selesai melaksanakan tugas belajar baik ke jenjang Sarjana (S1) maupun Pascasarjana (S2) dan sebanyak 14 pegawai lainnya masih melaksanakan tugas belajar dalam maupun luar negeri dengan pendanaan dari BPOM maupun Non BPOM. Progam peningkatan kompetensi melalui jalur

pendidikan formal diprioritaskan untuk Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Keterampilan yang dituntut untuk menempuh Pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah lulus akan dialihkan pada jenjang Jabatan Fungsional Keahlian. BBPOM di Jakarta memiliki 14 pejabat fungsional PFM tingkat Keterampilan, 2 diantaranya akan purnabakti dalam waktu 7 tahun ke depan dan 12 pegawai lainnya sedang tugas belajar ke jenjang S1.

Pada tahun 2024, salah satu pegawai BBPOM di Jakarta a.n Retty Dwi Handayani, S.Farm, Apt, M.Si yang berhasil melaksanakan Tugas Belajar Non Degree Hubert H. Humphrey Fellowship For Professional Study pada Emory University, USA dan merupakan satu satunya WNI yang lulus seleksi dalam program tersebut. Hal ini mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM BBPOM di Jakarta.

Selain itu, terdapat 1 pegawai BBPOM di Jakarta yang telah lulus mengikuti Pendidikan Program Studi Magister Terapan Intelijen Medik pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Program ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di fungsi penindakan.

b. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, bimtek, workshop/seminar dan lain-lain.

   Tahun 2020 – 2024, BBPOM di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun setiap tahunnya. Perencanaan pengembangan kompetensi yang disusun didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas fungsi dan jabatan masing-masing.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

   BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki oleh BBPOM di Jakarta antara lain: ICPMS (*Inductively Coupled Plasma Mass*

Spectroscopy), GCMS/MS (*Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry*), RTi-PCR (*Real time - Polymerase Chain Reaction*) dan HPLC dengan detektor ELSD (*Evaporative Light Scattering Detector).* Terdapat beberapa peralatan canggih lain yang dimiliki laboratorium BBPOM di Jakarta seperti LCMS-MS yang dipindahkan ke laboratorium UPT lain dikarenakan kebijakan regionalisasi laboratorium.

Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Jakarta selaras dengan ekosistem digital Provinsi DKI Jakarta. Intervensi digital dipilih mengingat Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023 (Kominfo 2023) sebesar 51.07 (https://imdi.sdmdigital.id/home) serta indeks literasi digital sebesar 3.59 yang lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 3.54. (https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-provinsi). Hal ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh BBPOM di Jakarta untuk menjalin sinergi pemanfaatan SPBE. Penggunaan aplikasi secara online mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pada fokus Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Selain itu pemanfaatan media digital berperan penting dalam Pembangunan Ekonomi Hijau yang salah satunya akan nampak dari pengurangan media informasi secara fisik melalui *leaflet*, *pamflet* dan buku berbahan kertas.

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, komunikasi publik dengan konten media sosial yang menarik dan informastif, berperan besar untuk mewujudkan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas

   BBPOM di Jakarta merupakan bagian dari jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap UPT dalam jaringan Lab POM dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, dengan pengujian mikrobiologi dan kimia. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui regionalisasi laboratorium, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat serta mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional

6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

   BBPOM di Jakarta berperan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BBPOM di Jakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian,

pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BBPOM di Jakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Pandemi Covid19 pada Tahun 2020 merupakan bencana global yang mampu dihadapi secara responsif oleh Badan POM. Pada era pandemi, BBPOM di Jakarta bergerak cepat dan berpartisipasi aktif sebagai salah satu laboratorium Badan POM yang mendapat sertifikat NAR untuk pengujian sampel Covid19. Berbagai inovasi muncul seperti audit dan konsultasi secara daring, pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana KIE, agar tugas fungsi tetap dapat dilaksanakan secara optimal ditengah berbagai hambatan dan keterbatasan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Badan POM merupakan organisasi yang *agile* dan adaptif. Selain itu, program prioritas Badan POM diimplementasikan dengan optimal di BBPOM di Jakarta, seperti kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan, inovasi regulasi misalnya terkait stunting, *cosmetic refilling* (kosmetik isi

ulang), pengembangan probiotik, kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah.

Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini masih menjadi pusat perekonomian nasional dan global yang memiliki kemudahan berbagai akses infrastruktur dan teknologi, potensi kolaborasi yang lebih luas dengan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kekuatan BBPOM di Jakarta dalam optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi pengawasan.

1.8 Kelemahan *(Weakness)*

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan

1. Keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia (SDM)

   Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta. Analisis Beban Kerja pegawai BBPOM di Jakarta sampai dengan Desember 2024 sebesar 75.54%, dengan kekurangan jumlah pegawai sebanyak 42 orang. Dengan kompleksitas penduduk serta jumlah sarana pengawasan yang besar, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan Obat dan Makanan ke tiap sarana serta pemberdayaan ke setiap penduduk secara keseluruhan. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan

pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BBPOM di Jakarta untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Sampai dengan tahun 2024, fungsi Informasi dan Komunikasi di BBPOM di Jakarta hanya dilakukan oleh Pejabat Pengawas Farmasi Makanan (PFM) dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan tenaga ahli lain seperti pranata humas yang memiliki tugas lebih spesifik dalam publikasi informasi. Hal ini juga menghambat kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2. *Gap* kompetensi pegawai pada kompetensi manajerial dan sosial kultural

   Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BBPOM di Jakarta menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Jakarta untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian

yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BBPOM di Jakarta berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM BBPOM di Jakarta saat ini sebanyak 30.91% telah memiliki kompetensi optimal, 44.55% Cukup Optimal dan 24.55% Kurang Optimal.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki gap tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi

   Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini.

   Strategi yang signifikan mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari

alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global.

Layanan perizinan terkait langsung dengan beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan peninjauan ulang peraturan dan segregasi wewenang. Hal ini didasari dengan beberapa peraturan yang tidak sinergi serta pembagian fungsi kewenangan yang tumpang tindih. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang obat dan makanan.

4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai

   Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tusi BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BBPOM di Jakarta meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Saat ini BBPOM di Jakarta terus berupaya memenuhi kriteria sarana prasarana layanan publik seperti area parkir, lobby layanan, area bermain anak, laktasi, area disabilitas dan seterusnya. Namun keterbatasan luasan area kantor BBPOM di Jakarta menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana layanan publik terutama pada sisi luasan sesuai kriteria yang ditetapkan pada *Grand Design* Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 227 Tahun 2024. Selain itu masih terdapat sarana yang belum dimiliki oleh BBPOM di Jakarta yaitu rumah dinas pimpinan, fasilitas perkantoran termasuk meubelair yang modern, serta media informasi digital yang representatif dan canggih.

5. Kesenjangan Kapasitas Laboratorium

   Dengan terbitnya kebijakan regionalisasi, terdapat kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM) yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Keterbatasan luasan BBPOM di Jakarta berpengaruh besar terhadap pemenuhan standar peralatan yang berdampak pada terbatasnya kemampuan uji dan kompetensi personil. Sehingga apabila terdapat kasus khusus seperti Kasus KLB tidak dapat direspon cepat.

6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

   Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

   Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

7. Implementasi Pengarusutamaan Gender Belum optimal

   Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut

merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja), maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif

1.9 Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa BBPOM di Jakarta telah sejalan dengan program pengawasan keamanan obat dan makanan Nasional. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

   Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang memutar roda ekonomi secara domestik, nasional bahkan global. Dengan jumlah penduduk sebesar 11 juta jiwa, Provinsi DKI Jakarta merupakan pasar produk obat dan makanan yang potensial dan tengah berkembang. Hal ini mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Jakarta berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi

juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Jakarta kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Jakarta dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BBPOM di Jakarta memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dari Provinsi menuju pasar nasional dan pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BBPOM di Jakarta dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BBPOM di Jakarta tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BBPOM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung

meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

   Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

   Adaptasi BPOM terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BBPOM di Jakarta untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BBPOM di Jakarta dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

   BBPOM di Jakarta menggunakan integrasi aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi

sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi. Dalam pelaksanaan teknisnya, BBPOM di Jakarta mengembangkan layanan digital untuk untuk memudahkan petugas dan masyarakat pengguna layanan seperti layanan konsultasi, informasi dan pengaduan online 24 jam, nomor antrian online, pengajuan persetujuan denah PBF online. Selain itu, BBPOM di Jakarta bekerjasama bersama *stakeholder* terkait untuk memperluas layanan melalui strategi KIE online JakKonek yang terintegrasi pada *website stakeholder* .

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. BBPOM di Jakarta siap mengimplementasikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

   Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset

dan inovasi", dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah. Peluang BBPOM di Jakarta untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas seperti yang saat ini telah dibangun antara BBPOM di Jakarta dan Universitas Pancasila, dapat diperluas menjadi fasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan serta hilirisasi hasil penelitian *civitas academica* untuk pengembangan/diversifikasi produk baru. BBPOM di Jakarta merupakan lokus visitasi dalam kegiatan kolaborasi dengan lembaga internasional yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran keselarasan regulasi dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Pemendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan diimplementasikan oleh BBPOM di Jakarta melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 330 Tahun 2024. Tindak lanjut dari pembentukan TKPPOM adalah kolaborasi kegiatan yang lebih intensif bersama pemangku kepentingan. Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi dan jejaring yang dapat mendukung pencapaian asta cita selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM.

Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat membantu BPOM untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan

industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.

4. Tingginya antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

   Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Jakarta memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Jakarta dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

   Indikator keberhasilan edukasi publik salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks efektivitas KIE. Sejak ditetapkan pada tahun 2020, Indeks efektivitas KIE BBPOM di Jakarta terus meningkat semula 93,02 menjadi 96.73 pada tahun 2024 (berada pada kategori Sangat Efekif).

   BBPOM di Jakarta memiliki inovasi JakKonek sebagai Stategi Digitalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung Ekosistem Digital di Provinsi DKI Jakarta. Strategi ini meningkatkan pengetahuan dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai media, baik berupa media luar ruang, media sosial maupun penggunaan *Augmented Reality* untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya secara interaktif.

   Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BBPOM di Jakarta dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk

mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

5. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

   Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

   Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam

konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

6. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BBPOM di Jakarta telah mengimplementasikan dukungan penuh untuk kualitas hilirisasi pengembangan obat bahan alam dan kosmetik hasil suatu penelitian menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka serta kosmetik baru. Hal ini terlihat dari inisiasi kerjasama dengan Universitas Pancasila.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

1.10 Ancaman (*Threat)*

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

   Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba- lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi

standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e- commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

   Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas

pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

   BBPOM di Jakarta sebagai pelaksana teknis pada garda terdepan, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Kondisi koordinasi antar lembaga yang belum sinergis, merupakan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran

informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkanpada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

   Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Sebagai UPT, BBPOM di Jakarta haru mampu menghadapi tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat

mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang tepat agar kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

   Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-

obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

   Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan

metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

   Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

   Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan

keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk.: Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste.*

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

   Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan.

Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength	***Weakness***
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 8. Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara	1. Keterbatasan jumlah dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Gap kompetensi pegawai terutama pada kompetensi manajerial dan sosialkultural 3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai 5. Kesenjangan kapabilitas laboratorium 6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 7. Implementasi pengarusutamaan gender belum optimal
Opportunities	***Threats***
1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 6. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis Kesehatan Global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Isu lingkungan dan keberlanjutan 8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1.2 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang diacu BBPOM di Jakarta. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan , BBPOM di Jakarta dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BBPOM di Jakarta berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Jakarta untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Jakarta dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.
Visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:
   Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Jakarta . Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal,

produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:

   BBPOM di Jakarta berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:

   BBPOM di Jakarta mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat:

   Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Jakarta adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jakarta menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BBPOM di Jakarta berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.1 Misi BBPOM di Jakarta 2025 – 2029

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam menjalankan visi tersebut BBPOM di Jakarta menerapkan budaya ASN BERAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR yang dimaknai sebagai berikut:

1. Profesional

   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas

   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai- nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas

   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

II.2 Tujuan Balai Besar POM di Jakarta:

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta:

   Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Jakarta dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta:

   Melalui tujuan ini, BBPOM di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi

kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Jakarta berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta:

   Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Jakarta dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di wilayah kerja BBPOM di Jakarta: Tujuan:

   Melalui tujuan ini, BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima. Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

II.3 Sasaran Strategis BBPOM di Jakarta 2025 – 2029

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

   Sasaran strategis ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang, dukungan pada angka harapan hidup, pengurangan penyakit tidak menular. BBPOM di

Jakarta harus memastikan bahwa sarana produksi pangan fortifikasi melakukan proses produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan produk pangan fortifikasi sesuai standar.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Jakarta sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Jakarta berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Jakarta berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

   Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran strategis ini menekankan pada proses penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Obat dan Makanan

dilaksanakan secara optimal. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan pelanggar kejahatan Obat dan Makanan mendapat sanksi yang sesuai.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

8. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan

   Sasaran ini berorientasi pada kepuasan pelanggan atas penyelenggaraan layanan publik BBPOM di Jakarta. Seluruh unsur layanan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan memastikan bahwa BBPOM di Jakarta menerima umpan balik berkelanjutan untuk perbaikan layanan. Layanan yang inklusif, adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan keluaran yang diharapkan dari tercapainya sasaran.

9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

   Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi tujuan reformasi birokrasi diwujudkan dengan pelaksanaan tugas BPOM secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan partisipatif (keterlibatan masyarakat). Untuk itu diperlukan penataan organisasi yang menekankan pada penguatan kelembagaan dan tata hubungan kerja (proses bisnis), baik hubungan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Penataan organisasi bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Pelaksanaan tugas yang

disertai dengan sistem pengendalian intern yang optimal akan memastikan pencapaian tujuan BPOM sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel II.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
			Persentase Label Produk Tembakau dan/ Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar
			Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta
			Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
			Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
			Jumlah desa pangan aman
			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	pada UMKM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta
		Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta
			Nilai AKIP BBPOM di Jakarta
			Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta
			Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta

II.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor HK.02.02.7A.02.25.55 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta yang sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1,	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2,	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3,	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8
4,	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5,	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,7
6,	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
7,	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8,	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9,	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,52
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

II.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 45.651.891.000 (empat puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta depalan ratus sembilah puluh satu ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1,	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40
2,	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3,	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8
4,	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		03 - Jumlah desa pangan aman	5
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5,	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,7
6,	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70
7,	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8,	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9,	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,52
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05

II.6 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,356,864,000
	02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	97,400,000
	03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	594,401,600
	04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48,950,720
	05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	55,943,680
	06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,5	80,2	92,64	92,98	93	93,77	93,77	94	95,5	96	100	100	28,893,750
	07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	26,327,160

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
	08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	193,065,840
	09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	95,52	587,506,250
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	317,831,250
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	13,680,000
02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	1.204.810.400
03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65,1	65,1	65,1	69,9	69,9	69,9	70,5	70,5	70,5	72,8	8,186,382,000
04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	9,733,228,000
	02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	25	45	70	70	80	80	95	100	15	516,930,000

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
	03	Jumlah desa pangan aman			20	50	70	70	70	80	80	80	100	5	779,693,000
	04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	118,779,000
05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7,43	14,86	22	29,72	37,15	44,58	52,01	59,44	66,87	74,30	81,7	341,171,000
06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392,564,000
07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452,653,000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	577,890,000
09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93,5	5,750,710,750
	02	Nilai AKIP UPT BPOM												83,52	5,150,710,750
	03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,150,710,750
	04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05	5,150,710,750
														Total	**45,651,891,000**

1.1. METODE PENGUKURAN

A. Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
b. Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
c. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
d. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Jakarta sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capain setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	
Kurang	<60%	

Tabel 1. *Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan*

B. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah

dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja
2) Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80 < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60 < x ≤ 80%	
Kurang	20 < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0 < x ≤ 20%	

Tabel 2. *Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)*

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

Tabel 3. *Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan*

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input}\ IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 berikut:

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

Tabel 4. *Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	No	Indikator	Volume Indikator					Anggaran		
			Target Tahun 2025	Target Bulan Juni	Realisasi	Capaian Bulan Juni	% Capaian Terhadap Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87,00	99,45	114,31%	114,31%	1.356.864.000	500.736.919	36,90%
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000.000	1.000.000	50,00%
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	98,72	116,14%	116,14%	699.296.000	141.151.453	20,18%
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	699.296.000	141.151.453	20,18%
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	96,21	113,19%	113,19%	699.296.000	141.151.453	20,18%
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100,00	93,77	93,81	100,04%	93,81%	28.893.750	157.741.430	545,94%
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	92,00	95,50	103,80%	103,80%	26.327.160	11.950.000	45,39%
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	84,62	105,78%	105,78%	193.065.840	66.080.000	34,23%
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	95,52	99,10	103,75%	103,75%	587.506.250	157.741.430	26,85%
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	94,13	125,51%	125,51%	317.831.250	157.741.430	49,63%
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	91,40	98,37	107,63%	107,63%	963.125.000	157.741.430	16,38%
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64,00	25,00	35,71	142,84%	55,80%	13.680.000	3.506.500	25,63%
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,80	69,90	75,60	108,15%	103,85%	6.834.360.000	2.959.611.144	43,30%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Volume Indikator					Anggaran		
			Target Tahun 2025	Target Bulan Juni	Realisasi	Capaian Bulan Juni	% Capaian Terhadap Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,06	87,27	100,24%	100,24%	2.177.218.000	755.568.556	34,70%
	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15,00	70,00	70,00	100,00%	100,00%	86.280.000	56.312.000	65,27%
	16	Jumlah desa pangan aman	5,00	70,00	70,00	100,00%	100,00%	124.801.000	71.346.000	57,17%
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	70,00	70,00	100,00%	100,00%	30.690.000	19.224.510	62,64%
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,70	37,15	40,79	109,80%	49,92%	51.418.000	23.466.625	45,64%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70,00	53,00	55,38	104,49%	79,11%	392.564.000	161.305.939	41,09%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	45,83	91,66%	50,91%	137.996.000	137.995.294	100,00%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	194.295.000	86.515.000	44,53%
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	93,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%
	23	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%
	24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%
	25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	30,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%

Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian			
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	87	99,45	114,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Juni	0	0			-	
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85	98,72	116,14%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100	100	100,00%	Baik	-	100,00%
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85	96,21	113,19%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	93,77	93,81	100,04%	Sangat Baik	-	100,04%
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92	95,5	103,80%	Sangat Baik	-	103,80%

Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian			
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80	84,62	105,78%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	95,52	99,10	103,75%	Sangat Baik	-	103,75%
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75	94,13	125,51%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	91,4	98,37	107,63%	Sangat Baik	-	107,63%
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	25	35,71	142,84%	Tidak Dapat Disimpulkan	Normalisasi	110,00%
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	69,9	75,6	108,15%	Sangat Baik	-	108,15%
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	87,06	87,27	100,24%	Sangat Baik	-	100,24%

Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian			
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	70	70	100,00%	Baik	-	100,00%
	Jumlah desa pangan aman	Juni	70	70	100,00%	Baik	-	100,00%
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	70	70	100,00%	Baik	-	100,00%
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	37,15	40,79	109,80%	Sangat Baik	-	109,80%
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	53	55,38	104,49%	Sangat Baik	-	104,49%
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50	45,835	91,66%	Baik	-	91,67%
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	0	0			-	
Terwujudnya tata kelola	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Juni	0	0			-	

Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Kategori & Notifikasi Warna	Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian			
pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Juni	0	0			-	
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	0	0			-	
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	0	0			-	
								1985,35%
								104,49%
								Istimewa

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	87	99.45	114.31	Tidak dapat disimpulkan	

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d)/4

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Target sampel
   2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring)
   3. Renlak kategori kelas terapi

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %). 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

   Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Renlak periode/waktu sampling
   2. Ketentuan evaluasi penandaan
   3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot : 20%), 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan pengujian sesuai periode dan parameter uji/ Total target sampel x 100%).

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %) 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

   Mencakup kesesuaian:
   1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
   2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6

a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6

a. Pemenuhan target pengawasan OBA = Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

   Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
   1. SLA Sampling
   2. SLA Pengujian
   3. SLA Pelaporan
d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:
   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	87	92,24	106,02%
TW II Tahun 2025	87	99.45	114.31%

Pada triwulan II tahun 2025 capaian kinerja meningkat dibandingkan capaian triwulan I tahun 2025, dikarenakan pada triwulan II pengujian sampel sudah berjalan maksimal untuk jumlah sampel yang disampling, jumlah sampel yang diuji, dan jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu ditiap bulannya. Sedangkan pada triwulan I, terdapat blokir anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	99.45	114.31% 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi indikator, diperoleh hasil untuk setiap komoditi sebagai berikut:

Sediaan Farmasi	Realisasi
Obat	99,51
Obat Tradisional	99,12
Suplemen Kesehatan	100,00
Kosmetik	99,17

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sampling Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah sesuai dengan perencanaannya, pengujian dilakukan dengan parameter uji sesuai Pedoman Sampling dan pelaporannya melalui SIPT hampir seluruhnya memenuhi *timeline* yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling, juga telah dilakukan monitoring penarikan Obat dan tindak lanjut terhadap surat yang dikirim oleh Kedeputian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kesesuaian ini berkontribusi pada pencapaian target realisasi.

e. Upaya Perbaikan/ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain, juga dengan Kedeputian terkait, serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta antara lain peningkatan pengawasan post market, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Sampling serta peningkatan koordinasi di internal Balai, koordinasi dengan Badan POM (Kedeputian) maupun Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, sudah efektif untuk memenuhi target indikator kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di triwulan II ini.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	99.45	114.31%	1.356.864.000	500.736.919	36,90 %	**0,00**	**-1,00**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -1,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam :

1. Evaluasi kinerja UPT terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian, pelaporan hasil sampling dan pengujian serta tindak lanjut

terhadap hasil sampling dan pengujian sampel yang sesuai dengan ketentuan.

2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan sampling dan pengujian, kinerja pengujian, pelaporan serta respon / tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM (Kedeputian).

2. PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%**

Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	-	-	-
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-	-	-

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dipengaruhi oleh pelaksanaan **KIE Farmakovigilans** oleh UPT BPOM, yang meningkatkan pemahaman Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis tentang pentingnya pelaporan serta motivasi melalui pemberian sertifikat partisipasi. Kolaborasi aktif antara BPOM dan Fasyankes (rumah sakit, puskesmas, klinik) turut mendorong peningkatan persentase pelaporan, terutama di wilayah dengan cakupan KIE intensif. Namun, **kendala teknis** seperti sistem pelaporan yang rumit, kurangnya infrastruktur digital, dan beban kerja tinggi Tenaga Kesehatan menyebabkan *underreporting*, terutama di daerah terpencil atau Fasyankes yang belum terjangkau program KIE. Selain itu, ketergantungan pada satu tenaga per Fasyankes berpotensi menimbulkan inkonsistensi data.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk menyempurnakan kinerja ke depan, diperlukan **perluasan cakupan KIE Farmakovigilans**, **pelatihan berkala**, dan penyederhanaan prosedur pelaporan melalui aplikasi mobile yang user-friendly. Perlu dibuat integrasi sistem pelaporan KTD/ESO dengan Sistem Informasi Kementerian Kesehatan akan memastikan konsistensi data. Sinergi dengan asosiasi profesi (IDI, PPNI) dan Dinas Kesehatan daerah juga penting untuk sosialisasi farmakovigilans serta pendampingan Fasyankes kurang aktif. Dengan memperkuat kapasitas SDM, infrastruktur, dan kolaborasi multidisiplin, pelaporan KTD/ESO tidak hanya memenuhi kewajiban

regulasi, tetapi juga menjadi fondasi keamanan pasien dan kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM terbukti efektif meningkatkan pelaporan KTD/ESO melalui bimbingan teknis dan pemberian sertifikat partisipasi, terutama di Fasyankes yang terjangkau program ini. Kolaborasi dengan asosiasi profesi seperti IDI, IAI, serta Dinas Kesehatan daerah turut memperluas pemahaman tentang pentingnya pelaporan. Prosedur tetap pelaporan pada masing-masing sarana pelayanan kesehatan serta beban kerja tinggi tenaga kesehatan menjadi kendala teknis utama, yang menjadikan pelaporan sebagai prioritas sekunder. Kebijakan satu tenaga kesehatan mewakili satu Fasyankes juga berpotensi menyebabkan underreporting saat tenaga tersebut tidak tersedia. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan, perluasan program KIE misal tentang penerapan prosedur tetap dalam pelaporan fasyankes, pemberian insentif non-materiil, serta integrasi sistem pelaporan dengan Sistem Informasi Kementerian Kesehatan. Dengan perbaikan menyeluruh ini, diharapkan dapat tercipta sistem farmakovigilans yang lebih responsif dan berkelanjutan di seluruh Fasyankes.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	#DIV/0!	2.000.000	1.000.000	50,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	85	98,72	116,14	Tidak dapat disimpulkan	

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi :

   1. Kesesuaian target sampel UPT
   2. Kesesuaian parameter uji
   3. Ketepatan pengambilan kesimpulan
   4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
   5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

   1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
   2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

   Cara Perhitungan: Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan: (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A1 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%.

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)/Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	100	117,65%
TW II Tahun 2025	85	98,72	116,14%

Pada triwulan II tahun 2025 realisasi dan capaian kinerja menurun apabila dibandingkan dengan triwulan I. Pada bulan April persentase jumlah sampel yang diuji berbanding jumlah sampel yang masuk laboratorium memiliki persentase 55,94%, ini dikarenakan sampling dan renlak April baru dilaksanakan di akhir bulan April.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	98,72	116,14 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Dari 250 sampel pangan olahan yang masuk laboratorium, sebanyak 217 sampel

telah selesai dilakukan pengujian. Sebanyak 194 sampel memenuhi syarat dan terdapat 23 sampel tidak memenuhi syarat.

Pada tahun 2025, indikator kinerja utama Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti merupakan IKU baru dan merupakan baseline tahun 2025. Beberapa faktor seperti persentase kesesuaian target sampel, parameter uji, persentase ketepatan pengambilan keputusan, waktu pengambilan, waktu pelaporan dan tindak lanjut sesuai Pedoman sampling dapat mempengaruhi total nilai persentase realisasi.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tim Pemeriksaan BBPOM Jakarta melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan UPT, stake holder dan sarana industri setempat terhadap temuan hasil uji produk pangan olahan yang TMS di wilayah kerja setempat agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan olahan yang dihasilkan sesuai ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah efektif untuk memenuhi target indikator kinerja persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di triwulan II ini.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,72	116,14%	594.401.601	141.151.453	23,75 %	**4,89**	**3,89**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 3,89 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel pangan olahan yang berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	100	100	100	Baik	

Pada triwulan II tahun 2025 nilai realisasi dan capaian kinerja adalah 100% dengan kategori “baik”. Sampel KLB keracunan pangan yang masuk, telah dilakukan pengujian seluruhnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	100	-	-
TW II Tahun 2025	100	100	100

Pada triwulan II tahun 2025 nilai realisasi dan capaian kinerja sebesar 100% karena terdapat 1 sampel KLB pada bulan Mei dan telah selesai dilakukan pengujian pada bulan tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100 ▲	Tercapai/ melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan IKU baru dalam tahun 2025 dan menjadi baseline di tahun ini. **.** Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi di internal Balai dengan Balai lain, stake holder dan sarana produksi setempat serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tim Pemeriksaan BBPOM Jakarta melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan UPT dan stake holder setempat terhadap sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar agar dapat dilakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar di triwulan II ini.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	48.950.720	141.151.453	288,35 %	**0,00**	**-1,00**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -1,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel pangan olahan yang berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	85	96,21	113,1845	Tidak dapat disimpulkan	

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E+10%F

Keterangan :

A= Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

(Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ Jumlah Sampel yang diperiksa dan diuji) X 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	85	96,21	113,19%
TW II Tahun 2025	85	96,21	113,19%

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sama dengan realisasi dan capaian pada TW 1.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,21	113,19 	Tercapai/ melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan IKU baru dalam tahun 2025 dan menjadi baseline di tahun ini. Sesuai dengan IKU nya nilai persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti dipengaruhi oleh persentase kesesuaian sampel target dan parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan, waktu pengambilan, waktu pelaporan, dan tindaklanjut sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target namun belum maksimal karena aspek kesesuaian waktu sampling untuk produk produk PIRT tidak sesuai akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga target sampel triwulan I dikurangi secara proporsional dengan anggaran yang tersedia

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tim Pemeriksaan BBPOM Jakarta melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan UPT, stake holder dan sarana industri setempat terhadap temuan hasil uji sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang TMS di wilayah kerja setempat agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk yang dihasilkan sesuai ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah efektif untuk memenuhi target

indikator kinerja presentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di triwulan II ini.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	96,21	113,19%	55.943.680	141.151.453	252,31 %	**0,45**	**-0,55**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0,55 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase Sampel PIRT berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut sampel sesuai dengan ketentuan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, kinerja pengujian, pelaporan serta respon tindak lanjut terhadap informasi dari Badan POM

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH *STAKEHOLDER*

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	93,77	93,81	100,04	Sangat baik	

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
   - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	92,64	83,2	89,81%
TW II Tahun 2025	93,77	93,81	100,04

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi sudah mencapai target dan melebihi capaian triwulan I karena sudah dilakukan evaluasi data dan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan untuk segera menyelesaikan tindakan perbaikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	100	93,81	93,81% 	Akan Tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sudah mencapai target karena sudah dilakukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon, dan melakukan evaluasi data serta memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan pelaku usaha melaporkan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BBPOM di Jakarta

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tindaklanjut oleh pelaku usaha lama karena ada beberapa faktor yang memerlukan waktu untuk ditindaklanjuti, terjadi juga kesalahan perhitungan penyebut, harusnya yang dihitung adalah yang telah masuk *timeline* untuk tindaklanjut, tetapi jumlah respon sudah mulai banyak tetapi tidak sebanding denganbanyaknya rekomendasi yang diterbitkan. Olehkarenanya dilakukan

rekomendasi perbaikan kinerja dengan melakukan evaluasi data dan memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan, dan melakukan revisi sistem penghitungan dan membuat usulan revisi target karen berdasarkan hasil evakluasi untuk tahun 2025 BBPOM Jakarta hanya mampu dengtan target 86 %.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM Jakarta melakukan monitoring terhadap respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait melalui sistem roti buaia sehingga dapat diperoleh data sarana yang belum mengirimkan bukti tindakan perbaikan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	83,33	89,95%	28.893.750	10.966.000	37,95 %	**2,37**	**1,37**	**84%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 1,37 dengan capaian tingkat efisiensi 84% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

Evaluasi kinerja UPT dan perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait tindak lanjut persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang lintas sektor.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	92	95.50	103.81		Sangat Baik

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
   3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,

pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. % Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%

B. % Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
   = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

C. % Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

A. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

B. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	92	92	100%
TW II Tahun 2025	92	95.50	103.81%

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat kenaikan capaian dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 103.81% dan masuk kategori Sangat Baik. Nilai tersebut karena adanya permintaan pendampingan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dari Pusat dalam rangka penelusuran antara lain UKOT sehingga jumlah sarana yang diperiksa lebih dari target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	95.50	103.81%	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pemeriksaan sarana produksi termasuk kategori Sangat Baik dengan nilai 103.81 %. Hal tersebut karena adanya permintaan pendampingan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dari Pusat dalam rangka penelusuran antara lain UKOT sehingga jumlah sarana yang diperiksa lebih dari target yang ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan/ Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada periode selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan dan diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi diverifikasi kesesuaiannya dengan pedoman secara berjenjang.
- Adanya sistem SIDOEL untuk monitoring hasil pengawasan, tindak lanjut dan pelaporannya
- Terdapat penanggungjawab masing-masing kategori produksi sediaan

farmasi yang melakukan monitoring secara rutin agar pelaporan dan tindak lanjut sesuai pedoman dan sesuai *timeline*.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	95.50	103.80%	26,327,160	66,080,000	251.00 %	**0.41**	**-0.59**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.59 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan, kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan, pelaksanaan inspeksi, kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi.

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	80	84,62	105,78	Sangat Baik	

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

    1) Ketepatan waktu tindak lanjut

    2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula : **% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

= *Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa **x 100%**

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)

ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)

iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)

d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	80	80	100,00
TW II Tahun 2025	80	84,62	105,78

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat kenaikan capaian dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 105.78% dikarenakan pada triwulan I terdapat efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	84,62	105,78	Tercapai/ melampaui

Pada triwulan II tahun 2025, capaian melebihi 100% dikarenakan saat pemeriksaan 1 sarana yang diperiksa memiliki 2 nomor izin edar yaitu MD dan PIRT.

d. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	84,62	105,78%	193.065.840	66.080.000	34,23 %	**3,09**	**2,09**	**75%**	Tidak efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 2,09 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait ketepatan waktu, ketepatan tindak lanjut, ketepatan grading terhadap sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	95,52	99,10	103,75	Sangat Baik	

a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

b) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;

c) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

d) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

c. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

d. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

f. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

g. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	95,52	95,52	100,00
TW II Tahun 2025	95,52	99,10	103,75

Pada triwulan II tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 dikarenakan pada triwulan II manual indikator sudah fix sehingga dapat dilakukan perhitungan pencapaian indikator berdasarkan nilai target dan realisasi yang real.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	**99.57**	104,24 	Tercapai/ Melampaui

d. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,52	99.57	104,24%	587.506.250	157.741.430	26,85 %	**3,86**	**2,86**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 2,86 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait kesesuaian target pemeriksaan dan kesesuaian tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan yang memiliki kewenangan penyerahan obat.
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, dan kesesuaian *timeline* penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	75	94.13	125,50%	Tidak dapat disimpulkan	

a) Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

b) Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

a. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa

Ketepatan waktu pelaporan

Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X 100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A: Pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B: Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C: Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	75	95,33	127,11%
TW II Tahun 2025	75	94.13	125,50%

Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan baik pada TW I maupun TW 2 2025 keduanya di atas 110% dikarenakan target masih mengikuti target saat efisiensi yaitu 75 sehingga pembagi terlalu rendah. Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan perihal peningkatan target menjadi 92% sehingga diharapkan capaian pada akhir tahun periode 2025 meningkat ke kategori sangat baik

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94.13	125,50% 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan pada TW 2 2025 di atas 110% dikarenakan target masih mengikuti target saat efisiensi yaitu 75 sehingga pembagi terlalu rendah. Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan perihal peningkatan target menjadi 92% sehingga diharapkan capaian pada akhir tahun periode 2025 meningkat ke kategori sangat baik

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan karena pada triwulan 1, pelaksanaan pemeriksaan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena

adanya kebijakan efisiensi anggaran serta pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada periode selanjutnya, monitoring terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, tindak lanjut sesuai dengan pedoman, penyesuaian renlak bulanan dilengkapi dengan justifikasi, dan dilakukan penjadwalan pelaporan SIPT setiap bulan agar pelaporan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu untuk mempertahankan kinerja BBPOM di Jakarta.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan adanya monitoring pelaksanaan inspeksi melalui spreadsheet SIDOEL dapat dilaksanakan pemantauan ketepatan tindak lanjut sesuai pedoman dan ketepatan waktu dalam pelaporan SIPT. Selain itu didukung dengan program rutin pemantauan kinerja bulanan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	94,13	125,51%	317.831.250	157.741.430	49,63%	**2,53**	**1,53**	**80%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 1,53 dengan capaian tingkat efisiensi 80% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input,

dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan target sarana yang diperiksa dan ketepatan tindak lanjut
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan target sarana yang diperiksa, dan ketepatan sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	91.4	98.37	107.62		Sangat Baik

a) Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan AIam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

b) Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

c) Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

d) Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

e) Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

f) Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

g) Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan= a+b2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasiJumlah target iklan yang diawasi x100%

b. Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
b. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

1. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
2. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
3. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

b. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	91,4	91,4	100%
TW II Tahun 2025	91.4	98.37	107.62

Pada triwulan II tahun 2025 perentase capaian iklan sediaan farmasi dan pangan olahan meningkat dari triwulan I yaitu dari 100% menjadi 107.62% dan masih termasuk kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4	98.37	107.62 	Tercapai/ Melampaui

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi yang diawasi sesuai ketentuan karena pengawasan iklan obat, OBA, dan Suplemen Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Sedangkan pengawasan iklan yang perlu ditingkatkan adalah Iklan Kosmetik (97,18%) dan Iklan Pangan Olahan (94,66%) sebagaimana tabel berikut:

Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO
April	100	94.81	100	100	99.75
Mei	100	96.43	100	100	93.53
Juni	100	97.18	100	100	94.66

Terdapat peningkatan/perbaikan terhadap pencapaian target indikator kinerja untuk persentase iklan sediaan kosmetik, dari yang sebelumnya di bulan Maret (TW1) 89.53%, bertahap menjadi 97.18% pada bulan Juni. Untuk kekurangan capaian jumlah iklan kosmetik pada TW1, dilakukan penambahan jumlah evaluasi

iklan pada TW selanjutnya, dengan penghitungan capaian secara akumulasi (bulan Januari s.d. Juni 2025).

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perbaikan kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengawasan iklan sesuai arahan dan petunjuk teknis dari pusat, serta melaksanakan pengawasan iklan sesuai target dan pembagian media yang telah ditetapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengawasan iklan obat, OBA, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan telah dilaksanakan dengan baik oleh SDM yang kompeten dan telah mengikuti pelatihan pengawasan iklan dari Badan POM.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	98.37	107,62%	28.893.750	157,741,430	545.94%	**0.20**	**-0.80**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.80 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan target pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara target dan pelaksanaan iklan yang diawasi, serta pelaporan iklan tepat waktu sesuai renlak.

Sasaran Strategis 02

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

12. PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	25	35,71	142,86%	Tidak dapat disimpulkan	

a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	10	17,86	178,6%
TW II Tahun 2025	25	35,71	142,86%

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target. Dari 18 sarana produksi fortifikasi, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 10 sarana produksi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	35,71	55,79% 	Perlu Upaya Keras

Persentase capaian triwulan II berbanding target tahun 2025 yaitu 55,79% masuk kategori perlu upaya keras untuk mencapai target tahunan dikarenakan membutuhkan 44,2% dalam waktu 6 bulan tersisa untuk memenuhi target 18 sarana produksi fortifikasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi telah dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Juni sejumlah 2 sarana, 2 sarana, dan 1 sarana. Seluruh sarana tersebut telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada periode selanjutnya, pemeriksaan sarana produksi fortifikasi direncanakan akan segera diselesaikan pada triwulan 3 2025. Terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan dilakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan sesuai dengan pedoman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada periode triwulan 2 2025, capaian melebihi anggaran dikarenakan pemeriksaan sarana fortifikasi menyesuaikan dengan sampling fortifikasi sehingga banyak dilakukan di triwulan 1 dan 2, sementara target pembagi awal masih diprediksi sesuai awal saat efisiensi anggaran (target rendah di triwulan 1 dan 2).

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

No.	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25,00	35,71	142,84%	13.680.000	3.506.500	25,63%	5,57	4,57	75%	Tidak efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 4,57 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan

perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait cakupan sarana produksi fortifikasi
2. Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran Strategis 03

MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

13. NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI JAKARTA SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Laboratorium BBPOM di Jakarta merupakan salah satu laboratorium BPOM yang harus senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mewujudkan kemampuan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Indikator penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium (SKL). Standar kemampuan laboratorium adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM nomor 161 tahun 2025 tentang Standar kemampuan laboratorium unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM. Standar kemampuan laboratorium merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM untuk:

i. Melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

ii. Melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;

iii. Melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan

iv. Melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas

Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Laboratorium regional mengkoordinasikan laboratorium UPT dalam satu regional maupun unit kerja terkait dan melakukan pengujian tingkat 4. Laboratorium anggota merupakan UPT yang terdiri dari BB/BPOM yang melakukan pengujian tingkat 3, BPOM di Kabupaten/Kota yang melakukan pengujian tingkat 2 serta LOKA POM yang melakukan pengujian tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Laboratorium Tingkat 4

  Laboratorium tingkat 4 merupakan laboratorium regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Laboratorium Tingkat 3

  Laboratorium tingkat 3 merupakan laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi. Sebanyak 27 Balai Besar dan Balai POM yang bekerja di tingkat provinsi melakukan pengujian dasar kimia, mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta merupakan laboratorium tingkat 3 dibawah koordinasi laboratorium balai regional Semarang bersama dengan 8 UPT lain yaitu, BBPOM di Serang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, BPOM di Bogor, BPOM di Tangerang, BPOM di Banyumas, BPOM di Tasikmalaya dan BPOM di Surakarta
- Laboratorium Tingkat 2

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- Laboratorium Tingkat 1

  Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota. Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31% x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) /2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3

(50 x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

(75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

(75% x a) + (15% x b) + (10 % x c)

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab

c. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	69,9	75,6	108,15	Sangat baik	

Realisasi nilai SKL triwulan II tahun 2025 adalah 75,6 dengan target 69,9 sehingga dapat dikategorikan sangat baik, karena capaian IKU nya lebih dari 100% dan kurang dari atau sama dengan 110%. Capaian nilai SKL tersebut diperoleh dari:

- persentase pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 82,25

  Nilai pemenuhan standar ruang lingkup merupakan rata-rata hasil pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium kimia dan mikrobiologi. Persentase pemenuhan standar ruang lingkup pengujian kimia obat; kosmetik; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; pangan dan mikrobiologi berturut-turut sebesar 75,0; 89,2; 86,0; 55,5 dan 88,1

- Persentase pemenuhan standar peralatan 85,9

  Persentase pemenuhan standar peralatan diperoleh dari nilai rata-rata pemenuhan standar peralatan kimia dan mikrobiologi. Persentase pemenuhan standar peralatan kimia sebesar 88,7 sedangkan persentase pemenuhan standar peralatan mikrobiologi adalah 83,1.

- Persentase pemenuhan MA terverifikasi 72,9

  Persentase pemenuhan MA terverifikasi dihitung seperti halnya pemenuhan standar ruang lingkup, yaitu diambil dari rata-rata persentase pemenuhan MA terverifikasi dari seluruh laboratorium. Persentase pemenuhan MA terverifikasi laboratorium kimia obat; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; pangan dan mikrobiologi sebesar 56,3; 95,1; 77,0; 54,5 dan 81,4

- Persentase standar kompetensi laboratorium 50

  Hasil pemenuhan standar kompetensi laboratorium merupakan penjumlahan dari kompetensi seluruh laboratorium, baik aspek 1 maupun aspek 2. Pemenuhan standar kompetensi laboratorium merupakan penggabungan dari nilai kompetensi laboratorium obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan pada aspek 1 sebesar 10; nilai kompetensi laboratorium pangan pada aspek 1 dan aspek 2 sebesar 20 serta nilai kompetensi laboratorium mikrobiologi pada aspek 1 dan aspek 2 sebesar 20

d. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	65,1	71	109,06
TW II Tahun 2025	69,9	75,6	108,15

Realisasi nilai SKL triwulan II dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan, demikian pula capaian kinerja mengalami penurunan satu poin.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori=
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,8	75,6	103,85 	Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi nilai SKL pada triwulan II adalah 75,6. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai target akhir tahun 2025 sebesar 72,8 maka capaiannya sebesar 103,85 dan termasuk kategori tercapai/melampaui. Hal ini diharapkan dapat konsisten hingga akhir tahun anggaran 2025.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penilaian standar kemampuan laboratorium (SKL) dilaksanakan oleh tim dari PPPOMN dengan tahapan sebagai berikut:

i. Balai Basar/Balai POM mengisi *tools* monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.

ii. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian *tools* monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).

iii. Pembuatan ‘Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT’

iv. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan ‘Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4’ yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputian 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

Berdasarkan penilaian dari tim PPPOMN, nilai SKL TW II BBPOM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut:

i. Nilai persentase pemenuhan standar ruang lingkup (SRL) sebesar 82,5

ii. Nilai persentase pemenuhan standar peralatan sebesar 85,9

iii. Nilai persentase pemenuhan standar kompetensi laboratorium sebesar 50

iv. Nilai persentase pemenuhan standar MA terverifikasi sebesar 72,9

Berdasarkan data capaian pemenuhan SKL diatas dapat diketahui bahwa nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium memiliki nilai paling rendah di antara standar lain. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat parameter pengujian yang hanya mampu dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengujian pada triwulan berikutnya serta memberikan penugasan kepada penguji agar setiap parameter pengujian minimal dapat dilakukan pengujian oleh minimal dua orang penguji.

Capaian nilai SKL melebihi target yang telah ditetapkan (108,1%) disebabkan oleh penyesuaian *baseline* laboratorium serta perbedaan persepsi formula perhitungan *exercise* penetapan target dengan formula penilaian serta telah dilaksanakannya kegiatan untuk pemenuhan nilai SKL sesuai komponen penilaian, kecuali pada komponen pemenuhan standar peralatan.

Nilai pemenuhan standar peralatan tidak terjadi peningkatan dibandingkan dengan nilai TW I karena proses pengadaan alat masih belum selesai. Peningkatan

persentase pemenuhan standar peralatan akan tercapai pada TW III sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan di DIPA.

Sebagai tindak lanjut adanya penyesuaian baseline dan perbedaan persepsi formula perhitungan, dilakukan penyesuaian target SKL. Hal yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan target SKL adalah mengirimkan surat permohonan penyesuaian target kepada Kepala PPPOMN tertanggal 4 Juni 2025 dan dilaksanakan desk penyesuaian target SKL bersama Biro Perencanaan dan Keuangan serta PPPOMN pada tanggal 26 Juni 2025. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi pencapaian target yang melebihi 110%.

g. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta terus berusaha untuk mencapai dan meningkatkan nilai SKL yang telah ditetapkan melalui beberapa langkah diantaranya:

i. Dilakukan pembelian sampel dan verifikasi metode analisis untuk pemenuhan ruang lingkup
ii. Dilakukan verifikasi metode analisis untuk pemenuhan standat MA terverifikasi
iii. Dilakukan bimbingan teknis/ pelatihan internal untuk meningkatkan kompetensi laboratorium
iv. Dilakukan penugasan pengujian untuk parameter uji yang hanya dilakukan oleh satu orang penguji untuk peningkatan kompetensi laboratorium
v. Dilakukan pengadaan alat untuk memenuhi standar peralatan

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan BBPOM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja pemenuhan SKL antara lain:

i. Menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan internal, mengikuti pelatihan eksternal atau pelatihan terpadu yang dilaksanakan oleh PPPOMN untuk meningkatkan standar ruang lingkup dan standar kompetensi laboratorium.
ii. Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kegiatan verifikasi metode analisis ini dapat meningkatkan nilai standar metode analisis terverifikasi. Pelaksanaan verifikasi metode analisis untuk parameter yang belum ada dalam standar ruang lingkup juga dapat berdampak pada peningkatan nilai standar ruang lingkup.

iii. Mengidentifikasi parameter uji yang hanya mampu dilakukan oleh satu orang dalam laboratorium. Selanjutnya menugaskan personel yang belum mampu melakukan pengujian tersebut untuk dilakukan penugasan pengujian dengan pemenuhan kompetensi terlebih dahulu

iv. Peningkatan persentase pemenuhan standar peralatan dilakukan dengan perencanaan pengadaan alat laboratorium pada triwulan 2 dan 3 tahun 2025. Pengadaan alat yang akan dilakukan adalah: inkubator suhu 20-25ºC, timbangan mikro, homogenizer automatic stomacher blender mix, UV lamp, lemari asam, laboratory blender, microwave digester, laboratory blender, UPS 10KVA dan mikropipet. Selain itu juga akan diadakan penambah nilai peralatan, yaitu: scanner TLC, visualizer untuk TLC, detektor ELSD, detektor fluorescence dan detektor PDA. Kondisi luas ruangan laboratorium BBPOM di Jakarta dan umur peralatan merupakan salah satu faktor yang kurang mendukung untuk penambahan alat yang sesuai standar.

v. Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun maupun 3 tahun untuk alat tertentu bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Internasional dan untuk memastikan kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.

vi. BBPOM di Jakarta harus mengidentifikasi kembali alat-alat laboratorium yang sudah kurang berfungsi untuk diremajakan atau diganti dengan pengadaan alat lain yang lebih dibutuhkan sesuai perkembangan terkini. Perencanaan pengadaan alat harus mengacu pada Standar Peralatan yang telah ditetapkan

vii. Berperan sebagai provider uji banding antar laboratorium dalam mengatasi kendala keterbatasan penyelenggara uji profisiensi sebagai penjaminan mutu eksternal pengujian

viii. Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian sekaligus sebagai unjuk kerja eksternal dalam penjaminan mutu hasil pengujian.

ix. Melakukan reakreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk mempertahankan status akreditasi laboratorium. Kegiatan akreditasi lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juni 2025, saat ini sedang berproses perbaikan temuan ketidaksesuaian.

i. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Salah satu sumberdaya yang digunakan untuk mencapai target kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium adalah anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran target kinerja tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,90	75,60	108,15%	6.384.360.000	2.959.611.144	43,30 %	**2,5**	**1,5**	**80%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 1,5 dengan capaian tingkat efisiensi 80% sehingga disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran dikategorikan tidak efisien. Perhitungan efisiensi kegiatan ini berdasarkan rasio antara output dan input dalam bentuk anggaran. Perhitungan rasio anggaran pada triwulan II ini masih rendah, sebab banyak kegiatan belum terealisasi pada triwulan II, kebijakan efisiensi anggaran pada triwulan I masih memiliki efek pada triwulan II sehingga mengakibatkan belum optimal pemanfaatan anggaran yang ada. Terdapat beberapa kebutuhan laboratorium yang inden mengakibatkan tertundanya pembayaran. Pada triwulan selanjutnya akan diupayakan rasio *output* dan *input* anggaran dapat lebih baik. Penilaian tingkat efisiensi anggaran ini bersifat relatif, yang artinya kegiatan dinyatakan tidak efisien akan berubah menjadi efisien ketika dievalusi oleh pihak

lain dan sebaliknya. Sehingga diharapkan pengukuran efisiensi anggaran pada masa mendatang dapat mempertimbangkan input lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

j. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium
2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai standar kemampuan laboratorium

Sasaran Strategis 04

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

14. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	87,06	87,27	100,24	Sangat Baik	

a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
   1. Sumber atau Narasumber KIE
   2. Konten atau Informasi KIE
   3. Pemahaman Audiens KIE
   4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau

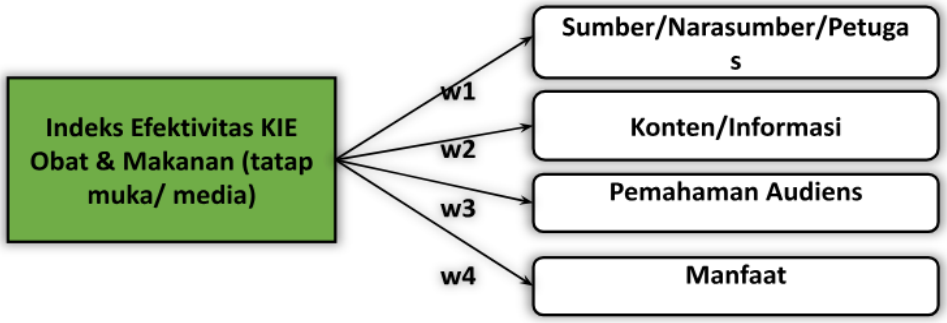
responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+ s(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 87,27 (Efektif) dan telah mencapai target triwulan II sebesar 87.06 dengan capaian sebesar 100,24%, kriteria Sangat Baik. Nilai ini diperoleh dari 865 responden KIE tatap muka dengan nilai indeks KIE tatap muka sebesar 87,423 (Efektif) dan 191 responden KIE melalui media dengan nilai indeks KIE melalui media sebesar 87,118 (Efektif).

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	87,06	87,18	100,14%
TW II Tahun 2025	87,06	87,27	100,24%

Pada triwulan II tahun 2025 diperoleh tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar 87,27, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I tahun 2025 sebesar 87,18 (nilai merupakan kumulatif).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,27	100,24% ▲	Tercapai/ Melampaui

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 diperoleh nilai sebesar **87,27 (Efektif)** dan telah mencapai target tahun 2025 sebesar 87,06 dengan capaian sebesar 100,24%, kriteria **Tercapai/Melampaui**

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan KIE baik secara tatap muka maupun melalui media dengan beragam tema yang relevan dengan target masyarakat.
2) Implementasi inovasi Selayar Jakarta (Sharing Edukasi Lewat Layar untuk Masyarakat Jakarta) sebagai salah satu kegiatan KIE BBPOM di Jakarta yang dilaksanakan secara daring dan rutin dilakukan sebulan sekali.
3) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.
4) Publikasi informasi Obat dan Makanan terkait Cek KLIK, Kata BPOM, dan Jakkonek melalui media luar ruang (Videotron) yang ditayang di tempat-

tempat publik dan strategis, media cetak, dan media daring untuk memperluas publikasi informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat.

5) Pelaksanaan evaluasi pada setiap kegiatan yang meliputi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan sebagai dasar penyusunan pelaksanaan kegiatan KIE berikutnya.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

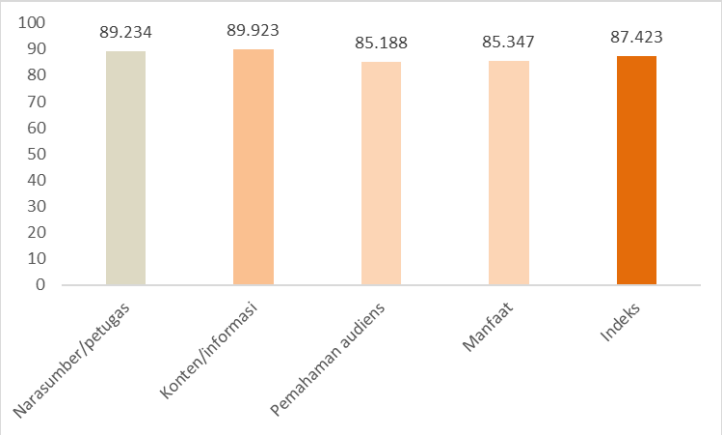
Sebagai rekomendasi perbaikan kinerja dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Penganekaragaman tema pelaksanaan KIE yang menyesuaikan dengan isu yang relevan di masyarakat.
2) Penguatan materi dan media KIE yang memiliki visual yang menarik dan mudah dipahami masyarakat awam.
3) Monitoring dan evaluasi secara rutin menggunakan metode *post- test* atau kuis sebagai umpan balik kegiatan.
4) Peningkatan kompetensi petugas KIE seperti kemampuan komunikasi verbal dan pemanfaat media digital.
5) Meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau audiens yang lebih luas, misalnya dengan mengajak *influencer*, tokoh masyarakat sebagai *key person*.

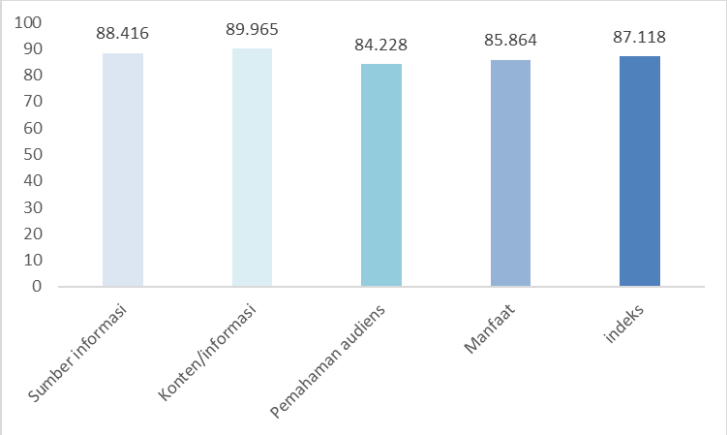
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

1) Berdasarkan komponen indeks kegiatan KIE tatap muka dan media diperoleh hasil sebagai berikut:



Indeks KIE Tatap Muka



Indeks KIE Melalui Media

Pada indeks KIE tatap muka, indeks tertinggi diperoleh dari komponen konten/ informasi dan nilai terkecil dari pemahaman audiens. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penyusunan materi yang dapat lebih dipahami oleh masyarakat awam seperti penjelasan atau mengganti istilah yang rumit dan belum familiar. Sama halnya dengan KIE media, pemahaman audiens memiliki nilai terkecil. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan media edukasi yang menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan media visual yang menarik.

2) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI sebanyak 5 (lima)

titik dengan total peserta 1000 orang dengan topik komoditi Obat, Pangan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam.

3) Implementasi inovasi Selayar Jakarta (*Sharing* Edukasi Lewat Layar untuk Masyarakat Jakarta) sebagai salah satu kegiatan KIE BBPOM di Jakarta yang dilaksanakan secara daring. Selama triwulan II tahun 2025 dilakukan KIE Selayar Jakarta dengan tema "Resistensi Antimikroba: Bahaya Nyata, Saatnya Cegah Bersama" dengan jumlah peserta 40 orang.
4) Penyebaran konten KIE melalui media sosial dan media digital lainnya dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, augmented reality (AR) dan reels melalui implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube) serta Kosidah Jakarta (Kilas Informasi Berfaedah BBPOM di Jakarta) yang berisi tips-tips praktis Obat dan Makanan. Selama triwulan II tahun 2025 telah dilakukan publikasi konten melalui media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan Youtube) sebanyak 657 konten dengan berbagai topik, seperti Obat, Kosmetik, Pangan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Umum.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,27	100,24%	2.177.218.000	755.568.556	34,70	**2,89**	**1,89**	**75%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 1,89 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran "Tidak Efisien". Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

dapat ditingkatkan pada triwulan mendatang dengan melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya dan pelaksanaan kegiatan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja, Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja komunikasi informasi dan edukasi unit kerja serta *stakeholder* termasuk masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

15. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%	Baik	

a) Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
b) Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

c) intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.

d) Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekola
Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

e) Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan

f) Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
   1. Jika Kab/Kota banyak maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
   2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

g) Tahapan kegiatan sebagai berikut:
   1. Sekolah Full Intervensi
      a) Advokasi lintas sektor keamanan pangan
      b) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
      c) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
      d) Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah
      e) Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan
   2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
5	Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)
Total Skor		100%	

Pada triwulan II realisasi tahapan intervensi sebesar 70% dengan terlaksananya tahapan Advokasi Lintas Sektor (25%), Sosialisasi Keamanan Pangan (20%) dan Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (25%). Dengan realisasi ini diperoleh capaian kinerja sebesar 100%, kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	20%	20%	100%
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%

Pada triwulan II tahun 2025 telah tercapai presentasi tahapan sebesar 70%, apabila dibandingkan dengan triwulan I pelaksanaan intervensi sudah berjalan dan akan selesai pada triwulan-triwulan berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	70%	N/A	N/A

Target Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 adalah 15 sekolah. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Hingga triwulan II tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan total pembobotan 70%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II tahun 2025 disebabkan telah terbentuk komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk sekolah-sekolah intervensi dengan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan untuk sekolah SD/SMP/SMA/SMK dan Kementerian Agama Wilayah Jakarta Timur untuk madrasah MI/MTs/MA. Delapan Sekolah/ Madrasah yang akan mengikuti seluruh tahapan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman yaitu SDN Kayumanis 01, SDN Pulogebang 07, SMPN 255, SMAN 28, SMKN 52, MIN 21, MTsN 21, dan MAN 2 Jakarta. Kemudian telah terlaksana sosialisasi keamanan pangan serta bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah sesuai dengan perencanaan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1) Penguatan dukungan dan komitmen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan intervensi. Dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Sekolah / Madrasah intervensi. Komitmen ini telah ditandai dan dimulai saat Audiensi dan Advokasi Lintas Sektor dengan adanya penandatanganan komitmen bersama.
2) Peningkatan efektivitas pelaksanaan intervensi dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kader keamanan pangan sekolah sebagai pelaksana program keamanan pangan di sekolah.
3) Optimalisasi penggunaan sumber daya dalam hal ini tim dan kader keamanan pangan sekolah yaitu dengan memanfaatkan platform digital untuk pelaporan, monitoring, dan komunikasi antar sekolah dan instansi terkait.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini antara lain Sosialisasi Keamanan Pangan (20%) dan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Sekolah (25%). Sosialisasi keamanan pangan ini diikuti oleh kepala sekolah, guru dan peserta didik dari 230 sekolah/madrasah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70,00 %	70,00 %	100,00	86.280.000	56.312.000	65,27	**1,53**	**0,53**	**92%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,53 dengan capaian tingkat efisiensi 92%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa dengan sumber daya anggaran yang telah disediakan digunakan secara efisien guna memperoleh *output* kegiatan yang optimal yaitu dengan cara memanfaatkan sistem informasi digital dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja program Prioritas Nasional unit kerja serta stakeholder terkait termasuk komunitas sekolah sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

16. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%	Baik	

a) Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan

dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b) Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

c) Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

d) Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September -Oktober

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
4.	Monev	20%	Juli **atau** November
5.	Pengawalan	10%	Februari – November
Total Skor		100%	

Pada triwulan II realisasi tahapan intervensi sebesar 70% dengan terlaksananya tahapan Advokasi Lintas Sektor (25%), Pelatihan Kader (25%), dan Bimtek Komunitas (20%). Dengan realisasi ini diperoleh capaian kinerja sebesar 100%, kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	30%	30%	100%
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%

Pada triwulan II tahun 2025 telah tercapai presentasi tahapan sebesar 70%, apabila dibandingkan dengan triwulan I pelaksanaan intervensi sudah berjalan dan akan selesai pada triwulan-triwulan berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	5	70%	N/A	N/A

Target Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 adalah 5 desa/ kelurahan. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Hingga triwulan II tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Pelatihan Kader, dan Bimtek Komunitas dengan total pembobotan 70%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya target kinerja program intervensi Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II tahun 2025 disebabkan telah terbentuk komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi dengan diawali adanya Audiensi dan Advokasi dengan *stakeholder* dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi yang telah menunjuk kelurahan intervensi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan, telah dibentuk forum komunikasi yang melibatkan Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan, yang berfungsi memudahkan koordinasi dan monitoring selama pelaksanaan intervensi. Melalui kegiatan pelatihan kader, telah terbentuk sebanyak 15 Kader Keamanan Pangan Kelurahan yang siap menjalankan tugas dan fungsi melakukan KIE keamanan pangan di masyarakat. Selanjutnya, dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) komunitas, telah terbentuk sebanyak 60 komunitas kelurahan yang menjadi sasaran sasaran pendampingan praktik keamanan pangan di kelurahan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, dapat dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1) Pendampingan kader dan komunitas keamanan pangan secara berkelanjutan melalui kegiatan fasilitasi penerapan program keamanan pangan.
2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas kader keamanan pangan dalam melaksanakan pendampingan serta sosialisasi keamanan pangan kepada

komunitas kelurahan melalui bimtek baik secara luring maupun daring dalam kegiatan pengawalan program kelurahan pangan aman.

3) Penguatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam hal ini Pemerintah kota, tim, dan kader keamanan pangan kelurahan terutama dalam penyusunan rencana aksi program keamanan pangan kelurahan serta replikasi program.
4) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan efektivitas kader keamanan pangan dalam melakukan pendampingan/ fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas, termasuk dokumentasi hasil temuan dan tindak lanjut.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini antara lain kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas yang bertujuan membangun kader dan komunitas kelurahan sebagai agen perubahan penerapan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari di wilayahnya masing-masing. Sebagai hasil kegiatan telah terbentuk sebanyak 15 kader dan 60 komunitas keamanan pangan kelurahan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah desa pangan aman	70%	70%	100,00	124.801.000	71.346.000	57,17	**1,75**	**0,75**	**90%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,75 dengan capaian tingkat efisiensi 90%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa dengan sumber daya anggaran yang telah disediakan digunakan secara efisien guna memperoleh *output* kegiatan yang optimal yaitu dengan cara memanfaatkan

sistem informasi digital dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja program Prioritas Nasional unit kerja serta stakeholder terkait lainnya termasuk kader dan komunitas di kelurahan sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

17. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%	Baik	

a) Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

b) Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

c) Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

d) Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

e) Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

f) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

g) Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

h) Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
Total Skor		100%	

Pada triwulan II realisasi tahapan intervensi sebesar 70% dengan telah terlaksananya Forum advokasi (25%), Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%) dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar (20%). Dengan realisasi ini diperoleh capaian kinerja sebesar 100%, kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	25%	25%	100%
TW II Tahun 2025	70%	70%	100%

Pada triwulan II tahun 2025 telah tercapai presentasi tahapan sebesar 70%, apabila dibandingkan dengan triwulan I pelaksanaan intervensi sudah berjalan dan akan selesai pada triwulan-triwulan berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70%	N/A	N/A

Target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2025 adalah 1 pasar. Realisasi triwulan dihitung berdasarkan persentase tahapan kegiatan. Pada triwulan II tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%), Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%) dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar (20%) dengan total capaian sebesar 70%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target kinerja program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada triwulan II tahun 2025 berhasil tercapai. Hal ini ditunjang oleh terbentuknya komitmen pelaksanaan kegiatan intervensi yang diawali dengan kegiatan audiensi dan advokasi bersama stakeholder, khususnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai lokus intervensi.

Sebelum pelaksanaan intervensi, telah pula dilakukan survei pasar dengan berkoordinasi bersama Perumda Pasar Jaya untuk menentukan satu pasar yang menjadi lokasi intervensi, yaitu Pasar Ciracas, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Cijantung. Di masing-masing pasar tersebut, telah terbentuk komunitas pasar yang menjadi sasaran intervensi, yang terdiri atas petugas dan pengelola pasar, pedagang, pengunjung, serta perwakilan asosiasi pasar. Berdasarkan hasil survei, ditetapkan pasar Ciracas sebagai lokus intervensi.

Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi turut memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan di lingkungan pasar.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan kinerja di masa mendatang meliputi:

1) Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, dalam hal ini meliputi Perumda Pasar Jaya dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur guna mendukung keberlanjutan intervensi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung keamanan pangan di pasar.
2) Penguatan komunitas pasar melalui pemberian sosialisasi atau bimbingan lanjutan serta fasilitasi bagi komunitas pasar (pedagang, pengelola, pengunjung, dan asosiasi pasar).
3) Optimalisasi penggunaan media sosial dan edukasi digital dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas konten edukatif di media sosial untuk

menjangkau masyarakat luas serta menumbuhkan kesadaran pentingnya keamanan pangan di lingkungan pasar.

4) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan efektivitas komunitas pasar dalam menjaga keamanan pangan, termasuk dokumentasi hasil temuan dan tindak lanjut.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada triwulan II tahun 2025 didukung oleh berbagai program strategis. Di antaranya adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan kepada Komunitas Pasar dan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang ditujukan kepada seluruh unsur komunitas pasar.

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan peran aktif komunitas pasar dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Melalui pendekatan edukatif yang partisipatif, komunitas pasar didorong untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih, higienis, dan bebas dari bahan berbahaya pada pangan yang dijual.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00	30.690.000	19.224.510	62,64	**1,60**	**0,60**	**92%**	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,60 dengan capaian tingkat efisiensi 92%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa dengan sumber daya anggaran yang telah disediakan digunakan secara efisien guna memperoleh *output* kegiatan yang optimal yaitu dengan cara memanfaatkan

sistem informasi digital dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja terkait jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ini memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan serta mengoptimalkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja program Prioritas Nasional unit kerja serta *stakeholder* terkait lainnya termasuk komunitas pasar sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Sasaran Strategis 05

Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

18. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	37,15%	40,79%	109,81%	Sangat Baik	

a) Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

   - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
   - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

   b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c) Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan:

a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;

2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);

3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai *pre post test* dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
TW I Tahun 2025	14,86%	14,86%	100%	Baik
TW II Tahun 2025	37,15%	40,79%	109,81%	Sangat Baik

Pada triwulan II tahun 2025, capaian kinerja meningkat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025, hal tersebut dikarenakan pada triwulan II beberapa sarana telah memenuhi persyaratan pengajuan IP CPPOB dan mendapat sertifikat Izin Penerapan CPPOB serta telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk seluruh peserta program pendampingan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81,70%	40,79%	49,93%	Perlu Usaha Keras

Pada TW II target sudah tercapai namun dibanding target total/ akumulasi tahun 2025 perlu adanya usaha lebih lanjut sehingga capaian tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Program pendampingan secara intensif, pada tanggal 22 Januari 2025 telah diselenggarakan advokasi lintas sektor dengan beberapa dinas pengampu, akademisi, organisasi pelaku usaha serta organisasi masyarakat untuk mendapatkan usulan sarana yang dapat difasilitasi oleh Balai Besar POM di Jakarta







Gambar 1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Pengawasan dan Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

2. Balai Besar POM di Jakarta memiliki akses yang dibuka secara umum yang diinformasikan baik secara langsung maupun melalui media sosial bagi masyarakat untuk mendaftarkan dirinya mengikuti program pendampingan melalui inovasi Jak Fast



Gambar 2. Publikasi Pendaftaran Pendampingan melalui Inovasi JakFast

3. Telah dilakukan visitasi baik secara daring dilanjutkan dengan visitasi luring pada rentang bulan Februari hingga Maret terhadap calon UMKM yang akan diikutsertakan pada program fasilitasi untuk pemastian sarana dan prasarana sebelum dilakukan penetapan UMKM yang akan ikut program fasilitasi





Gambar 3. Pelaksanaan Visitasi Sarana Produksi Pangan Olahan

4. Terselenggaranya Bimtek CPPOB tepat waktu untuk Fasilitasi Kolaborasi di lima wilayah administrasi dan untuk Fasilitasi Mandiri dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tanggal	Wilayah	Jumlah Peserta Rekomendasi Balai
14, 15 dan 16 April 2025	Fasilitasi Mandiri	13
17, 18 dan 20 Maret 2025	Jakarta Selatan	19
10, 11, 13 Maret 2025	Jakarta Timur	22
17, 18 dan 20 Maret 2025	Jakarta Utara	22
22, 23 dan 25 April 2025	Jakarta Barat	24
06, 07 dan 09 Mei 2025	Jakarta Pusat	22




BADAN POM
Komitmen untuk Mengikuti Kegiatan
Kolaborasi Fasilitasi UMKM Pangan Olahan
Wilayah Jakarta Pusat Tahun 2025
UMKM Jawara


Komitmen untuk Mengikuti Kegiatan
Pangan Olahan
Jakarta Pusat Tahun 2025
UMKM Jawara
bpom_jakarta@pom.go.id
sertifikasi.bbpomjkt@pom.go.id




BADAN POM
BerAKHLAK
UMKM
Jawara
- 16 APR
1500533





Gambar 4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

5. Terselenggaranya Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II terkait penggunaan BTP, ketentuan label dan informasi nilai gizi, kategori pangan dan paramater uji serta tata cara registrasi produk di sistem E-Reg RBA, berikut pelaksanaan Bimtek Tahap II pada triwulan II:

Tanggal	Wilayah
11 dan 12 Juni 2025	Jakarta Selatan
11 dan 12 Juni 2025	Jakarta Timur
17 dan 18 Juni 2025	Jakarta Utara
16 dan 17 Juni 2025	Jakarta Barat




SIMULASI
REGISTRASI
PRODUK


TEMPAT
KUMPUL
KREATIF
JAKARTA TIMUR





Gambar 5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahap 2 terkait Label Pangan Olahan, Penggunaan BTP, Informasi Nilai Gizi, dan Simulasi Registrasi Produk

6. Telah terlaksananya program “ SAPA KAMPUS “ sebagai bentuk pemberdayaan mahasiswa dalam mendampingi pelaku usaha UMKM Pangan Olahan dalam menadapatkan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik pada bulai April sd. Juni 2025.





Gambar 6. Pelaksanaan Program SAPA KAMPUS

7. Sejak tahun 2022 BBPOM di Jakarta melakukan kolaborasi untuk fasilitasi UMKM pangan olahan dengan Dinas PPKUKM dengan melibatkan para pendamping kewirusahaan yaitu Jak Officer dari Dinas PPKUKM yang telah dilatih pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. Akan dilaksanakan Bimtek tahap kedua untuk wilayah Jakarta Pusat dan Fasilitasi Mandiri pada TW 3.
2. Mengintensifkan lagi pendampingan bagi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan terkait sertifikasi komoditi pangan, obat tradisional dan kosmetik.
3. Meningkatkan sosialisasi standar pelayanan sertifikasi komoditi pangan, obat tradisional dan kosmetik melalui media sosial.
4. Meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi melalui berbagai macam metode seperti mengikuti bimbingan teknis, pembelajaran mandiri, maupun *sharing session*.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan berskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.
2. Balai Besar POM di Jakarta mempunyai inovasi UMKM Jaw@ra untuk mengakomodir Inovasi dalam membantu UMKM untuk mendapatkan Ijin Penerapan CPPOB dan Ijin Edar MD baik yang dilakukan internal maupun berkolaborasi dengan Linsek terkait yang dibuat terstruktur pertahap dan

dilakukan secara besar - besaran. Inovasi ini berhasil menjadi Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024.

3. Melakukan pelayanan prima berupa Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Informasi Keliling (Kerling) yang dimanfaatkan untuk kegiatan desk CPPOB dalam rangka percepatan penyelelesaian perbaikan dokumen penerbitan Izin Penerapan CPPOB
4. Selain dilakukan program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM juga dilakukan fasilitasi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dari BBPOM di Jakarta. Fasilitasi ini untuk menjangkau pelaku usaha di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional.
5. Untuk menilai komitmen pelaku usaha produksi pangan peserta fasilitasi yang telah terbit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dilakukan audit dalam rangka verifikasi terkait pelaksanaan dan konsistensi pelaksanaan prosedur.
6. Adanya fasilitas untuk pengujian produk di laboratorium BBPOM di Jakarta bagi UMKM yang difasilitasi serta adanya kebijakan potongan 50 (lima puluh) persen untuk biaya registrasi produk dari Badan POM.
7. Adanya kolaborasi dengan Perguruan Tinggi salah satu nya adalah Universitas Pancasila dalam rangka pendampingan UMKM Obat Bahan Alam.
8. Adanya program SAPA KAMPUS yang merupakan Inovasi dari Badan POM dalam pemberdayaan komunitas intelektual dalam hal ini mahasiswa sebagai fasilitator keamanan pangan yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi bidang kemanana pangan dan dapat melakukan fasilitasi keamanan pangan di UMK Pangan Olahan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Salah satu sumberdaya yang digunakan untuk mencapai target kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah anggaran.

Analisis efisiensi penggunaaan anggaran target kinerja tersebut ditampilkan pada tabel berikut

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37.15	40.79	109.81%	51.418.000	23.466.625	45.64%	**2.41**	**1.41**	**80%**	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 1.41 dengan capaian tingkat efisiensi 80% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input lain dengan dukungan data yang lebih memadai

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

1. Evaluasi kinerja UPT terkait pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.
2. Perbaikan kinerja secara berkesinambungan pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan target UMKM yang memperoleh sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan

Sasaran Strategis 06

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah kerja BBPOM di Jakarta

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	53	55,38	104,50	Sangat Baik	

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

b. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot

perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	45	49,38	109,73
TW II Tahun 2025	53	55,38	104,50

Pada triwulan II tahun 2025 capaian target menurun dibanding Triwulan 1 tahun 2025, tetapi secara umum capaian masih kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	70	55,38	79,11 	Akan tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja Tim Penindakan BBPOM di Jakarta menunjukkan penurunan sebesar 5,23 % dari triwulan sebelumnya, tetapi masih masuk kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja selama TW 2 tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Capaian ini merupakan hasil dari kerja tim dan implementasi atas rekomendasi perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.

Analisa terhadap keberhasilan Tim Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

a. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif.

   Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan spreadsheet yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni matriks pemantauan penyelesaian perkara. Spreadsheet ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini.

   Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

   Kinerja Tim Penindakan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai apabila tahapan kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif maka Ketua Tim Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh Tim Penindakan.

   Selain itu diadakan juga dialog kinerja setiap periode bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Jakarta sehingga progres penyelesaian perkara dan kegiatan penindakan lainnya dapat dipantau dengan optimal.

b. Koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara tunggakan yang mempengaruhi indikator kinerja TW 2 tahun 2025.

Tindak pidana yang ditangani PPNS BBPOM di Jakarta merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait obat dan makanan. Perlu adanya kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk persamaan persepsi dan tafsir dalam penyelesaian perkara. Pencapaian kinerja TW 2 tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

c. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Tim Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2025 ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap distribusi kosmetik ilegal, obat tradisional mengandung BKO, peredaran pangan olahan impor ilegal, dan juga peredaran obat-obat tertentu secara bebas dilakukan di sarana tanpa kewenangan serta personel tanpa kewenangan dan keahlian.

Kerja sama juga dijalin dengan Bea Cukai Pasar Baru dalam upaya cegah tangkal terhadap masuknya produk obat dan makanan ilegal dari luar negeri yang disalahgunakan dari tujuan pemakaian pribadi menjadi tujuan komersial.

Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan jajaran penyidik di wilayah kerja Polda Metro Jaya, mulai dari Polsek hingga Polres. Penggalangan juga dilakukan terhadap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan

jajarannya, Satpol PP, serta satuan kerja lainnya. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

d. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal

Sepanjang tahun 2025 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sehubungan dengan belum tercapainya kegiatan penindakan yang menghasilkan perkara di TW 2 tahun 2025, upaya perbaikan/rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Intensifikasi kegiatan patroli siber untuk mencari informasi target yang akan dilanjutkan dengan kegiatan intelijen.
2. Intensifikasi kegiatan intelijen dalam menetapkan target A1.
3. Koordinasi lintas sektor dalam kerjasama pendalaman informasi hingga didapatkan target A1.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja Tim Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni cegah tangkal siber, intelijen dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tim Penindakan.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Capaian yang maksimal juga didukung oleh semakin efektifnya kerja sama dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut dari Kejati DKI Jakarta. Program yang dijalankan adalah ekspose perkara antara PPNS dengan Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut sehingga berkas perkara yang ditangani PPNS bisa segera dinyatakan lengkap dan bisa dilimpahkan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	53,00	55,38	104,49%	392.564.000	161.305.939	41,09 %	**2,54**	**1,54**	**80%**	Tidak Efisien

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja TW 2 tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di TW berikutnya, yakni:

- Sebagai bahan reviu dalam memetakan potensi kejahatan obat dan makanan yang diprediksi akan terjadi di TW 3 hingga 4 tahun 2025. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan *Plan of Action* tim penindakan dalam mencapai target.

- Pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja secara efektif. Dengan penerapan strategi perkuatan kerja sama dengan CJS maka alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut akan di*review* sehingga bisa digunakan dengan efektif dan efisien.
- Pemanfaatan sumber daya dalam melakukan fungsi intelijen, siber, dan cegah tangkal secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendata

Sasaran Strategis 07

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta

20. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	50	45,385	91,67	Baik	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan

Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
3. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan
4. Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:
    a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
    b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
    c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis

kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW I Tahun 2025	50	50	100
TW II Tahun 2025	50	45,385	91,67

Pada triwulan 2 tahun 2025 capaian mengalami penurunan sebesar 8,33 % tetapi masih masuk kategori Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	45,385	91,67 	Akan Tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang diselesaikan sesuai standar merupakan IKU baru di tahun 2025 dimana di tahun sebelumnya tidak ada.

Capaian target di TW 2 tahun 2025 belum memenuhi target yang ditetapkan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut diantaranya :

Laporan profiling siber pada bulan April tidak dilaporkan tepat waktu di tanggal 24 setiap bulannya melalui website inawebcrawler.id.

Hal mempengaruhi capaian di bulan berikutnya.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, ditempuh upaya sama dengan faktor yang mempengarui keberhasilan capaian IKU ini di TW 1 tahun 2025 sehingga realisasi berada pada rentang persentase sebesar 100 hingga 120%. Hal ini terutama dengan melaporkan laporan profiling siber tepat waktu maksimal di tanggal 24 setiap bulannya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja IKU ditunjang dari 2 (dua) kegiatan yakni cegah tangkal dan siber. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui monitoring dan evaluasi hasil patroli siber dan data rawan baik secara luring maupun daring dengan Direktorat Siber dan Direktorat Cegah Tangkal di Kedeputian Bidang Penindakan juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian target IKU.

Tim Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang

terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

Dilakukan juga monitoring pelaporan profiling sebelum tanggal 24 agar memastikan bahwa laporan profiling sudah dilaporkan tepat waktu.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	45,84	91,68%	137.996.000	137.995.294	100,00 %	**0,92**	**-0,08**	**75%**	Tidak Efisien

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja TW 2 tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai informasi untuk menyusun strategi di TW berikutnya, yakni:

- Sebagai bahan reviu dalam memetakan potensi kejahatan obat dan makanan yang diprediksi akan terjadi di TW 3 hingga 4 tahun 2025. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan *Plan of Action* tim penindakan dalam mencapai target.
- Pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja secara efektif. Dengan penerapan strategi perkuatan kerja sama dengan CJS maka alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut akan di*review* sehingga bisa digunakan dengan efektif dan efisien.
- Pemanfaatan sumber daya dalam melakukan fungsi intelijen, siber, dan cegah tangkal secara cermat dan tepat sehingga dapat mengatasi kendala dan tantangan yang masih akan dihadapi di tahun mendatang.

Sasaran Strategis 08

Layanan Publik BBPOM di Jakarta yang Prima

21. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, tidak ada target dan realisasi kinerja.

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

   1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
   2) Profesionalitas SDM (25%);
   3) Sarana Prasarana (18%);
   4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
   5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
   6) Inovasi (12%).

b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

e. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW I dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya dikarenakan realisasi di akhir tahun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	4,70	-	-	-

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Keberhasilan aspek kebijakan pelayanan didukung oleh implementasi kebijakan yang selaras dengan *Permen PANRB No. 5/2023*, seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur dan transparan. Adanya koordinasi antara UPT BBPOM di Jakarta Jakarta dengan Biro Hukum dan Organisasi BPOM juga memperkuat konsistensi pelaksanaan regulasi. Keberhasilan aspek profesionalitas SDM, Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berkala berhasil meningkatkan responsivitas dan kualitas interaksi dengan masyarakat. Program pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam mencapai skor tertinggi pada aspek ini. Perbaikan fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket pelayanan, dan peralatan pendukung di UPT Jakarta turut meningkatkan kenyamanan layanan. Namun, beberapa titik layanan masih memerlukan modernisasi alat untuk menunjang efisiensi.

Analisis Kegagalan/Penurunan Kinerja

kegagalan kinerja dapat disebabkan oleh terbatasnya integrasi sistem digital antarmuka aplikasi pelayanan yang kurang user-friendly mengurangi partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan online. Penurunan kinerja juga dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi saluran pengaduan juga menyebabkan masyarakat kurang aware terhadap layanan. Keterbatasan anggaran dan fokus pada kegiatan rutin menyebabkan inovasi pelayanan belum optimal. Contohnya,

belum ada pengembangan fitur digital berbasis AI atau kolaborasi dengan ekosistem startup untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.

e. Upaya Perbaikan/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Untuk meningkatkan Indeks Pelayanan Publik BBPOM Jakarta, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sistem informasi pelayanan publik melalui pengembangan platform terpadu dengan fitur *single sign-on* dan database terpusat akan menyelesaikan masalah fragmentasi sistem. Peluncuran aplikasi mobile dengan notifikasi *real-time* dan pelacakan pengaduan akan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kedua, layanan pengaduan perlu direvitalisasi dengan menerapkan sistem ticketing otomatis yang terintegrasi dengan dashboard pemantauan, disertai sosialisasi intensif melalui kanal digital dan kemitraan dengan komunitas lokal. Ketiga, inovasi pelayanan harus diakselerasi dengan membentuk tim khusus beranggaran mandiri yang fokus mengembangkan solusi seperti chatbot layanan publik dan sistem manajemen antrian digital, didukung kolaborasi dengan akademisi dan pelaku startup. Keempat, optimalisasi sarana prasarana melalui modernisasi perangkat layanan (seperti kiosk mandiri) dan peningkatan infrastruktur jaringan perlu dilakukan secara bertahap di seluruh unit pelayanan. Terakhir, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan literasi digital dan penyusunan KPI berbasis outcome akan memperkuat profesionalisme petugas. Implementasi menyeluruh ini memerlukan koordinasi lintas unit dan evaluasi triwulanan untuk memastikan capaian target sesuai Permen PANRB No. 5/2023.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan BBPOM Jakarta dalam rangka meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dapat beragam. Pertama, pada

aspek kebijakan pelayanan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur dan sosialisasi regulasi secara intensif dapat meningkatkan konsistensi layanan. Kedua, program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi akan meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan, dengan indikasi peningkatan skor aspek profesionalitas SDM. Ketiga, perbaikan sarana prasarana fisik seperti penataan ruang pelayanan dan penambahan peralatan pendukung turut berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan.

g. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
	T	R	%	T	R	%				
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	#DIV/0!	194.295.000	86.515.000	44,53 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak efisien

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan BPOM berdasarkan enam aspek (Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi) nantinya dapat dimanfaatkan dalam:

- Evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terkait efektivitas dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perbaikan kinerja pada periode yang akan datang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi sarana prasarana, efektivitas sistem informasi, mekanisme konsultasi dan pengaduan, serta implementasi inovasi pelayanan publik sesuai dengan arahan dan pedoman dari Kementerian PANRB.

Sasaran Strategis 09

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

22. NILAI PEMBANGUNAN ZI BBPOM DI JAKARTA

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW IITahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

a) Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

b) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c) Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

- Baseline Data sebagai Dasar Perhitungan

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

23. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;

(2) Pengukuran Kinerja;

(3) Pelaporan Kinerja;

(4) Evaluasi Kinerja Internal;

(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)

3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)

5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

7. Capaian Output (bobot 25%)

8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

f. Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	**Kategori**	**Konversi NIlai**
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

25. Indeks Manajemen Resiko BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan Realisasi dan Target TW II Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
TW II Tahun 2025	-	-	-	-	-

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen

risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.

Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total16

Keterangan:

a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

b. Perbandingan Realisasi dan Target TW II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Periode	Target	Realisasi	Capaian
TW II Tahun 2025	-	-	-

Pada triwulan II tahun 2025, realisasi kinerja belum dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja TW II dengan Target Tahun 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	-	-	-	-

TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	Timeline	Data Dukung
A.	***Perencanaan Kinerja***			
a.1	Memastikan penyajian target RKT sesuai dengan dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra.	*Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan reviu dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja Tahun 2023 sehingga pada saat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun N sudah disahkan maka dokumen RKT sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dokumen RKT bersifat usulan dan selanjutnya, dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024 adalah PK dan RAPK Tahun 2024 dikarenakan RKT Tahun 2024 adalah target yang dirancang pada N-1 hasil kinerja Tahun 2023 dan tidak digunakan kembali saat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sudah disahkan. Adanya perbedaan target antara dokumen RKT 2024 dokumen Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra disebabkan karena RKT Tahun 2024 disusun pada saat N-1 dengan dasar penetapan targetnya adalah realisasi kinerja indikator sampai dengan Tahun 2023.* *Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebanyak 5 indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu: (1) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan, (2) Nilai Pengelolaan Kearsipan, (3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan (5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri*	Desember 2025	1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2024 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 4. Dokumen Renstra BBPOM di Jakarta 2020-2024
B.	***Pengukuran Kinerja***			
b.1	Menyempurnakan SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja dengan mekanisme perubahan data kinerja;	*SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01 ,* *dilakukan revisi untuk mengatur perubahan data kinerja. Terdapat format BA perubahan data dan sampai dengan bulan Mei 2025 belum terdapat rekap perubahan data kinerja pada link berikut: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpC8BSnmNR_-nuP8vwVb046sdT6ooy4NRVEMAjll_sBCSNKA/viewform*	Desember 2025	Dokumen SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja telah disempurnakan dengan mekanisme perubahan data kinerja pada SOP Mikro : POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.7A.01
b.2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	*Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur sesuai dengan dokumen sumber data*	Desember 2025	Dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) Tahun 2024 dan 2025
b.3	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim.	*Penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim sudah selaras,* *mencocokkan data RTL dengan sumber dan dengan membuat matriks sandingan dokumen yang dimaksud*	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja 2. Dokumen Laporan Evaluasi Internal 3. Dokumen Laporan pada monev Simetris E-Performance
C.	***Pelaporan Kinerja***			
c.1	Menyampaikan Laporan Kinerja tahunan secara tepat waktu melalui esr.menpan.go.id;	*Laporan Kinerja tahunan telah dilaporkan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id pada tanggal 26 Februari 2025*	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada web esr.menpan.go.id
c.2	Mempublikasikan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta;	*Sudah dilakukan Publikasi Laporan Kinerja Interim pada Subsite Balai Besar POM di Jakarta*	Desember 2025	Dokumen berupa bukti unggahan Laporan Kinerja pada subsite BBPOM di Jakarta
c.3	Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP	*Laporan Kinerja tahunan telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya pada halaman 75, 82, 89, 97, 103, 112, 119, 125, 134, 140, 146, 151, 158, 163, 168, 173, 178, 185, 190, 195, 201, 206, 212, 227, 234, 240, 251, 257, 263, 269, 276, 282, 287*	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut /RATL	Timeline	Data Dukung
	terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya;			
c.4	Menyusun Laporan Kinerja tahunan dengan menyajikan: 1. Matriks tindak lanjut rekomendasi; 2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja secara memadai;	Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan: 1. Matriks tindak lanjut rekomendasi pada halaman 302-317 2. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja pada halaman 76,84,91,98,104,114,120,127,135,141,146,153,158,164,169,175,180,186,191,196,201,208 ,213,221,228,235,241,252,259,2564,270,277,283,288	Desember 2025	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024
c.5	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: 1. Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja; 2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai.	*Laporan Kinerja Interim TW III telah menyajikan:* *1. Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja halaman 22-28* *2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai halaman 51,57,61,68,70,79, 88,92, 96, 104, 109, 113, 118, 125, 131, 137, 142, 147, 152, 158, 165, 176*	Desember 2025	1. Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024 2. Dokumen Laporan Kinerja Interim Tahun 2024 dan 2025
D.	***Evaluasi Internal***			
d.1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP;	*Terlaksanannya pengembangan kompetensi personil Tim Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP dengan mengikuti e-learning Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024*	Desember 2025	Dibuktikan dengan sertifikat Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
d.2	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan: 1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya; 2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai; 3. Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.	Laporan Evaluasi Internal telah disusun dengan menyajikan: 1. Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya; 2. Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut secara memadai; 3. Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.	Desember 2025	Dokumen Laporan Evaluasi Internal Tahun 2024 dan 2025

3.2 RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
1.	**Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	**Januari**	**0**	**0**	**#DIV/0!**		-	-	-	-	-	-	-	
		Februari	**87**	**70,34**	**80,85**	Pengujian sampel obat dilakukan oleh semua Balai penguji dalam satu Region sesuai penugasan, sehingga penyelesaian pengujian dan pelaporannya melalui SIPT tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh BBPOM Jakarta	Terdapat 1 sampel obat yang terlambat dilaporkan melalui SIPT oleh Balai lain.	Meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		Maret	**87**	**92,24**	**106,02**	Pengujian sampel obat dilakukan oleh semua Balai penguji dalam satu Region sesuai penugasan, sehingga penyelesaian pengujian dan pelaporannya melalui SIPT tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh BBPOM Jakarta	Terdapat 1 sampel obat yang terlambat dilaporkan hasil ujinya melalui SIPT oleh Balai lain.	Meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		April	**87**	**92,19**	**105,97**	1. Error pada saat input penandaan di SIPT dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan melalui SIPT 2. Kemungkinan keterlambatan pelaporan input data sampel dan hasil uji melalui SIPT oleh internal atau Balai lain tetap ada	1. Terdapat error penandaan karena tidak terbaca saat input penandaan pada SIPT, kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman sampel melalui SIPT 2. Tidak ada sampel obat yang terlambat dilaporkan hasil ujinya melalui SIPT	1. Melaporkan kendala input SIPT ke Pusdatin melalui ITSM 2. Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	Kendala input SIPT sudah ditindaklanjuti oleh Pusdatin, input data sampel bulan April dapat dilanjutkan sampai ke pelaporan hasil uji sehingga tidak terjadi keterlambatan pelaporan melalui SIPT	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		Mei	**87**	**94,98**	**109,17**	Tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta	31 Desember 2025	-	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
								memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT			melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat			
		Juni	**87**	**99,45**	**114,31**	Pengujian sampel obat dilakukan oleh semua Balai penguji dalam satu Region sesuai penugasan, sehingga penyelesaian pengujian dan pelaporannya melalui SIPT tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh BBPOM Jakarta	Terdapat beberapa sampel regionalisasi yang terlambat dilaporkan oleh Balai lain. Sebenarnya terjadi di bulan Maret, namun saat itu belum diketahui adanya perubahan timeline dari 20 HK menjadi 15 HK, sehingga baru dicatat di bulan Juni	Meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		Juli	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
		Agustus	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
		September	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
		Oktober	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
		November	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
		Desember	**87**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**									
2.	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTDESO**	**2025**	**28**											
3.	**Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	**Januari**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Februari	**85**	**100**	**117,65**	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan sampling berubah dari target sehingga tidak mencapai target karena target sampel IRTP karena keterbatasan anggaran sampling dan reagen serta pemeliharaan alat laboratorium	Sampling dan uji pangan olahan menyesuaikan dengan kemampuan uji karena efisiensi	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Proses
		Maret	**85**	**100**	**117,65**	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan sampling berubah dari target sehingga tidak mencapai target karena target sampel IRTP karena keterbatasan anggaran sampling dan reagen serta pemeliharaan alat laboratorium	Sampling dan uji pangan olahan menyesuaikan dengan kemampuan uji karena efisiensi	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025	Realiasai sampling masih belum sesuai target karena masih berproses percepatan sampling dan uji	Proses
		April	**85**	**90**	**105,88**	sampling dan renlak april baru dilaksanakan di akhir april	sampling dan renlak april baru dilaksanakan di akhir april	Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025		Percepatan sampling dan pengujian serta pengadaan reagen karena target sampel sesuai dengan target awal tahun sebelum efisiensi	31 Desember 2025	Realiasai sampling masih belum sesuai target karena masih berproses percepatan sampling dan uji	Proses
		Mei	**85**	**96,45**	**113,47**	tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		Juni	**85**	**98,72**	**116,14**	tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT						
		Juli	**85**		**0,00**									
		Agustus	**85**		**0,00**									
		Septem ber	**85**		**0,00**									
		Oktober	**85**		**0,00**									

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		November	**85**		**0,00**									
		Desember	**85**		**0,00**									
4.	**Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**	**Januari**	**100**	**0**	**0,00**									
		Februari	**100**	**0**	**0,00**									
		Maret	**100**	**0**	**0,00**									
		April	**100**	**0**	**0,00**	Laboratorium menerima 1 sampel KLB Keracunan Pangan pada tanggal 30 April 2025 pukul 15.00 WIB. Parameter uji meliputi parameter uji kimia dan mikro sehingga penyelesaian pengujiannya membutuhkan waktu.								
		Mei	**100**	**100,00**	**100,00**	tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	TW II	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	TW II	-	Selesai
		Juni	**100**	**0**	**0,00**	tidak ada kendala dikarenakan tidak ada sampel KLB		Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT						
		Juli	**100**		**0,00**									
		Agustus	**100**		**0,00**									
		September	**100**		**0,00**									
		Oktober	**100**		**0,00**									
		November	**100**		**0,00**									
		Desember	**100**		**0,00**									

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
5.	**Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	**Januari**	**0**	**0**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Februari	**85**	**96,21**	**113,19**	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan sampling berubah dari target sehingga tidak mencapai target karena terdapat aturan bahwa sampling IRTP harus selesai di Twiwulan 1 sedangkan terdapat keterbatasan anggaran sampling dan reagen serta pemeliharaan alat laboratorium	Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Penyelesaian samping IRTP pada triwulan 2	31 Desember 2025		Penyelesaian samping IRTP pada triwulan 2		Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Proses
		Maret	**85**	**96,21**	**113,19**	Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan sampling berubah dari target sehingga tidak mencapai target karena terdapat aturan bahwa sampling IRTP harus selesai di Twiwulan 1 sedangkan terdapat keterbatasan anggaran sampling dan reagen serta pemeliharaan alat laboratorium	Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Penyelesaian samping IRTP pada triwulan 2	31 Desember 2025		Penyelesaian samping IRTP pada triwulan 2		Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	Proses
		April	**85**	**84,83**	**99,80**	N/A	Baru sebagian sampel yang disampling di triwulan 1 karena efisiensi anggaran sedangkan terdapat aturan pada pedoman sampling bahwa sampling PIRT pada periode TW1	N/A	N/A	Sampling sampel IRTP telah diselesaikan pada bulan April 2025	N/A	N/A	Sampling sampel IRTP telah diselesaikan pada bulan April 2025	Selesai
		Mei	**85**	**96,21**	**113,18**	Tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan pengujian dan pelaporan melalui SIPT	31 Desember 2025	-	Meningkatkan koordinasi di internal Balai dan dengan Balai lain serta melakukan pemantauan pelaksanaan pengujian dan pelaporan melalui SIPT secara lebih ketat	31 Desember 2025	-	Proses
		Juni	**85**	**96,21**	**113,18**	tidak ada kendala	-	Tetap meningkatkan koordinasi di internal Balai maupun dengan Balai lain serta memperketat pemantauan						

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
								pengujian dan pelaporan melalui SIPT						
		Juli	**85**		**0,00**									
		Agustus	**85**		**0,00**									
		Septem ber	**85**		**0,00**									
		Oktober	**85**		**0,00**									
		Novemb er	**85**		**0,00**									
		Desemb er	**85**		**0,00**									
6.	**Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**	**Januari**	**75,5**	**37,5**	**49,67**	Tindak lanjut oleh pelaku usaha masih sedikit karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan perlu ada upaya untuk mendorong pelaku usaha segera menyelesaikan tindakan perbaikan		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon	31 Desember 2025		meningkatkan jumlah respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan melakukan pemanggilan sarana yang belum merespon tindak lanjut		Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Proses
		Februari	**80,2**	**36,74**	**45,81**	Tindak lanjut oleh pelaku usaha masih sedikit karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan perlu ada upaya untuk mendorong pelaku usaha segera menyelesaikan tindakan perbaikan	Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon	31 Desember 2025		meningkatkan jumlah respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan melakukan pemanggilan sarana yang belum merespon tindak lanjut			Proses
		Maret	**92,64**	**83,2**	**89,81**	Tindak lanjut oleh pelaku usaha masih sedikit karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan perlu ada upaya untuk mendorong pelaku usaha segera menyelesaikan tindakan perbaikan		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan respon tindak lanjut dengan menyampaikan konsekuensi bila tidak memberikan respon	31 Desember 2025		meningkatkan jumlah respon tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan melakukan pemanggilan sarana yang belum merespon tindak lanjut		Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Proses
		April	**92,98**	**83,33**	**89,62**			Melakukan evaluasi data dan memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan	31 Desember 2025		Semua hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan stakeholder		Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Proses
		Mei	**93**	**85,00**	**91,40**			Melakukan evaluasi data dan memberikan reminder kepada sarana yang belum melakukan perbaikan	31 Desember 2025		Semua hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan stakeholder		Jumlah respon sarana terhadap tindak lanjut yang diberikan masih sedikit	Proses
		Juni	**93,77**	**93,81**	**100,04**	Tindaklanjut oleh pelaku usaha lama karena ada beberapa faktor yang memerlukan waktu untuk	Jumlah respon sudah mulai banyak tetapi tidak sebanding	Melakukan revisi sistem penghitungan dan membuat usulan revisi target karen	31 Desember 2025		Membuat evaluasi sistem reminder kepada pelaku usaha Revisi target		Dengan dilakukan perubahan cara penghitungan persentase	

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						ditindaklanjuti Terjadi juga kesalahan perhitungan penyebut, harusnya yang dihitung adalah yang telah masuk timeline untuk tindaklanjut	denganbanyaknya rekomendasi yang diterbitkan	berdasarkan hasil evakluasi untuk tahun 2025 BBPOM Jakarta hanya mampu dengtan target 86 %					semakin meningkat, tetapi masih berproses sampai akhir tahun	
		Juli	**93,77**		**0,00**									
		Agustus	**94**		**0,00**									
		Septem ber	**95,5**		**0,00**									
		Oktober	**96**		**0,00**									
		Novemb er	**100**		**0,00**									
		Desemb er	**100**		**0,00**									
7.	**Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	**Januari**	**92**	**92**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk	31 Desember 2025		melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Februari	**92**	**92**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk	31 Desember 2025		melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Maret	**92**	**92**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk	31 Desember 2025		melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		April	**92**	**85,56**	**93,00**	Dalam masa penyesuaian terhadap relaksasi anggaran		pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	31 Desember 2025					
		Mei	**92**	**94,31**	**102,51**	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang		pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun	31 Desember 2025					

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
						telah disesusun sebelumnya								
		Juni	**92**	**95,50**	**103,81**	Tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya		pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun						
		Juli	**92**		**0,00**									
		Agustus	**92**		**0,00**									
		Septem ber	**92**		**0,00**									
		Oktober	**92**		**0,00**									
		Novemb er	**92**		**0,00**									
		Desemb er	**92**		**0,00**									
8.	**Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	**Januari**	**80**	**80**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Februari	**80**	**80**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Maret	**80**	**80**	**100,00**	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran		pelaksanaan inspeksi didasarkan atas tingkat risiko baik terhadap sarana maupun terhadap produk			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		April	**80**	**93,33**	**116,66**	Capaian melebihi 100% dikarenakan saat pemeriksaan 1 sarana yang diperiksa memiliki 2 nomor izin edar yaitu MD dan PIRT		pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun serta penyesuaian capaian di triwulan berikutnya			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Mei	80	95,65	119,57	Capaian melebihi 100% dikarenakan saat pemeriksaan 1 sarana yang diperiksa memiliki 2 nomor izin edar yaitu MD dan PIRT		pelaksanaan inspeksi disesuaikan dengan rencana yang telah disusun serta penyesuaian capaian di triwulan berikutnya			melakukan pemeriksaan sarana dari data tingkat risiko yang ada		pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online] serta penyesuaian realisasi di TW selanjutnya	Proses
		Juni	80	84,62	105,77	tidak ada		sudah sesuai target						
		Juli	80		0,00									
		Agustus	80		0,00									
		Septem ber	80		0,00									
		Oktober	80		0,00									
		Novemb er	80		0,00									
		Desemb er	80		0,00									
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	95,52	95,52	100,00									
		Februari	95,52	95,52	100,00									
		Maret	95,52	95,52	100,00	Manual indikator belum fix sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan capaian indikator								
		April	95,52	95,52	100,00	Limit waktu pelaporan terlalu dekat dengan waktu sosialisasi manual dan kertas kerja indikator	Manual indikator belum fix sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan capaian indikator	Manual dan kertas kerja dari unit pusat disosialisasikan sejak awal tahun untuk memperlancar pelaporan upt	31 Des 2025					Proses
		Mei	95,52	95,52	100,00	Terdapat banyak permintaan pendampingan dari pusat dalam rangka pelatihan dan banyaknya kasus sehingga waktu pemeriksaan menjadi lebih lama		Perbaikan perencanaan pemeriksaan bulanan untuk mencapai target kesesuaian pelaporan Dan tindak lanjut	31 Desember 2025					Proses
		Juni	95,52	99,57	104,24									
		Juli	95,52		0,00									
		Agustus	95,52		0,00									
		Septem ber	95,52		0,00									
		Oktober	95,52		0,00									

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Novemb er	95,52		0,00									
		Desemb er	95,52		0,00									
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	75	96	128,00									
		Februari	75	95,33	127,11									
		Maret	75	95,33	127,11									
		April	75	98,66	131,55	-Adanya pengaduan dan tindak lanjut kasus sehngga terdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan renlak -Timeline pelaporan berdasarkan tanggal pemeriksaan sehingga menyulitkan monitoring dan evaluasi	-Pemeriksaan sarana beberapa tidak sesuai dengan renlak terdapat -Pelaporan SIPT terlambat, tidak sesuai timeline	-Penyesuaian renlak bulanan dilengkapi dengan justifikasi '-Penjadwalan penyelesaian pelaporan SIPT setiap awal bulan	31 Desember 2025	-	-	-	-Pemeriksaan sarana beberapa tidak sesuai dengan renlak terdapat '-Pelaporan SIPT terlambat, tidak sesuai timeline	Proses
		Mei	75	91,38	121,83	- Capaian melebihi target karena Adanya pengaduan dan tindak lanjut kasus sehingga terdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan renlak -Timeline pelaporan berdasarkan tanggal pemeriksaan sehingga menyulitkan monitoring dan evaluasi"	-Pemeriksaan sarana beberapa tidak sesuai dengan renlak terdapat -Pelaporan SIPT terlambat, tidak sesuai timeline	-Penyesuaian renlak bulanan dilengkapi dengan justifikasi '-Penjadwalan penyelesaian pelaporan SIPT setiap awal bulan	31 Desember 2025				-Pemeriksaan sarana beberapa tidak sesuai dengan renlak terdapat '-Pelaporan SIPT terlambat, tidak sesuai timeline	Proses
		Juni	75	94,13	125,50	- Capaian melebihi target karena Adanya pengaduan dan tindak lanjut kasus sehingga terdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan renlak -Timeline pelaporan berdasarkan tanggal pemeriksaan sehingga menyulitkan monitoring dan evaluasi								
		Juli	75		0,00									
		Agustus	75		0,00									
		Septem ber	75		0,00									
		Oktober	75		0,00									

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Novemb er	75		0,00									
		Desemb er	75		0,00									
11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Januari	91,4	91,4	100,00		karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		Februari	91,4	91,4	100,00		karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		Maret	91,4	91,4	100,00		karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan arahan Pusat terbaru baik utk komoditi obat, OBA, SK, kos dan pangan					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		April	91,4	98,91	108,22	Tidak ada kendala		Pelaksanaan sesuai juknis Pusat, ada bbrp penyesuaian					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		Mei	91,4	97,99	107,21	Tidak ada kendala		Pelaksanaan sesuai juknis Pusat					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		Juni	91,4	98,37	107,62	Tidak ada kendala		Pelaksanaan sesuai juknis Pusat					saat ini masih menyesuaikan arahan Pusat terkait pengawasan iklan	Proses
		Juli	91,4		0,00									
		Agustus	91,4		0,00									
		Septem ber	91,4		0,00									
		Oktober	91,4		0,00									
		Novemb er	91,4		0,00									
		Desemb er	91,4		0,00									
12.	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	Januari	0	0	#DIV/0!	Efisiensi anggaran	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn	31 Desember 2025				pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						ketersediaan anggaran	ketersediaan anggaran					pelaksanaan secara onsite dan online	
		Februari	**5**	**3,57**	**71,40**	Efisiensi anggaran	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	karena adanya efisiensi anggaran, maka pelaksanaan disesuaikan dgn ketersediaan anggaran	31 Desember 2025				pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Maret	**10**	**17,86**	**178,60**	Tidak ada kendala			31 Desember 2025				pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		April	**15**	**25**	**166,67**	Capaian melebihi anggaran dikarenakan pemeriksaan sarana fortifikasi menyesuaikan dengan sampling fortifikasi sehingga banyak dilakukan di triwulan 1 dan 2, sementara target pembagi awal masih diprediksi sesuai awal saat efisiensi anggaran (target rendah di TW 1 dan 2)	target TW 1 dan 2 menyesuaikan dengan efisiensi, namun capaian melebihi karena diharuskan periksa dan sampling fortif max s.d TW 2		31 Desember 2025				pemeriksaan sarana sesuai data risiko yg telah ditetapkan sebelumnya [ada pelaksanaan secara onsite dan online	Proses
		Mei	**20**	**32,14**	**160,70**	Capaian melebihi anggaran dikarenakan pemeriksaan sarana fortifikasi menyesuaikan dengan sampling fortifikasi sehingga banyak dilakukan di triwulan 1 dan 2, sementara target pembagi awal masih diprediksi sesuai awal saat efisiensi anggaran (target rendah di TW 1 dan 2)	target TW 1 dan 2 menyesuaikan dengan efisiensi, namun capaian melebihi karena diharuskan periksa dan sampling fortif max s.d TW 2		31 Desember 2025				Pemeriksaan melebihi dari target yang ditetapkan	Proses
		Juni	**25**	**35,71**	**142,86**	target pembagi di periode Juni 2025 terlalu rendah, namun akan sesuai diakhir tahun 2025	target TW 1 dan 2 menyesuaikan dengan efisiensi, namun capaian melebihi karena diharuskan periksa dan sampling fortif max s.d TW 2		31 Desember 2025				Pemeriksaan melebihi dari target yang ditetapkan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Juli	31		0,00									
		Agustus	38		0,00									
		September	46		0,00									
		Oktober	53		0,00									
		November	59		0,00									
		Desember	64		0,00									
13.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Januari	0	0	#DIV/0!									
		Februari	0	0	#DIV/0!									
		Maret	65,1	71	109,06	1. Penambahan ruang lingkup dan standar MA terverifikasi belum sesuai target karena ada target sampel yang belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan ruang lingkup. 2. Laboratorium juga sedang melaksanakan verifikasi metode analisis dalam rangka persiapan reakreditasi. 3. Masih terdapat parameter uji yang belum diuji oleh minimal 2 penguji	Nilai pemenuhan SKL tahun 2024 adalah 91,24 dengan target 88. Pada tahun 2025 ini terdapat perbedaan komponen penilaian SKL sehingga target tahun 2024 adalah 72,8 dan target di TW 1 sebesar 65,1.	1. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup 2. Dilakukan verifikasi metode analisis 3. Dilakukan pelatihan internal	31 Desember 2025		1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang lingkup 2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis		Nilai pemenuhan SKL dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	Proses
		April	65,1	71	109,06	1. Penambahan ruang lingkup dan standar MA terverifikasi belum sesuai target karena ada target sampel yang belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan ruang lingkup. 2. Laboratorium juga sedang melaksanakan verifikasi metode analisis dalam rangka persiapan reakreditasi. 3. Masih terdapat parameter uji yang belum diuji oleh minimal 2 penguji	Nilai pemenuhan SKL tahun 2024 adalah 91,24 dengan target 88. Pada tahun 2025 ini terdapat perbedaan komponen penilaian SKL sehingga target tahun 2024 adalah 72,8 dan target di TW 1 sebesar 65,1.	1. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup 2. Dilakukan verifikasi metode analisis 3. Dilakukan pelatihan internal	31 Desember 2025		1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang lingkup 2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis		Nilai pemenuhan SKL dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	Proses
		Mei	69,9	71	101,57	tidak ada kendala	Nilai pemenuhan SKL tahun 2024 adalah 91,24 dengan target 88.	1. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup	31 Desember 2025		1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang lingkup		Nilai pemenuhan SKL dapat tercapai sesuai dengan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							Pada tahun 2025 ini terdapat perbedaan komponen penilaian SKL sehingga target tahun 2024 adalah 72,8 dan target di TW 1 sebesar 65,1.	2. Dilakukan verifikasi metode analisis 3. Dilakukan pelatihan internal			2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis		target yang ditetapkan	
		Juni	**69,9**	**75,6**	**108,15**	tidak ada kendala	Nilai pemenuhan SKL TW 1 tahun 2025 sebesar 72,8 dengan target 65,1	1. Dilakukan pembelian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup 2. Dilakukan verifikasi metode analisis 3. Dilakukan pelatihan internal 4. Dilakukan pengujian dengan lebih dari satu penguji	31 Desember 2025		1. Melakukan pengujian untuk penambahan ruang lingkup 2. melakukan verifikasi metode analisis pada triwulan berikutnya 3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi laboratorium melalui bimbingan teknis 4. Melakukan pengujian dengan lebih dari satu penguji		Nilai pemenuhan SKL dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	Proses
		Juli	**69,9**		**0,00**									
		Agustus	**69,9**		**0,00**									
		Septem ber	**70,5**		**0,00**									
		Oktober	**70,5**		**0,00**									
		Novemb er	**70,5**		**0,00**									
		Desemb er	**72,8**		**0,00**									
14.	**Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**	**Januari**	**87,06**	**0**	**0,00**	-	Monev per triwulan, penyesuaian target sesuai arahan Pusat	Penyesuaian target dan definisi operasional	Februari 2025		Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan template pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses
		Februari	**87,06**	**0**	**0,00**	-	Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai arahan Pusat, monev dilakukan per triwulan,	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Maret	**87,06**	**87,18**	**100,14**	-	Perencanaan pelaksanaan sesuai arahan Biro Hukor, Perhitungan nilai tingkat efektivitas	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							KIE secara manual (aplikasi sedang proses pengembangan)							
		April	**87,06**	**87,18**	**100,14**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Perhitungan nilai Tingkat efektivitas KIE telah menggunakan aplikasi, nilai merupakan kumulatif (Januari - April)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Mei	**87,06**	**87,31**	**100,29**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Perhitungan nilai Tingkat efektivitas KIE telah menggunakan aplikasi, nilai merupakan kumulatif (Januari - Mei)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Juni	**87,06**	**87,27**	**100,24**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Perhitungan nilai Tingkat efektivitas KIE telah menggunakan aplikasi, nilai merupakan kumulatif (Januari - Juni)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Desember 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Juli	**87,06**		**0,00**									
		Agustus	**87,06**		**0,00**									
		September	**87,06**		**0,00**									
		Oktober	**87,06**		**0,00**									
		November	**87,06**		**0,00**									
		Desember	**87,06**		**0,00**									
15.	**Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**	**Januari**	*0*	*0*	**#DIV/0!**	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian target jumlah sekolah intervensi serta tahapan kegiatan dan persentasenya	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Februari	*0*	*0*	**#DIV/0!**	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian target jumlah sekolah intervensi serta tahapan kegiatan dan persentasenya	Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Maret	*20*	*20*	**100,00**	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian terhadap target jumlah sekolah intervensi serta tahapan kegiatan dan persentasenya. Aplikasi monev pusat belum mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Perencanaan tahapan kegiatan menyesuaikan surat dari Dit PMPUPO B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 hal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Perlu penyesuaian terhadap adanya perubahan tahapan kegiatan. Pengajuan permohonan penyesuaian tahapan kegiatan dan persentasenya ke Biro Roren	November 2025	Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan. Pengajuan permohonan penyesuaian tahapan kegiatan dan persentasenya ke Biro Roren		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses
		April	*25*	*25*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi. Aplikasi monev pusat sudah mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses
		Mei	*45*	*45,00*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah/madrasah di Kota Adm Jakarta Timur	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							kondisi setelah efisiensi.							
		Juni	*70*	*70,00*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi.	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah/Madrasah intervensi Kota Adm Jakarta Timur	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah/Madrasah intervensi Kota Adm Jakarta Timur	Proses
		Juli	*70*		**0,00**									
		Agustus	*80*		**0,00**									
		September	*80*		**0,00**									
		Oktober	*95*		**0,00**									
		November	*100*		**0,00**									
		Desember	**15**		**0,00**									
16.	**Jumlah desa pangan aman**	**Januari**	*0*	*0*	**#DIV/0!**		Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses
		Februari	*0*	*0*	**#DIV/0!**		Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Maret	*30*	*30*	**100,00**	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian terhadap target jumlah kelurahan intervensi serta tahapan kegiatan dan persentasenya. Aplikasi monev pusat belum mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Perencanaan tahapan kegiatan menyesuaikan surat dari Dit PMPUPO B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 hal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025. Pelaksanaan tahapan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Perlu penyesuaian terhadap adanya perubahan tahapan kegiatan	November 2025	Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan. Pengajuan permohonan penyesuaian tahapan kegiatan dan persentasenya ke Biro Roren		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							sesuai perencanaan							
		April	***50***	*50*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi. Aplikasi monev pusat sudah mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan pelatihan Kader Keamanan Pangan	Proses
		Mei	*70*	*70,00*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi.	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan Bimtek Komunitas Kelurahan Pangan Aman	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan Bimtek Komunitas Kelurahan Pangan Aman	Proses
		Juni	*70*	*70*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi.	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan Bimtek Komunitas Kelurahan Pangan Aman (progress fasilitasi keamanan pangan oleh Kader)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan Bimtek Komunitas Kelurahan Pangan Aman (progress fasilitasi keamanan pangan oleh Kader)	Proses
		Juli	*70*		**0,00**									
		Agustus	*80*		**0,00**									
		September	*80*		**0,00**									
		Oktober	*80*		**0,00**									
		November	*100*		**0,00**									
		Desember	**5**		**0,00**									
17.	**Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**	**Januari**	*0*	*0*	**#DIV/0!**		Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Penyesuaian target, tahapan kegiatan dan definisi operasional			Penyusunan rencana pelaksanaan sesuai dengan arahan pusat		Penyusunan rencana pelaksanaan	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Februari	*0*	*0*	**#DIV/0!**		Penyesuaian target dan tahapan kegiatan menyesuaikan arahan pusat	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	November 2025		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan (rencana pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)		Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan	Proses
		Maret	*25*	*25*	**100,00**	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan dan persentasenya. Aplikasi monev pusat belum mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Perencanaan tahapan kegiatan menyesuaikan surat dari Dit PMPUPO B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 hal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025. Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai perencanaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan. Perlu penyesuaian terhadap adanya perubahan tahapan kegiatan	November 2025	Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan. Pengajuan permohonan penyesuaian tahapan kegiatan dan persentasenya ke Biro Roren		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses
		April	*25*	*25*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi. Aplikasi monev pusat sudah mengakomodir penyesuaian terhadap tahapan kegiatan termasuk persentasenya (setelah efisiensi)	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan audiensi dan advokasi ke walikota Jakarta Timur)	Proses
		Mei	*50*	*50,00*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Pasar Ciracas Jakarta Timur	Pelaksanaan tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan.		Terlaksananya tahapan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Pasar	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							kondisi setelah efisiensi.						Ciracas Jakarta Timur	
		Juni	*70*	*70,00*	**100,00**	-	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan tahapan kegiatan, dengan tahapan kegiatan telah menyesuaikan kondisi setelah efisiensi.	Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.	November 2025	Pelaksanaan sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas pasar Ciracas Jakarta Timur			Terlaksananya tahapan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas pasar Ciracas Jakarta Timur	Proses
		Juli	*100*		**0,00**									
		Agustus	*100*		**0,00**									
		September	*100*		**0,00**									
		Oktober	*100*		**0,00**									
		November	*100*		**0,00**									
		Desember	**1**		**0,00**									
18.	**Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu**	**Januari**	**1**	**1**	**100,00**		Telah dilakukan advokasi lintas sektor tanggal 22 Januari 2025 untuk mendapatkan usulan sarana yang difasilitasi	Usulan UMKM Pangan yang dapat difasilitasi	Februari Maret 2025		Dilaksanakan visitasi bagi pelaku usaha usulan untuk dilakukan gap analysis terkait kemungkinan untuk difasilitasi		Mendapatkan daftar sarana yang dapat difasilitasi	Selesai
		Februari	**7,43**	**7,43**	**100,00**		Telah dilakukan visitasi sarana produksi UMKM Pangan untuk penetapan UMKM yang didampingi	Penetapan UMKM Pangan	Februari - Maret 2025		Dilakukan bimtek bagi pelaku usaha yang sudah ditetapkan sebagai peserta program pendampingan		Pelaku usaha sudah mendapatkan Bimtek CPPOB	Selesai
		Maret	**14,86**	**14,86**	**100,00**		Sudah dilakukan visitasi sarana produksi pangan untuk ditetapkan sebagai target pendampingan	Dilakukan bimtek CPPOB untuk sarana yang sudah ditetapkan	Maret 2025		Dilakukan bimtek CPPOB untuk sarana yang sudah ditetapkan		Sudah dilakukan Bimtek CPPOB untuk sarana di wilayah Jakarta Timur (10-13 Maret 2025), dan di wilayah Jakarta Selatan dan Utara pada tanggal 17-20 Maret 2025	Selesai
		April	**22**	**38,33**	**174,23**		Sudah dilakukan Bimtek CPPOB mandiri, Jaksel,	Dilakukan bimtek untuk Jakbar	April 2025		Dilakukan Bimtek CPOTB Bertahap dan Bimtek CPKB		Telah dilakukan Bimtek CPPOB Jakarta Barat	Selesai

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
							JakUt dan Jaktim. Dan telah dilakukan pendampingan CPPOB							
		Mei	**29,72**	**55,24**	**185,86**		Sudah dilakukan Bimtek CPPOB mandiri, Jaksel, Jakut, Jakbar dan Jaktim. Dan telah dilakukan pendampingan CPPOB	Dilakukan bimtek untuk Jakpus, dan bimtek CPKB dan CPOTB	Mei 2025	Sudah dilakukan Bimtek CPPOB mandiri, Jaksel, Jakut, Jakbar, Jakpus, dan telah dilakukan pendampingan CPPOB serta bimtek CPKB dan CPOTB			Telah dilakukan Bimtek CPPOB Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Bimtek CPKB dan CPOTB	Selesai
		Juni	**37,15**	**40,79**	**109,81**	Target di TW III sudah dilaksanakan di TW II, pihak sarana sudah dapat menyelesaikan pemenuhan GMP di TW II, sehingga mengakibatkan capaian menjadi melebihi target	Sudah dilakukan Bimtek CPPOB Tahap I untuk seluruh wilayah serta Bimtek CPKB dan CPOTB	Bimtek Tahap II untuk Fasilitasi Mandiri dan untuk Fasilitasi Kolaborasi 5 Wilayah	Juni 2025	Sudah dilakukan Bimtek Tahap II untuk wilayah Jaksel, Jakut, Jaktim dan Jakbar			Sudah dilakukan Bimtek Tahap II untuk wilayah Jaksel, Jakut, Jaktim dan Jakbar	Selesai
		Juli	**44,58**		**0,00**									
		Agustus	**52,01**		**0,00**									
		Septem ber	**59,44**		**0,00**									
		Oktober	**66,87**		**0,00**									
		Novemb er	**74,3**		**0,00**									
		Desemb er	**81,7**		**0,00**									
19.	**Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta**	**Januari**	**40**	**49,38**	**123,45**	Persentase lebih dari 120% sehubungan perubahan cara perhitungan persentase keberhasilan penindakan di tahun 2025 dimana seluruh tahapan kemajuan perkara dimasukkan ke dalam perhitungan kecuali untuk perkara yg DPO.	Di bulan Januari ini baru perkara carry over yang diperhitungkan untuk persentase keberhasilan penindakan sehubungan belum adanya giat penindakan untuk tahun 2025.	Segera menyelesaikan perkara carry over dan melaksanakan giat penindakan.	April - Juni 2025	-	Intensifikasi kegiatan intelijen; koordinasi intens dengan CJS untuk penyelesaian berkas perkara; gelar perkara / ekspos untuk perkara yg terkendala	April - Juni 2025	Perhitungan menyesuaikan dengan cara perhitungan baru di tahun 2025; penyusunan rencana penindakan dengan intensifikasi kegiatan intelijen	Proses
		Februari	**43**	**49,38**	**114,84**	Belum dilaksanakan penindakan sehubungan belum adanya informasi target A1.	Di bulan Februari ini baru perkara carry over yang diperhitungkan untuk persentase keberhasilan penindakan sehubungan belum adanya giat penindakan untuk tahun 2025.	Segera menyelesaikan perkara carry over dan melaksanakan giat penindakan.	April - Juni 2025	-	Intensifikasi kegiatan intelijen; koordinasi intens dengan CJS untuk penyelesaian berkas perkara; gelar perkara / ekspos untuk perkara yg terkendala	April - Juni 2025	Penyusunan rencana penindakan dengan intensifikasi kegiatan intelijen	Proses

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
		Maret	**45**	**49,38**	**109,73**	Belum dilaksanakan penindakan sehubungan belum adanya informasi target A1.	Di bulan Maret ini baru perkara carry over yang diperhitungkan untuk persentase keberhasilan penindakan sehubungan belum adanya giat penindakan untuk tahun 2025.	Segera menyelesaikan perkara carry over dan melaksanakan giat penindakan.	April - Juni 2025	-	Intensifikasi kegiatan intelijen; koordinasi intens dengan CJS untuk penyelesaian berkas perkara; gelar perkara / ekspos untuk perkara yg terkendala	April - Juni 2025	Penyusunan rencana penindakan dengan intensifikasi kegiatan intelijen	Proses
		April	**48**	**50,77**	**105,77**	Belum adanya capaian perkara sehubungan hasil penindakan tidak ada yang dapat ditetapkan dengan tindak lanjut Pro Justitia.	Di bulan April ini baru perkara carry over yang diperhitungkan untuk persentase keberhasilan penindakan sehubungan belum adanya giat penindakan untuk tahun 2025.	-Intensifikasi kegiatan intelijendan melaksanakan giat penindakan yang menghasilkan perkara -Koordinasi intens dengan CJS untuk penyelesaian berkas perkara; gelar perkara / ekspos untuk perkara yg terkendala.	April - Juni 2025	-	-	-	-	Proses
		Mei	**50**	**55,38**	**110,77**	-	Capaian bulan Mei telah melebihi 100% dan target perkara tercapai 2 dari 4 target.	Intensifikasi penyelesaian target perkara (kurang tercapai target 2 perkara); penyelesaian perkara carry over dan tahun-n.	Mei-Juni 2025	-	-	-	-	Proses
		Juni	**53**	**55,38**	**104,50**	-	Capaian bulan Juni telah melebihi 100% dan target perkara tercapai 2 dari 4 target.	Intensifikasi penyelesaian target perkara (kurang tercapai target 2 perkara); penyelesaian perkara carry over dan tahun-n.	Juni-Juli 2025	-	-	-	-	Proses
		Juli	**55**		**0,00**									
		Agustus	**58**		**0,00**									
		Septem ber	**60**		**0,00**									
		Oktober	**63**		**0,00**									
		Novemb er	**66**		**0,00**									
		Desemb er	**70**		**0,00**									
20.	**Persentase Laporan Analisis Kejahatan**	**Januari**	**50**	**50**	**100,00**	-	-	-	-	-				
		Februari	**50**	**50**	**100,00**	-	-	-	-	-				

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**Maret**	**50**	**50**	**100,00**	-	-	-	-	-				
		April	**50**	**43,75**	**87,50**	Keterlambatan penyampaian surat permohonan profilling ke Direktorat Siber BPOM, terkirim awal bulan namun seharusnya pengiriman surat sebelum tanggal 25 setiap bulannya.	Mengakibatkan capaian di bulan April turun menjadi 87.5%	Pengiriman surat sesuai timeline yang ditetapkan Direktorat Siber BPOM	Mei 2025	Menyampaikan permohonan profilling sebelum tanggal 25 Mei untuk bulan depan.				
		Mei	**50**	**45**	**90,00**	Keterlambatan penyampaian surat permohonan profilling bulan April 2025 ke Direktorat Siber BPOM, terkirim awal bulan Mei 2025 namun seharusnya pengiriman surat sebelum tanggal 25 setiap bulannya.	Mengakibatkan capaian capaian di bulan April turun menjadi 87.5%, dan berlanjut di bulan Mei turun menjadi 90%	Pengiriman surat sesuai timeline yang ditetapkan Direktorat Siber BPOM	Juni 2025	Menyampaikan permohonan profilling sebelum tanggal 25 Juni untuk bulan depan.				Proses
		Juni	**50**	**45,835**	**91,67**	Penyampaian laporan Patroli Siber dan profilling bulan Juni 2025 tepat waktu, capaian tidak 100% karena masih terimbas capaian Mei 2025.	Capaian bulan Juni masih kurang dari 100% (91,67%)	Pengiriman surat sesuai timeline yang ditetapkan Direktorat Siber BPOM	Juli 2025	Konsisten menyampaikan permohonan profilling sebelum tanggal 25 untuk setiap bulannya.				Proses
		Juli	**50**		**0,00**									
		Agustus	**50**		**0,00**									
		Septem ber	**50**		**0,00**									
		Oktober	**50**		**0,00**									
		Novemb er	**50**		**0,00**									
		Desemb er	**50**		**0,00**									
21.	**Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta**	**2025**	**4,7**											

	Nama Indikator	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Kendala	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Penyelesaian	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Status
										Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***			
											Rencana Aksi yang belum Selesai**	Timeline		
22.	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	2025	93,5											
23.	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	2025	83,52											
24.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	2025	5											
25.	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	2025	3,05											

3.3 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 30 Juni 2025 dengan pagu sebesar 31,70% dari pagu Rp45.651.891.000, maka realisasi periode ini masih **di bawah** target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 47%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432747 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	10,103,237,000	29,272,443,000	6,276,211,000	0	0	0	0	0	0	45,651,891,000
		REALISASI	5,099,025,444 (50.47%)	6,262,963,336 (21.40%)	3,107,845,524 (49.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,469,834,304 (31.70%)
		SISA	5,004,211,556	23,009,479,664	3,168,365,476	0	0	0	0	0	0	31,182,056,696
GRAND TOTAL		**PAGU**	**10,103,237,000**	**29,272,443,000**	**6,276,211,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,651,891,000**
		REALISASI	**5,099,025,444 (50.47%)**	**6,262,963,336 (21.40%)**	**3,107,845,524 (49.52%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**14,469,834,304 (31.70%)**
		SISA	**5,004,211,556**	**23,009,479,664**	**3,168,365,476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,182,056,696**

Sumber Data: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiAkunE 1 03-07-25 09:06:42

2. Berdasarkan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B- 32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, atas arahan Presiden dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 total blokir otomatis Balai Besar POM di Jakarta sebesar Rp4.663.526.000,00. Dan sesuai surat Sestama BPOM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Feb 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, jumlah blokir Balai Besar POM di Jakarta bertambah sebesar Rp15.826.305.000,00. Kemudian atas dasar surat Sestama BPOM B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, jumlah blokir anggaran yang

dimanfaatkan kembali sebesar Rp4.502.209.000,00 sehingga total efisiensi dari Balai Besar POM di Jakarta menjadi Rp15.987.622.000,00. Realisasi anggaran per 30 Juni 2025 dengan pagu dikurangi blokir keseluruhan adalah sebesar 48,79% dari pagu setelah relaksasi Rp29.664.269.000,00. Sesuai gambar dibawah ini:





3. Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai 50,47% dan belanja modal sebesar 49,52%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja barang sebesar 21,40%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan II, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja barang minimal 50%, belanja pegawai minimal 50%, dan belanja modal minimal 40%, terdapat selisih lebih sebesar 0,47% pada belanja pegawai dan 9,52% pada belanja modal; selisih kurang 18,6% pada belanja barang.

4. Persentase rata-rata deviasi kumulatif yang diperoleh sebesar 12,69% termasuk kategori **buruk** karena melampaui ambang batas 5%. Perhitungan rincian rencana penarikan dana pada setiap kelompok fungsi/bagian terdapat pada Lampiran Rincian realisasi anggaran pada setiap output dari kelompok substansi/bagian. Sebagaimana gambar berikut:

5.

Keterangan	Pagu Awal	Blokir Otomatis	Blokir Rekonstruksi	Realokasi PPNPN	Buka Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni	Persen Realisasi Pagu Awal	Persen Realisasi Pagu Akhir
Penindakan	**845.217.000**	**174.046.000**	**444.410.000**		**303.799.000**	**530.560.000**	**311.574.733**	**36,86%**	**58,73%**
3165.AEA.001	452.653.000	71.686.000	242.971.000			137.996.000	137.995.294	30,49%	100,00%
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan	452.653.000	71.686.000	242.971.000			137.996.000	137.995.294	30,49%	100,00%
3165.QCD.U01	392.564.000	102.360.000	201.439.000		303.799.000	392.564.000	173.579.439	44,22%	44,22%
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA [PN-04]	392.564.000	102.360.000	201.439.000		303.799.000	392.564.000	173.579.439	44,22%	44,22%
Pengujian	**10.242.542.000**	**182.963.000**	**4.705.057.000**	**-344.074.700**	**3.295.788.000**	**8.306.235.300**	**4.680.232.945**	**45,69%**	**56,35%**
3165.PDD.001	2.343.987.000	138.123.000	1.608.437.000		1.746.560.000	2.343.987.000	804.400.746	34,32%	34,32%
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar	2.343.987.000	138.123.000	1.608.437.000		1.746.560.000	2.343.987.000	804.400.746	34,32%	34,32%
3165.QIA.001	699.296.000	15.200.000	511.156.000		526.356.000	699.296.000	209.927.053	30,02%	30,02%
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh	699.296.000	15.200.000	511.156.000		526.356.000	699.296.000	209.927.053	30,02%	30,02%
3165.QIA.002	1.356.864.000	29.640.000	993.232.000		1.022.872.000	1.356.864.000	626.389.622	46,16%	46,16%
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT [PN-04]	1.356.864.000	29.640.000	993.232.000		1.022.872.000	1.356.864.000	626.389.622	46,16%	46,16%
3165.RAB.001	5.842.395.000	-	1.592.232.000	-344.074.700		3.906.088.300	3.039.515.524	52,03%	77,81%
Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar	5.842.395.000	-	1.592.232.000	-344.074.700		3.906.088.300	3.039.515.524	52,03%	77,81%
Tata Usaha	**20.821.053.000**	**319.221.000**	**3.932.802.000**	**344.074.700**		**16.913.104.700**	**8.149.435.084**	**39,14%**	**48,18%**
3165.BMB.001	108.210.000	11.400.000	74.600.000			22.210.000	16.831.660	15,55%	75,78%
Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	108.210.000	11.400.000	74.600.000			22.210.000	16.831.660	15,55%	75,78%
3165.CAB.001	100.000.000	-	96.670.000			3.330.000	3.330.000	3,33%	100,00%
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	100.000.000	-	96.670.000			3.330.000	3.330.000	3,33%	100,00%
3165.CAN.001	93.606.000	-	28.606.000			65.000.000	65.000.000	69,44%	100,00%
Perangkat pengolah data dan komunikasi	93.606.000	-	28.606.000			65.000.000	65.000.000	69,44%	100,00%
3165.CBV.001	600.000.000	-	600.000.000			-	-	0,00%	0,00%
Prasarana Pengawasan Obat	600.000.000	-	600.000.000			-	-	0,00%	0,00%
6384.EBA.956	8.000.000	3.900.000	4.100.000			-	-	0,00%	0,00%
Layanan BMN	8.000.000	3.900.000	4.100.000			-	-	0,00%	0,00%
6384.EBA.994	19.911.237.000	303.921.000	3.128.826.000	344.074.700		16.822.564.700	8.064.273.424	40,50%	47,94%
Layanan Perkantoran	19.911.237.000	303.921.000	3.128.826.000	344.074.700		16.822.564.700	8.064.273.424	40,50%	47,94%
Informasi dan Komunikasi	**11.627.820.000**	**3.189.951.000**	**5.965.411.000**			**2.472.458.000**	**945.588.566**	**8,13%**	**38,24%**
3165.BDC.001	9.625.018.000	2.698.163.000	4.771.847.000			2.155.008.000	751.936.896	7,81%	34,89%
Masyarakat yang ditingkatkan	9.625.018.000	2.698.163.000	4.771.847.000			2.155.008.000	751.936.896	7,81%	34,89%

Keterangan	Pagu Awal	Blokir Otomatis	Blokir Rekonstruksi	Realokasi PPNPN	Buka Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni	Persen Realisasi Pagu Awal	Persen Realisasi Pagu Akhir
3165.BKB.001	490.000.000	25.356.000	390.965.000			73.679.000	43.189.160	8,81%	58,62%
Laporan koordinasi pengawasan Obat	490.000.000	25.356.000	390.965.000			73.679.000	43.189.160	8,81%	58,62%
3165.QDB.001	516.930.000	135.951.000	294.699.000			86.280.000	56.312.000	10,89%	65,27%
Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS)	516.930.000	135.951.000	294.699.000			86.280.000	56.312.000	10,89%	65,27%
3165.QDB.002	779.693.000	265.598.000	389.294.000			124.801.000	71.346.000	9,15%	57,17%
Desa Pangan Aman [PN-04]	779.693.000	265.598.000	389.294.000			124.801.000	71.346.000	9,15%	57,17%
3165.QDB.003	118.779.000	30.608.000	57.481.000			30.690.000	21.804.510	18,36%	71,05%
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	118.779.000	30.608.000	57.481.000			30.690.000	21.804.510	18,36%	71,05%
3165.QDC.001	97.400.000	34.275.000	61.125.000			2.000.000	1.000.000	1,03%	50,00%
Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik)	97.400.000	34.275.000	61.125.000			2.000.000	1.000.000	1,03%	50,00%
Pemeriksaan	**2.115.259.000**	**797.345.000**	**778.625.000**		**902.622.000**	**1.441.911.000**	**386.679.305**	**18,28%**	**26,82%**
3165.BAH.001	577.890.000	232.900.000	150.695.000			194.295.000	107.385.000	18,58%	55,27%
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh	577.890.000	232.900.000	150.695.000			194.295.000	107.385.000	18,58%	55,27%
3165.QIC.001	219.393.000	90.590.000	71.883.000		162.473.000	219.393.000	72.160.000	32,89%	32,89%
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh	219.393.000	90.590.000	71.883.000		162.473.000	219.393.000	72.160.000	32,89%	32,89%
3165.QIC.003	13.680.000	2.740.000	7.692.000		10.432.000	13.680.000	4.266.500	31,19%	31,19%
Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan	13.680.000	2.740.000	7.692.000		10.432.000	13.680.000	4.266.500	31,19%	31,19%
3165.QIC.004	963.125.000	334.265.000	395.452.000		729.717.000	963.125.000	174.763.430	18,15%	18,15%
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	963.125.000	334.265.000	395.452.000		729.717.000	963.125.000	174.763.430	18,15%	18,15%
3165.QDG.001	341.171.000	136.850.000	152.903.000			51.418.000	28.104.375	8,24%	54,66%
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	341.171.000	136.850.000	152.903.000			51.418.000	28.104.375	8,24%	54,66%
Grand Total	**45.651.891.000**	**4.663.526.000**	**15.826.305.000**	**-**	**4.502.209.000**	**29.664.269.000**	**14.473.510.633**	**31,70%**	**48,79%**

Deviasi Rencana Penarikan Dana per 30 Juni 2025

Output	Jenbel	RPD	Realisasi	Realisasi - RPD	Poksi	Deviasi RPD
AEA	52	1.000.700	-	-1.000.700	Penindakan	100,00%
BAH	52	16.719.998	20.870.000	4.150.002	Pemeriksaan	24,82%
BDC	52	821.009.638	217.650.000	-603.359.638	Infokom	73,49%
BKB	52	0	1.240.000	1.240.000	Tata Usaha	100,00%
BMB	52	600.000	10.298.800	9.698.800	Infokom	100,00%
CAB	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
CAN	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
CBV	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
PDD	52	206.864.300	264.514.450	57.650.150	Pengujian	27,87%

QCD	52	42.996.917	86.842.000	43.845.083	Penindakan	100,00%
QDB	52	15.259.999	40.095.580	24.835.581	Infokom	100,00%
QDC	52	0	-	0	Infokom	0,00%
QDG	52	2.280.000	9.456.750	7.176.750	Pemeriksaan	100,00%
QIA	52	278.185.299	579.242.578	301.057.279	Pengujian	100,00%
QIC	52	162.499.997	84.097.630	-78.402.367	Pemeriksaan	48,25%
RAB	53	3.523.203.320	2.986.563.216	-536.640.104	Pengujian	15,23%
EBA	51	1.280.132.139	1.262.641.291	-17.490.848	Tata Usaha	1,37%
EBA	52	519.991.629	435.056.868	-84.934.761	Tata Usaha	16,33%
Jumlah		**6.870.743.936**	**5.998.569.163**	**-872.174.773**		**12,69%**

6. Persentase Indikator Deviasi Halaman III DIPA tersebut mempengaruhi nilai IKPA sehingga pada Juni 2025 perolehan nilai IKPA adalah 98,01. Nilai yang belum maksimal tersebut disebabkan Deviasi Halaman III DIPA yang belum optimal. Deviasi halaman III DIPA belum mendapat nilai 100 karena KIE yang sudah direncanakan, batal dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2025; serta terdapat belanja modal yang belum terealisasi di bulan Juni 2025.

7. Perlu diterapkan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:
   1) Fokus dan melakukan percepatan realisasi kegiatan yang terdampak revisi DIPA pembukaan blokir TA 2025;
   2) Pengadaan barang/jasa diprioritaskan dan jika memungkinkan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem belanja digital seperti : e- katalog/e-purchasing dan/atau Digipay Satu;
   3) Mengajukan uang persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung (Ls) dalam proses pembayaran dan mempercepat revolving UP;

4) Percepatan implementasi belanja dan pembayaran non tunai dengan Digipay Satu, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), atau cash management system;
5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan pelaksana teknis) dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/pengadaan barang/jasa, seperti kegiatan apa, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan akan dilaksanakan dan kapan akan diajukan proses pencairan dana yang kemudian datanya nanti akan digunakan untuk pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.

3.4 TINGKAT EFISIENSI

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE :Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE ≤ SE maka dianggap tidak efisien.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja TW II

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	99,45	114,31%	1.356.864.000	500.736.919	36,90%	**3,10**	**2,10**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00	N/A	2.000.000	1.000.000	50,00%	**0,50**	**0,50**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	98,72	116,14%	699.296.000	141.151.453	20,18%	**5,75**	**4,75**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	699.296.000	141.151.453	20,18%	**0,00**	**1,00**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	96,21	113,19%	699.296.000	141.151.453	20,18%	**5,61**	**4,61**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92,64	85,48	92,27%	28.893.750	157.741.430	545,94%	**0,17**	**0,83**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	95,50	103,80%	26.327.160	11.950.000	45,39%	**2,29**	**1,29**	**84%**	Tidak efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	84,62	105,78%	193.065.840	66.080.000	34,23%	**3,09**	**2,09**	**75%**	Tidak efisien
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	95,52	99,10	103,75%	587.506.250	157.741.430	26,85%	**3,86**	**2,86**	**75%**	Tidak efisien

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan										
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	94,13	125,51%	317.831.250	157.741.430	49,63%	**2,53**	**1,53**	**80%**	Tidak efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	98,37	107,63%	963.125.000	157.741.430	16,38%	**6,57**	**5,57**	**75%**	Tidak efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25,00	35,71	142,84%	13.680.000	3.506.500	25,63%	**5,57**	**4,57**	**75%**	Tidak efisien
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Jakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,90	75,60	108,15%	6.834.360.000	2.959.611.144	43,30%	**2,50**	**1,50**	**80%**	Tidak efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,06	87,27	100,24%	2.177.218.000	755.568.556	34,70%	**2,89**	**1,89**	**75%**	Tidak efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70,00	70,00	100,00	86.280.000	56.312.000	65,27%	**153,22**	**152,22**	**75%**	Tidak efisien
		Jumlah desa pangan aman	70,00	70,00	100,00%	124.801.000	71.346.000	57,17%	**1,75**	**0,75**	**90%**	Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70,00	70,00	100,00%	30.690.000	19.224.510	62,64%	**1,60**	**0,60**	**92%**	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37,15	74,91	201,64%	51.418.000	23.466.625	45,64%	**4,42**	**3,42**	**75%**	Tidak efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta	53,00	55,38	104,49%	392.564.000	161.305.939	41,09%	**2,54**	**1,54**	**80%**	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	45,84	91,68%	137.996.000	137.995.294	100,00%	**0,92**	**0,08**	**75%**	Tidak Efisien

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
	BBPOM di Jakarta											
8	Layanan Publik BBPOM di Jakarta yang prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	N/A	194.295.000	86.515.000	44,53%	**0,45**	**0,55**	**75%**	Tidak efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	N/A	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%	**0,61**	**0,39**	**75%**	Tidak efisien
		Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	N/A	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%	**0,61**	**0,39**	**75%**	Tidak efisien
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	N/A	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%	**0,61**	**0,39**	**75%**	Tidak efisien
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Jakarta	0,00	0,00	N/A	16.980.289.000	10.358.439.884	61,00%	**0,61**	**0,39**	**75%**	Tidak efisien

Berdasarkan tabel tersebut, rentang efisiensi dari kegiatan di atas yaitu antara 0,08- – 152,22. Dapat diketahui bahwa dari perhitungan efisiensi anggaran pada 25 indikator utama didapatkan 6 indikator tidak terdapat target pada triwulan I tahun 2025 yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Indeks Manajemen Risiko UPT. Dari 25 indikator diketahui ada 2 (dua) indikator yang “Efisien” yaitu Indikator Jumlah desa pangan aman dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Tidak efisiennya pemanfaatan anggaran pada 23 indikator pada umumnya disebabkan karena gap antara capaian kinerja dan capaian anggaran yang terlalu besar dikarenakan adanya kebijakan efisiensi s.d triwulan II tahun 2025 sehingga pembiyaan ditekan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kinerja BBPOM di Jakarta.

Tabel Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Keterangan
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	0,98	0,79	**1,25**	**0,25**	**95 %**	EFISIEN
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1,43	0,26	**5,57**	**4,57**	**75 %**	TIDAK EFISIEN
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1,08	0,43	**2,50**	**1,50**	**80 %**	TIDAK EFISIEN
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	25,75	0,55	**46,87**	**45,87**	**75 %**	TIDAK EFISIEN
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	2,02	0,46	**4,42**	**3,42**	**75 %**	TIDAK EFISIEN
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1,04	0,41	**2,29**	**1,29**	**84 %**	TIDAK EFISIEN
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	0,92	1,00	**0,92**	**-0,08**	**75 %**	TIDAK EFISIEN
SS8	Layanan Publik BBPOM di Jakarta yang prima	0,00	0,45	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	TIDAK EFISIEN
SS9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	0,00	0,61	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	TIDAK EFISIEN

Berdasarakan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 5 sasaran strategis yang dapat dihitung tingkat efisiensinya, terdapat 1 sasaran strategis yang efisien dan 4 sasaran strategis yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Anggaran yang diserap pada TW II Tahun 2025 sebesar Rp 1.634.186.998,- dari pagu anggaran Rp 5.537.501.250,- atau 29,32% dengan capaian sasaran strategis sebesar 69,9%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian serta sarana dan kegiatan penunjangnya, KIE

farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan, serta pengawasan iklan.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Anggaran yang diserap pada TW II Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp 3.506.500,- dari pagu anggaran Rp 13.680.000,- atau 75,63% dengan capaian sasaran strategis sebesar 48,44%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan
3. Sasaran Strategis: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di di Jakarta Anggaran yang diserap pada TW II Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di di Jakarta sebesar 2.959.611.144,- dari pagu anggaran Rp 6.864.360.000,- atau 43.30% dengan capaian sasaran strategis sebesar 60,15%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.
4. Sasaran Strategis: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta yang diserap pada TW II Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp 902.451.066,- dari pagu anggaran Rp 2.418.9898.000 atau 57,31% dengan capaian sasaran strategis 75,75

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan pendampingan sekolah, desa dan pasar.

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Anggaran yang diserap pada TW II Tahun 2025 pada Sasaran Strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sebesar Rp 23.466.625,- dari pagu anggaran Rp 51.418.000,- atau 45,64% dengan capaian sasaran strategis sebesar 75%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM untuk memperoleh memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
6. Sasaran Strategis: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu yang diserap pada TW II Tahun 2025 sebesar Rp 161.305.939,- dari pagu anggaran Rp 392.564.000,- atau 41,09% dengan capaian sasaran strategis sebesar 55%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan.
7. Sasaran Strategis: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Anggaran yang diserap pada TW II Tahun 2025 Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sebesar Rp3 100.990.294,- dari pagu anggaran Rp 137.996.000,- atau 73,18% dengan

capaian sasaran strategis sebesar 91%. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini tidak efisien karena terjadi gap yang terlalu tinggi antara anggaran yang diserap dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Anggaran pada sasaran strategis ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Analisis Kejahatan; Operasi Intelijen dan Pemberkasan Perkara.

8. Sasaran Strategis: Layanan Publik UPT yang prima Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW II Tahun 2025.
9. Sasaran Strategis:Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat efisiensi pada sasaran strategis ini belum dapat diperhitungkan karena tidak ada capaian kinerja pada TW II Tahun 2025.

Dari Kegiatan terlihat di triwulan II ini masih banyak yang tidak hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya. Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat prioritas;
2. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Rapat Koordinasi dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan lainnya;
3. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, sehingga menghemat biaya terutama untuk dokumentasi dan pencetakan;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain sehingga capaian kinerja dapat meningkat.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan II Tahun 2025 untuk 9 (Sembilan) sasaran strategis yang diukur melalui 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Triwulan II ini dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat 6 (enam) sasaran strategis mencapai target dengan kategori “Sangat Baik” dengan range nilai 100% < x ≤ 110% sebagai berikut:
    1) Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai sasaran strategis sebesar 106,57%
    2) Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan nilai sasaran strategis sebesar 110%
    3) Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai sasaran strategis sebesar 108,15%
    4) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai sasaran strategis sebesar 100,06%
    5) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu nilai sasaran strategis sebesar 109,80%
    6) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja nilai sasaran strategis sebesar 104,49%
2. Sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

memperoleh nilai sasaran strategis sebesar 91,67% dengan kategori “Baik” dengan range nilai 90% < x ≤ 100%.

4.2. SARAN

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta, beberapa upaya peningkatan kinerja yang akan datang perlu dilakukan

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.
2. Analisis akar masalah pada sasaran strategis yang hanya mencapai kategori "Cukup" dan “Kurang” serta sasaran yang "Tidak Dapat Disimpulkan", untuk memperbaiki strategi pencapaian di triwulan berikutnya
3. Tingkatkan mekanisme monitoring terhadap seluruh sasaran strategis secara rutin untuk mengantisipasi ketidaktercapaian target
4. Indikator dan sasaran strategis yang belum dapat dihitung capaiannya pada Triwulan III, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan capaiannya dilakukan secara sistematis dan akurat, guna mendukung penilaian kinerja yang valid pada akhir tahun 2025.
5. Penguatan Sinergi Internal untuk saling mendukung pencapaian sasaran strategis

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada Triwulan berikutnya capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dapat semakin optimal dan seluruh sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.8 Persentase
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.06 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81.7 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.52 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,651,891,000 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,732,654,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,919,237,000

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,356,864,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	97,400,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	594,401,600
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48,950,720
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	55,943,680
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.5	80.2	92.64	92.98	93	93.77	93.77	94	95.5	96	100	100	28,893,750
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	26,327,160
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	193,065,840

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	587,506,250
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	317,831,250
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	28,893,750
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	13,680,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65.1	65.1	69.9	69.9	69.9	69.9	70.5	70.5	70.5	72.8	8,186,382,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	9,733,228,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	25	45	70	70	80	80	95	100	15	516,930,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			30	50	70	70	70	80	80	80	100	5	779,693,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	25	50	70	100	100	100	100	100	1	118,779,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7.43	14.86	22	29.72	37.15	44.58	52.01	59.44	66.87	74.3	81.7	341,171,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392,564,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452,653,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	577,890,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93.5	5,750,710,750
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.52	5,150,710,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,150,710,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.05	5,150,710,750
														Total	45,651,891,000

Jakarta, 07 May 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS

NOMOR: PR.09.02.63.07.25.350

Yth.	: Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
Dari	: Direktur Siber Obat dan Makanan
Lampiran	: 3 (Tiga) Lembar
Hal	: Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan Badan POM sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025
Tanggal	: 07 Juli 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni Tahun 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut https://bit.ly/definisiops.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut sampai dengan bulan April Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, setiap UPT Badan POM dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC terkait.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Nur Iskandarsyah

Tembusan:
1. Deputi Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan
Nomor : PR.09.02.63.07.25.350
Tanggal : 07 Juli 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
5.	Denpasar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
8.	Jayapura													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
9.	Kupang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
12.	Mataram													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
22.	Surabaya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Ambon													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Balikpapan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banyumas													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Baubau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Batam													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Bengkulu													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bima													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%
8.	Bogor													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Dumai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Ende													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Indragiri Hulu													50,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
12.	Jambi													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Jember													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
14.	Kediri													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
15.	Kendari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Mamuju													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Manokwari													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palopo													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Palu													100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
20.	Pangkalpinang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Payakumbuh													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%
22.	Sanggau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Sofifi													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
24.	Surakarta													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25.	Tabalong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26.	Tangerang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27.	Tanjung Balai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	Tarakan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29.	Tasikmalaya													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30.	Tulang Bawang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
- Tepat Waktu
- Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA LOKA POM SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Loka POM di	Fungsi												Nilai Kinerja					
		Patroli Siber						Profiling Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1.	Aceh Selatan													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Aceh Tengah													100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%
3.	Banggai													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Belitung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Belu													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%
6.	Buleleng													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bungo													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%
8.	Kep. Sangihe													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kep. Tanimbar													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kotawaringin Barat													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Lubuk Linggau													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Manggarai Barat													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Merauke													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Mimika													100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	100,00%
15.	Morotai													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
16.	Rejang Lebong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Sambas													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
18.	Sijunjung													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Sorong													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Sumba Timur													100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%
21.	Tanah Bumbu													50,00%	25,00%	33,33%	50,00%	60,00%	66,67%
22.	Tanjung Pinang													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Toba													100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : BBPOM di Jakarta
Triwulan/Tahun : 2/2025
Tanggal Penilaian : 23 Juni 2025
Nama Tim Penilai : 1. Intan Dian Nurfadillah, S.Si.
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	82.25	75.6	69.9	108.1
2.	Staandar Peralatan	85.9			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	50			
4.	Standar Metode Terverifikasi	72.9			

Kendala Pemenuhan

-

Rencana Tindak Lanjut :

-

Tim Penilai PPPOMN

1 Intan Dian Nurfadillah, S.Si.

2 Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Kepala BBPOM di Jakarta

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., MSi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuanSampel Makanan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			100,00	83,33	85,42	100,00	92,19
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret			99,78	100,00	100,00	100,00	99,94
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April			99,83	92,36	91,18	92,27	93,91
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei			99,91	94,91	94,23	90,88	94,98
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni			99,51	99,12	100,00	99,17	99,45
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Januari	85,00		50,00	#DIV/0!	0,00	100,00	0,00	100,00	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Februari	85,00		88,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,78
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Maret	85,00		89,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,88
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	April	85,00		77,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,59
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Mei	85,00		82,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,45
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Juni	85,00		93,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,72
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Juli	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Agustus	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	September	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Oktober	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	November	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai keten	Desember	85,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Januari	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Februari	100,00	1,00	1,00	100,00		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Maret	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	April	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	Laboratorium menerima 1 sampel KLB Keracunan Pangan pada tanggal 30 April 2025 pukul 15.00 WIB. Parameter uji meliputi parameter uji kimi dan mikro sehingga penyelesaian pengujiannya membutuhkan waktu.	Sampel KLB Keracunan Pangan diselesaikan pada bulan Mei 2025 dan dianggap sebagai capaian hasil uji bulan Mei 2025
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Mei	100,00	1,00	1,00	100,00		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Juni	100,00	1,00	1,00	100,00		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Juli	100,00			#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Agustus	100,00			#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	September	100,00			#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Oktober	100,00			#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	November	100,00			#DIV/0!		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesua	Desember	100,00			#DIV/0!		

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	62,07	100,00	100,00	96,21	Sampai dengan TW I sudah dilakukan sampling PIRT sebanyak 36 sampel dari target sesuai PS sebanyak 58 sampel
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	81,03	62,07	100,00	62,07	100,00	100,00	84,83	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	100,00	100,00	100,00	62,07	100,00	100,00	96,21	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	62,07	100,00	100,00	96,21	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Januari	75,50	75,00	0,00	37,50
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Februari	80,20	72,94	0,00	36,47
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Maret	92,64	66,40	100,00	83,20
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	April	98,98	66,67	100,00	83,33
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Mei	93,00	70,00	100,00	85,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Juni	93,77	87,62	100,00	93,81
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Juli	93,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Agustus	94,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	September	95,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Oktober	96,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	November	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Se	Desember	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	Sarprod Kosmet	% Sarprod SF
Persentase sarar	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarar	Februari		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarar	Maret		67,00	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarar	April		68,33	100,00	100,00	100,00	92,08
Persentase sarar	Mei		77,22	100,00	100,00	100,00	94,31
Persentase sarar	Juni		83,06	103,13	95,83	100,00	95,50
Persentase sarar	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah Sarana yang diperiksa	Jumlah Sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah Sarana yang	Jumlah Sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah Sarana yang diberikan	Jumlah Sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan	% Sarana Diperiksa &
Persentase Sara	Januari	80,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Persentase Sara	Februari	80,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	100,00
Persentase Sara	Maret	80,00	11,00	12,00	91,67	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	97,22
Persentase Sara	April	80,00	16,00	20,00	80,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	93,33
Persentase Sara	Mei	80,00	20,00	23,00	86,96	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00	95,65
Persentase Sara	Juni	80,00	7,00	13,00	53,85	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00	84,62
Persentase Sara	Juli	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sara	Agustus	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sara	September	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sara	Oktober	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sara	November	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sara	Desember	80,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	Kosmetik	% Sardis
Persentase sarar	Januari		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Februari		0,00	97,50	108,33	124,69	82,63
Persentase sarar	Maret		0,00	101,67	100,00	118,06	79,93
Persentase sarar	April		77,56	98,75	95,45	109,18	95,24
Persentase sarar	Mei		97,46	100,00	91,67	105,45	98,64
Persentase sarar	Juni		86,25	101,88	100,00	110,16	99,57
Persentase sarar	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarar	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	75	5	5	20,00	5	5	70,00	3	5	6,00	96,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	75	15	15	20,00	15	15	70,00	8	15	5,33	95,33
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	75	52	52	20,00	52	52	70,00	43	52	8,27	98,27
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	75	67	67	20,00	67	67	70,00	54	67	8,06	98,06
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	75	80	80	20,00	72	80	63,00	67	80	8,38	91,38
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	75	126	126	20,00	118	126	65,56	108	126	8,57	94,13
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	75			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Januari	91,4	100	86,46	100	100	95,20	96,33
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Februari	91,4	100	92,41	100	100	99,57	98,40
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Maret	91,4	100	89,53	100	100	99,66	97,84
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	April	91,4	100,00	94,81	100,00	100	99,75	98,91
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Mei	91,4	100,00	96,43	100,00	100,00	93,53	97,99
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Juni	91,4	100,00	97,18	100,00	100,00	94,66	98,37
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Juli	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Agustus	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	September	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Oktober	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	November	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Jakarta	11	Persentase Iklan	Desember	91,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	kasi yang diperik	gan Fortifikasi Keseluruhan	Cakupan Sarprod Fo
Persentase Caku	Januari	64	1	28	3,57
Persentase Caku	Februari	64	1	28	3,57
Persentase Caku	Maret	64	5	28	17,86
Persentase Caku	April	64	7	28	25,00
Persentase Caku	Mei	64	9	28	32,14
Persentase Caku	Juni	64	10	28	35,71
Persentase Caku	Juli	64		28	0,00
Persentase Caku	Agustus	64		28	0,00
Persentase Caku	September	64		28	0,00
Persentase Caku	Oktober	64		28	0,00
Persentase Caku	November	64		28	0,00
Persentase Caku	Desember	64		28	0,00

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : BBPOM di Jakarta
Triwulan/Tahun : 2/2025
Tanggal Penilaian : 23 Juni 2025
Nama Tim Penilai : 1. Intan Dian Nurfadillah, S.Si.
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	82.25	75.6	69.9	108.1
2.	Staandar Peralatan	85.9			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	50			
4.	Standar Metode Terverifikasi	72.9			

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Januari	0						0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Februari	0						0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Maret	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Mei	45	25,00	20,00	0,00			45,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Juni	70	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Juli	70	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Agustus	80	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	September	80	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Oktober	95	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	November	100	25,00	20,00	25,00			70,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	Desember	15						100,00

16. Jumlah desa pangan aman

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0						0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0						0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Jumlah Desa Pangan Aman	April	50	25,00	25,00	0,00	0,00	0	50,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	80	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	September	80	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	80	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	5						100,00

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring	Pengawalan	Realisasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	0,00			50,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25,00	25,00	20,00			70,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						100,00

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Januari	1	0,00	5,00	5,00	5,00	500,00
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Februari	7,43	15,00	10,00	10,00	11,67	157,02
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Maret	14,86	25,00	10,00	10,00	15,00	100,94
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	April	22	55,00	30,00	30,00	38,33	174,24
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Mei	29,72	65,71	50,00	50,00	55,24	185,86
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Juni	37,15	42,38	40,00	40,00	40,79	109,81
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Juli	44,58	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Agustus	52,01	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	September	59,44	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Oktober	66,87	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	November	74,3	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	Desember	81,7	#DIV/0!	50,00	0,00	#DIV/0!	

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	4,0	12	0	2	0,3	0	4	2,2	0	4	3,4	0	2	2	49,38
Februari	4,0	12	0	2	0,3	0	4	2,2	0	4	3,4	0	2	2	49,38
Maret	4.0	12	0	2	0.3	0	4	2.2	0	4	3.4	0	2	2	49.38
April	4	9	0	0	0	0	4	2,2	0	4	3,4	0	1	1	50,77
Mei	4	9	2	0	0,3	0	3	1,65	0	5	4,25	0	1	1	55,38
Juni	4	9	2	0	0,3	0	3	1,65	0	5	4,25	0	1	1	55,38
Juli					0			0			0			0	#DIV/0!
Agustus					0			0			0			0	#DIV/0!
September					0			0			0			0	#DIV/0!
Oktober					0			0			0			0	#DIV/0!
November					0			0			0			0	#DIV/0!
Desember					0			0			0			0	#DIV/0!

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No.	Nama UPT	Fungsi											
		Patroli Siber											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	BBPOM di Jakarta	T	T	T	T	T	T						
		Nilai											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	78,57%	68,75%	61,11%	55,00%	50,00%	45,83%

Realisasi Pengadaan BBPOM Jakarta 2025-TW 2

No	Nama Paket	Nama Satker	Pagu	Kode MAK	Metode Pengadaan	Jenis Belanja	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan s.d 30 Juni	Realisasi Anggaran s.d 30 Juni
1	Pengadaan Sewa Bangunan/Gedung Pengelolaan Barang Bukti	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	133.200.000	DR.3165.AEA.001.052.0H.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	133.200.000	133.200.000
2	Penggandaan Pencetakan dan Pelaporan Dalam Rangka AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI GMP / GDP OBAT DAN MAKANAN	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.000.000	DR.3165.BAH.001.051.0A.521211	e-Purchasing	Barang	TW 3		
3	Pengadaan Perlengkapan Peserta KIE	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	280.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0A.521211	e-Purchasing	Barang	TW 1	279.915.000	279.915.000
4	Belanja Bahan PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	371.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0A.521211	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	84.900.000	84.900.000
5	Sewa Gedung Pertemuan Perlengkapan KIE	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	90.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0A.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	24.000.000	24.000.000
6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Dalam Rangka Sosialisasi Pemberdayaan Obat dan Makanan Integrasi	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	8.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0C.521211	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
7	Sewa Kapal Dalam Rangka Sosialisasi Pemberdayaan Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	20.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0C.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
8	Pengadaan Bahan Promosi dan Produk Informasi Dalam Rangka Sosialisasi Pemberdayaan Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	4.440.000	DR.3165.BDC.001.051.0C.521211	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	2.000.000	2.000.000
9	Sewa Stand Pameran	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	15.000.000	DR.3165.BDC.001.051.0D.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	9.500.000	9.500.000
10	Pembuatan Video Profil Balai dalam rangka Implementasi RB menuju WBBM	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	6.019.000	DR.3165.BKB.001.052.0E.522191	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	5.079.350	5.079.350
11	Penyebaran informasi di Media Cetak dan Elektronik	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	10.230.000	DR.3165.BMB.001.051.0A.521219	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	10.000.000	10.000.000
12	SMS Blast / WA Blast	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	4.000.000	DR.3165.BMB.001.051.0C.522191	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
13	Langganan Upgrade Google Drive/Zoho Form	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	627.000	DR.3165.BMB.001.051.0B.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	626.280	626.280
14	Pengadaan Meubelair Penunjang Kinerja Pegawai	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	3.330.000	DR.3165.CAB.001.053.0A.532111	Pengadaan Langsung	Modal	TW 1	3.330.000	3.330.000
15	Pengadaan Laptop	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	65.000.000	DR.3165.CAN.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	65.000.000	65.000.000
16	Pengadaan Media sampel pihak ketiga, sampel kasus, dll	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	100.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	97.618.086	87.562.596
17	Pengadaan Baku Pembanding	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	50.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	49.089.910	2.564.100
18	Pengadaan Media Mikrobiologi ED Pendek	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	75.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	63.665.490	63.665.490
19	Pengadaan Gas Laboratorium	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	148.934.000	DR.3165.PDD.001.054.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	36.052.800	36.052.800
20	Pengadaan IAC dan Kebutuhan Uji Spesifik Lainnya	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	50.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3	47.619.000	47.619.000
21	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Laboratorium-PNP	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	38.695.000	DR.3165.PDD.001.054.0E.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	18.773.000	16.650.000
22	Pengadaan Glassware Laboratorium	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	50.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0E.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3		
23	Pengadaan Suku Cadang Peralatan Laboratorium-RM	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	889.305.000	DR.3165.PDD.001.054.0E.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	174.048.000	174.048.000
24	Pengadaan Bahan penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	50.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0E.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3		
25	Pemeliharaan Alat Laboratorium-PNP	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	130.305.000	DR.3165.PDD.001.054.0F.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	44.167.361	16.927.500
26	Pemeliharaan Alat Laboratorium-RM	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	300.000.000	DR.3165.PDD.001.054.0F.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3	82.378.566	58.780.810
27	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kegiatan Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang Dilaksanakan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	24.000.000	DR.3165.PDD.001.056.0C.521211	e-Purchasing	Barang	TW 3		
28	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	16.000.000	DR.3165.QCD.U01.055.0D.521219	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	5.400.000	5.400.000

No	Nama Paket	Nama Satker	Pagu	Kode MAK	Metode Pengadaan	Jenis Belanja	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan s.d 30 Juni	Realisasi Anggaran s.d 30 Juni
29	Paket Meeting Fullday Dalam Rangka Advokasi Terpadu Lintas Sektor	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	16.500.000	DR.3165.QDB.001.051.0A.524114	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	16.500.000	16.500.000
30	Pengadaan Bahan Promosi dan Produk Informasi Bimtek Keamanan Pangan Sekolah	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	12.428.000	DR.3165.QDB.001.052.0B.521211	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	7.331.600	7.331.600
31	Pengadaan Bingkai dan Pengadaan Bahan Promosi dan Produk Informasi Dalam Rangka Penyerahan Sertifikat PJAS	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	3.167.000	DR.3165.QDB.001.052.0F.521211	e-Purchasing	Barang	TW 2	222.000	222.000
32	Pengadaan Rompi Dalam Rangka Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	4.050.000	DR.3165.QDB.002.051.0A.521211	e-Purchasing	Barang	TW 2	4.050.000	4.050.000
33	Pengadaan Perlengkapan Peserta Dalam Rangka Pelatohan Kader Keamanan Pangan Desa	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	3.600.000	DR.3165.QDB.002.051.0A.521211	e-Purchasing	Barang	TW 2	3.600.000	3.600.000
34	Paket Meeting Fullday - Pertemuan Dengan Lintas Sektor Dalam Rangka Monev	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	16.500.000	DR.3165.QDB.002.054.0B.524114	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
35	Pengadaan Bahan Promosi dan Produk Informasi Dalam Rangka Penyuluhan Pedagang Pasar	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.500.000	DR.3165.QDB.003.053.0C.521211	e-Purchasing	Barang	TW 2	1.069.700	1.069.700
36	Pengadaan Bahan Promosi dan Produk Informasi Dalam Rangka Kampanye Pasar Aman	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.500.000	DR.3165.QDB.003.053.0D.521211	Pengadaan Langsung	Barang	TW 2	419.580	419.580
37	Pengadaan Reagen Dalam Rangka Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	180.250.000	DR.3165.QIA.001.053.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	85.223.722	63.000.270
38	Pengadaan Media Mikrobiologi Dalam Rangka Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	194.400.000	DR.3165.QIA.001.053.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	176.851.191	69.633.904
39	Pengadaan Test Kit	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	35.329.000	DR.3165.QIA.001.053.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3		
40	Pengadaan ATK Dalam Rangka Pengadaan Sampel Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	11.700.000	DR.3165.QIA.001.055.0B.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3		
41	Pengadaan ATK Dalam Rangka Pengadaan Sampel Obat	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	12.000.000	DR.3165.QIA.002.053.0B.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3		
42	Pengadaan Reagen Dalam Rangka Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	371.025.000	DR.3165.QIA.002.055.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 3	244.470.840	184.832.760
43	Pengadaan Media Mikro Dalam Rangka Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	172.800.000	DR.3165.QIA.002.055.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	109.623.815	110.448.545
44	Pengadaan Bahan Penunjang Pengujian	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	147.732.000	DR.3165.QIA.002.055.0A.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	143.918.421	71.742.003
45	Pengadaan ATK Dalam Rangka Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.875.000	DR.3165.QIC.003.053.0B.521811	e-Purchasing	Barang	TW 4		
47	Fullday Meeting Dalam Rangka Pengawasan Terpadu Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	22.750.000	DR.3165.QIC.004.053.0E.524114	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
49	PENGADAAN ATK KEGIATAN CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	9.000.000	DR.3165.QIC.004.053.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 2	6.447.030	6.447.030
50	Pengadaan Inkubator untuk suhu 20-25 C	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	161.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	161.000.001	
51	Pengadaan Timbangan Mikro	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	668.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	668.000.000	668.000.000
52	Pengadaan Homogenizer Automatic Stomacher Blender Mix	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	117.360.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	117.359.856	117.359.856
53	Pengadaan UV Lamp 254 nm	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.800.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	1.787.100	1.787.100
54	Pengadaan Lemari Asam	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	365.204.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	365.203.320	365.203.320
55	Pengadaan Microwave Digester	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	685.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	685.000.000	685.000.000
56	Pengadaan Laboratory Blender	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	17.711.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	16.000.040	16.000.040
57	Pengadaan UPS 10 KVA	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	43.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	42.999.957	42.999.957
58	Pengadaan Mikropipet 0,5-5 mL	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	8.166.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	8.165.251	8.165.251
59	Pengadaan Mikropipet 1-10 mL	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	16.332.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 1	16.330.502	
60	Pengadaan Visualizer untuk TLC System Camag	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	490.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	490.000.000	490.000.000
61	Pengadaan Detektor ELSD untuk HPLC Shimadzu	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	670.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	670.000.000	
62	Pengadaan Detektor Fluoresence untuk HPLC Shimadzu	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	315.000.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	315.000.000	315.000.000

No	Nama Paket	Nama Satker	Pagu	Kode MAK	Metode Pengadaan	Jenis Belanja	Rencana Pengadaan	Realisasi Pengadaan s.d 30 Juni	Realisasi Anggaran s.d 30 Juni
63	Pengadaan Detektor PDA untuk HPLC Shimadzu	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	331.801.000	DR.3165.RAB.001.051.0A.532111	e-Purchasing	Modal	TW 2	330.000.000	330.000.000
64	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	281.089.000	WA.6384.EBA.994.002.0A.523111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	55.316.900	55.316.900
65	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	35.360.000	WA.6384.EBA.994.002.0B.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	14.691.610	14.691.610
66	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	184.849.000	WA.6384.EBA.994.002.0C.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	58.697.000	58.697.000
67	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	153.652.000	WA.6384.EBA.994.002.0C.523111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	7.815.000	7.815.000
68	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	61.545.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	43.637.972	43.637.972
69	Langganan Private Networking	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	268.620.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	e-Purchasing	Barang	TW 1	262.269.210	262.269.210
70	Langganan Lisensi Aplikasi Video Conference Zoom	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	20.167.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	20.166.715	20.166.715
71	Langganan Lisensi Aplikasi Canva	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	2.190.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
72	Langganan Lisensi Aplikasi Calendly	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	3.010.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
73	Langganan Komunikasi dan Internet (halo, oxygen, by you)	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	46.841.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521111	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	30.107.299	30.107.299
74	Pengadaan barang ekstrakomtabel	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	17.000.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521252	Barang	Barang	TW 2	6.488.200	6.488.200
75	Pencetakan, Penggandaan dan Laminasi	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	24.600.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521811	Barang	Barang	TW 3		
76	Keperluan Sehari-hari Perkantoran-521811	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	61.545.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.521811	e-Purchasing	Barang	TW 1	16.677.455	16.677.455
77	Sewa sehari hari perkantoran	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	51.297.000	WA.6384.EBA.994.002.0D.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	12.457.215	12.457.215
78	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4/6/10	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	231.341.000	WA.6384.EBA.994.002.0E.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	70.379.113	70.379.113
79	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	1.993.000	WA.6384.EBA.994.002.0F.523121	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	140.000	140.000
80	Biaya Surat Menyurat	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	11.600.000	WA.6384.EBA.994.002.0H.521114	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	4.138.285	4.138.285
81	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	74.847.000	WA.6384.EBA.994.002.0I.521113	e-Purchasing	Barang	TW 1	74.844.600	74.844.600
82	Operasional Genset (Pembelian Bahan Bakar)	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	6.000.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.521119	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
83	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	153.360.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.521219	e-Purchasing	Barang	TW 1	153.341.400	153.341.400
84	Sewa Rumah Dinas Kepala Balai	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	155.400.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	155.400.000	155.400.000
85	Sewa Mesin Fotokopi	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	20.000.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	4.380.504	4.380.504
86	Sewa Mesin Scanner/Printer/Alat Pengolah Data Lain	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	5.550.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	5.550.000	5.550.000
87	Sewa Mesin Penghancur Kertas	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	33.300.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522141	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	33.300.000	33.300.000
88	Termite Control/Hygiene Sanitasi	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	70.000.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522191	Pengadaan Langsung	Barang	TW 1	13.002.135	13.002.135
89	Pengolahan Limbah	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	39.872.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522191	Pengadaan Langsung	Barang	TW 3		
90	PENGADAAN JASA KEAMANAN DAN PENGAMANAN	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	715.983.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522191	e-Purchasing	Barang	TW 1	715.982.914	715.982.914
91	Pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Alih Daya	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	2.067.787.000	WA.6384.EBA.994.002.0J.522191	e-Purchasing	Barang	TW 1	2.067.786.783	715.982.914

Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 30 Juni 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432747 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	PAGU	10,103,237,000	29,272,443,000	6,276,211,000	0	0	0	0	0	0	45,651,891,000
		REALISASI	5,099,025,444 (50.47%)	6,262,963,336 (21.40%)	3,107,845,524 (49.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,469,834,304 (31.70%)
		SISA	5,004,211,556	23,009,479,664	3,168,365,476	0	0	0	0	0	0	31,182,056,696
GRAND TOTAL		**PAGU**	**10,103,237,000**	**29,272,443,000**	**6,276,211,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,651,891,000**
		REALISASI	**5,099,025,444 (50.47%)**	**6,262,963,336 (21.40%)**	**3,107,845,524 (49.52%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**14,469,834,304 (31.70%)**
		SISA	**5,004,211,556**	**23,009,479,664**	**3,168,365,476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,182,056,696**

Sumber Data: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiAkunES1 03-07-25 09:06:42

Rincian Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025

Keterangan	Pagu Awal	Blokir Otomatis	Blokir Rekonstruksi	Realokasi PPNPN	Buka Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni	Persen Realisasi Pagu Awal	Persen Realisasi Pagu Akhir
Penindakan	**845.217.000**	**174.046.000**	**444.410.000**		**303.799.000**	**530.560.000**	**311.574.733**	**36,86%**	**58,73%**
3165.AEA.001	452.653.000	71.686.000	242.971.000			137.996.000	137.995.294	30,49%	100,00%
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	452.653.000	71.686.000	242.971.000			137.996.000	137.995.294	30,49%	100,00%
3165.QCD.U01	392.564.000	102.360.000	201.439.000		303.799.000	392.564.000	173.579.439	44,22%	44,22%
PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA [PN-04]	392.564.000	102.360.000	201.439.000		303.799.000	392.564.000	173.579.439	44,22%	44,22%
Pengujian	**10.242.542.000**	**182.963.000**	**4.705.057.000**	**(344.074.700)**	**3.295.788.000**	**8.306.235.300**	**4.680.232.945**	**45,69%**	**56,35%**
3165.PDD.001	2.343.987.000	138.123.000	1.608.437.000		1.746.560.000	2.343.987.000	804.400.746	34,32%	34,32%
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium [PN-04]	2.343.987.000	138.123.000	1.608.437.000		1.746.560.000	2.343.987.000	804.400.746	34,32%	34,32%
3165.QIA.001	699.296.000	15.200.000	511.156.000		526.356.000	699.296.000	209.927.053	30,02%	30,02%
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT [PN-04]	699.296.000	15.200.000	511.156.000		526.356.000	699.296.000	209.927.053	30,02%	30,02%
3165.QIA.002	1.356.864.000	29.640.000	993.232.000		1.022.872.000	1.356.864.000	626.389.622	46,16%	46,16%
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT [PN-04]	1.356.864.000	29.640.000	993.232.000		1.022.872.000	1.356.864.000	626.389.622	46,16%	46,16%
3165.RAB.001	5.842.395.000	-	1.592.232.000	(344.074.700)		3.906.088.300	3.039.515.524	52,03%	77,81%
Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium [PN-04]	5.842.395.000	-	1.592.232.000	(344.074.700)		3.906.088.300	3.039.515.524	52,03%	77,81%
Tata Usaha	**20.821.053.000**	**319.221.000**	**3.932.802.000**	**344.074.700**		**16.913.104.700**	**8.149.435.084**	**39,14%**	**48,18%**
3165.BMB.001	108.210.000	11.400.000	74.600.000			22.210.000	16.831.660	15,55%	75,78%
Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	108.210.000	11.400.000	74.600.000			22.210.000	16.831.660	15,55%	75,78%

Keterangan	Pagu Awal	Blokir Otomatis	Blokir Rekonstruksi	Realokasi PPNPN	Buka Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni	Persen Realisasi Pagu Awal	Persen Realisasi Pagu Akhir
3165.CAB.001	100.000.000	-	96.670.000			3.330.000	3.330.000	3,33%	100,00%
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.000.000	-	96.670.000			3.330.000	3.330.000	3,33%	100,00%
3165.CAN.001	93.606.000	-	28.606.000			65.000.000	65.000.000	69,44%	100,00%
Perangkat pengolah data dan komunikasi	93.606.000	-	28.606.000			65.000.000	65.000.000	69,44%	100,00%
3165.CBV.001	600.000.000	-	600.000.000			-	-	0,00%	0,00%
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	600.000.000	-	600.000.000			-	-	0,00%	0,00%
6384.EBA.956	8.000.000	3.900.000	4.100.000			-	-	0,00%	0,00%
Layanan BMN	8.000.000	3.900.000	4.100.000			-	-	0,00%	0,00%
6384.EBA.994	19.911.237.000	303.921.000	3.128.826.000	344.074.700		16.822.564.700	8.064.273.424	40,50%	47,94%
Layanan Perkantoran	19.911.237.000	303.921.000	3.128.826.000	344.074.700		16.822.564.700	8.064.273.424	40,50%	47,94%
Informasi dan Komunikasi	**11.627.820.000**	**3.189.951.000**	**5.965.411.000**			**2.472.458.000**	**945.588.566**	**8,13%**	**38,24%**
3165.BDC.001	9.625.018.000	2.698.163.000	4.771.847.000			2.155.008.000	751.936.896	7,81%	34,89%
Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9.625.018.000	2.698.163.000	4.771.847.000			2.155.008.000	751.936.896	7,81%	34,89%
3165.BKB.001	490.000.000	25.356.000	390.965.000			73.679.000	43.189.160	8,81%	58,62%
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	490.000.000	25.356.000	390.965.000			73.679.000	43.189.160	8,81%	58,62%
3165.QDB.001	516.930.000	135.951.000	294.699.000			86.280.000	56.312.000	10,89%	65,27%
Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman [PN-04]	516.930.000	135.951.000	294.699.000			86.280.000	56.312.000	10,89%	65,27%
3165.QDB.002	779.693.000	265.598.000	389.294.000			124.801.000	71.346.000	9,15%	57,17%
Desa Pangan Aman [PN-04]	779.693.000	265.598.000	389.294.000			124.801.000	71.346.000	9,15%	57,17%
3165.QDB.003	118.779.000	30.608.000	57.481.000			30.690.000	21.804.510	18,36%	71,05%
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas [PN-04]	118.779.000	30.608.000	57.481.000			30.690.000	21.804.510	18,36%	71,05%
3165.QDC.001	97.400.000	34.275.000	61.125.000			2.000.000	1.000.000	1,03%	50,00%
Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	97.400.000	34.275.000	61.125.000			2.000.000	1.000.000	1,03%	50,00%

Keterangan	Pagu Awal	Blokir Otomatis	Blokir Rekonstruksi	Realokasi PPNPN	Buka Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni	Persen Realisasi Pagu Awal	Persen Realisasi Pagu Akhir
Pemeriksaan	**2.115.259.000**	**797.345.000**	**778.625.000**		**902.622.000**	**1.441.911.000**	**386.679.305**	**18,28%**	**26,82%**
3165.BAH.001	577.890.000	232.900.000	150.695.000			194.295.000	107.385.000	18,58%	55,27%
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	577.890.000	232.900.000	150.695.000			194.295.000	107.385.000	18,58%	55,27%
3165.QIC.001	219.393.000	90.590.000	71.883.000		162.473.000	219.393.000	72.160.000	32,89%	32,89%
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT [PN-04]	219.393.000	90.590.000	71.883.000		162.473.000	219.393.000	72.160.000	32,89%	32,89%
3165.QIC.003	13.680.000	2.740.000	7.692.000		10.432.000	13.680.000	4.266.500	31,19%	31,19%
Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT [PN-02]	13.680.000	2.740.000	7.692.000		10.432.000	13.680.000	4.266.500	31,19%	31,19%
3165.QIC.004	963.125.000	334.265.000	395.452.000		729.717.000	963.125.000	174.763.430	18,15%	18,15%
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT [PN-04]	963.125.000	334.265.000	395.452.000		729.717.000	963.125.000	174.763.430	18,15%	18,15%
3165.QDG.001	341.171.000	136.850.000	152.903.000			51.418.000	28.104.375	8,24%	54,66%
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT [PN-03]	341.171.000	136.850.000	152.903.000			51.418.000	28.104.375	8,24%	54,66%
Grand Total	**45.651.891.000**	**4.663.526.000**	**15.826.305.000**	**-**	**4.502.209.000**	**29.664.269.000**	**14.473.510.633**	**31,70%**	**48,79%**

Realisasi belanja di omspan lebih kecil senilai Rp4.525.048 dibandingkan data di monsakti, karena terdapat pengembalian belanja pegawai sejumlah tersebut yang hanya tercatat di omspan, tetapi tidak dicatat di monsakti.

Sumber Data: https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/pembayaran/detailfa1516sp2d, Monitoring Detail Transaksi FA 16 Segmen Versi SP2D, 02-07-2025 05:39 (Data MonSAKTI)

Deviasi Rencana Penarikan Dana per 30 Juni 2025

Output	Jenbel	RPD	Realisasi	Realisasi - RPD	Poksi	Deviasi RPD
AEA	52	1.000.700	-	-1.000.700	Penindakan	100,00%
BAH	52	16.719.998	20.870.000	4.150.002	Pemeriksaan	24,82%
BDC	52	821.009.638	217.650.000	-603.359.638	Infokom	73,49%
BKB	52	0	1.240.000	1.240.000	Tata Usaha	100,00%
BMB	52	600.000	10.298.800	9.698.800	Infokom	100,00%
CAB	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
CAN	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
CBV	53	0	-	0	Tata Usaha	0,00%
PDD	52	206.864.300	264.514.450	57.650.150	Pengujian	27,87%
QCD	52	42.996.917	86.842.000	43.845.083	Penindakan	100,00%
QDB	52	15.259.999	40.095.580	24.835.581	Infokom	100,00%
QDC	52	0	-	0	Infokom	0,00%
QDG	52	2.280.000	9.456.750	7.176.750	Pemeriksaan	100,00%
QIA	52	278.185.299	579.242.578	301.057.279	Pengujian	100,00%
QIC	52	162.499.997	84.097.630	-78.402.367	Pemeriksaan	48,25%
RAB	53	3.523.203.320	2.986.563.216	-536.640.104	Pengujian	15,23%
EBA	51	1.280.132.139	1.262.641.291	-17.490.848	Tata Usaha	1,37%
EBA	52	519.991.629	435.056.868	-84.934.761	Tata Usaha	16,33%
Jumlah		**6.870.743.936**	**5.998.569.163**	**-872.174.773**		**12,69%**

Sumber Data:

https://monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/pembayaran/detailfa1516sp2d,

Monitoring Detail Transaksi FA 16 Segmen Versi SP2D, 02-07-2025 05:39 (Data MonSAKTI)

a. Detil RPD Kelompok Fungsi Penindakan

Periode	Rencana		Penyerapan		Deviasi		% Deviasi		% Proporsi Pagu		% Deviasi Tertimbang		% Deviasi Seluruh *Output*	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif
	AEA	QCD	AEA	QCD	AEA	QCD	AEA	QCD	AEA	QCD	AEA	QCD		
'01	133.200.000	28.485.965	133.200.000	-	-	28.485.965	0,00	100,00	0,99	0,86	0,00	0,86	0,86	0,43
'02	3.795.294	13.001.377	3.795.294	28.431.700	-	15.430.323	0,00	118,68	0,99	0,86	0,00	1,02	1,02	0,94
'03	-	21.852.909	-	10.634.000	-	11.218.909	0,00	51,34	0,99	0,86	0,00	0,44	0,44	0,77
'04	-	67.597.997	-	3.890.000	-	63.707.997	0,00	94,25	0,99	0,86	0,00	0,81	0,81	0,78
'05	-	42.996.917	1.000.000	43.781.739	1.000.000	784.822	100,00	1,83	0,99	0,86	0,99	0,02	1,01	0,83
'06	1.000.700	114.355.617	-	86.842.000	1.000.700	27.513.617	100,00	24,06	0,99	0,86	0,99	0,21	1,20	**0,89**

b. Detil RPD Kelompok Fungsi Penindakan

Periode	Rencana			Penyerapan			Deviasi			% Deviasi			% Proporsi Pagu			% Deviasi Tertimbang			% Deviasi Seluruh *Output*	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif
	BAH	QDG	QIC	BAH	QDG	QIC	BAH	QDG	QIC	BAH	QDG	QIC	BAH	QDG	QIC	BAH	QDG	QIC		
'01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1,71	0,75	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'02	34.623.692	4.887.623	43.777.000	37.205.000	4.887.625	43.777.000	2.581.308	2	-	7,46	0,00	0,00	1,71	0,75	2,62	0,13	0,00	0,00	0,13	0,06
'03	12.159.999	8.090.000	4.418.600	12.160.000	8.090.000	4.418.600	1	-	-	0,00	0,00	0,00	1,71	0,75	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
'04	11.399.999	3.799.999	85.899.999	8.360.000	3.800.000	32.789.500	3.039.999	1	53.110.499	0,00	0,00	61,83	1,71	0,75	2,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,03
'05	16.719.998	2.280.000	91.999.997	28.790.000	1.870.000	86.107.200	12.070.002	410.000	5.892.797	100,00	17,98	6,41	1,71	0,75	2,62	1,71	0,13	0,17	1,84	0,39
'06	16.719.998	2.280.000	162.499.997	20.870.000	9.456.750	84.097.630	4.150.002	7.176.750	78.402.367	24,82	314,77	48,25	1,71	0,75	2,62	0,42	2,35	1,26	2,78	**0,79**

c. Detil RPD Kelompok Fungsi Pemeriksaan

Periode	Rencana			Penyerapan			Deviasi			% Deviasi			% Proporsi Pagu			% Deviasi Tertimbang			% Deviasi Seluruh *Output*	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif
	PDD	QIA	RAB	PDD	QIA	RAB	PDD	QIA	RAB	PDD	QIA	RAB	PDD	QIA	RAB	PDD	QIA	RAB		
'01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	5,13	4,50	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'02	223.424.376	75.292.715	-	223.424.376	61.194.644	-	-	14.098.071	-	0,00	18,72	0,00	5,13	4,50	12,80	0,00	0,84	0,00	0,84	0,42
'03	22.266.250	17.286.072	8.165.251	22.266.250	16.866.073	-	-	419.999	8.165.251	0,00	2,43	100,00	5,13	4,50	12,80	0,00	0,11	12,80	0,11	0,32
'04	88.546.593	227.417.499	-	107.708.460	27.851.260	8.165.251	19.161.867	199.566.239	8.165.251	0,00	87,75	100,00	5,13	4,50	12,80	0,00	3,95	12,80	3,95	1,23
'05	294.018.997	301.945.998	62.510.956	186.487.210	151.162.120	44.787.057	107.531.787	150.783.878	17.723.899	100,00	49,94	28,35	5,13	4,50	12,80	5,13	2,25	3,63	7,38	2,46
'06	206.864.300	278.185.299	3.523.203.320	264.514.450	579.242.578	2.986.563.216	57.650.150	301.057.279	536.640.104	27,87	108,22	15,23	5,13	4,50	12,80	1,43	4,87	1,95	6,31	**3,10**

d. Detil RPD Kelompok Fungsi Infokom

Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh *Output*	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif
	BMB	BDC	QDB	QDC	BMB	BDC	QDB	QDC	BMB	BDC	QDB	QDC	BMB	BDC	QDB	QDC	BMB	BDC	QDB	QDC	BMB	BDC	QDB	QDC		
'01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'02	151.198	2.660.524	18.608.605	-	151.200	2.660.000	11.020.000	-	2	524	7.588.605	-	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'03	2.268.000	5.761.907	8.165.304	-	2.268.000	5.763.000	8.410.000	-	-	1.093	244.696	-	0,00	0,02	3,00	0,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,03
'04	4.447.798	386.571.537	32.553.997	999.999	1.386.280	972.500	13.670.000	1.000.000	3.061.518	385.599.037	18.883.997	1	0,00	99,75	100,00	0,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,00	21,03	3,10	0,00	24,13	6,06
'05	11.750.000	825.449.691	63.443.997	999.999	2.727.380	524.891.396	76.266.930	-	9.022.620	300.558.295	12.822.933	999.999	100,00	36,41	20,21	100,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,24	7,68	0,63	0,21	8,75	6,60
'06	600.000	821.009.638	15.259.999	-	10.298.800	217.650.000	40.095.580	40.095.580	9.698.800	603.359.638	24.835.581	40.095.580	100,00	73,49	100,00	100,00	0,24	21,08	3,10	0,21	0,24	15,49	3,10	0,21	19,05	**8,67**

e. Detil RPD Bidang Tata Usaha

Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh *Output*	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif
	BKB	CAB	CAN	EBA	BKB	CAB	CAN	EBA	BKB	CAB	CAN	EBA	BKB	CAB	CAN	EBA	BKB	CAB	CAN	EBA	BKB	CAB	CAN	EBA		
'01	-	-	-	740.662.147	-	-	-	739.998.155	-	-	-	663.992	0,00	0,00	0,00	0,09	1,07	0,22	0,21	43,63	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
'02	12.361.347	-	65.000.000	1.469.554.546	12.361.350	-	65.000.000	1.468.890.546	3	-	-	664.000	0,00	0,00	0,00	0,05	1,07	0,22	0,21	43,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03
'03	2.539.998	3.330.000	-	1.862.963.352	2.540.000	3.330.000	-	1.862.299.353	2	-	-	663.999	0,00	0,00	0,00	0,04	1,07	0,22	0,21	43,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
'04	24.600.191	-	-	1.200.629.991	3.669.475	-	-	1.227.382.576	20.930.716	-	-	26.752.585	85,08	0,00	0,00	2,23	1,07	0,22	0,21	43,63	0,91	0,00	0,00	0,97	1,89	0,49
'05	1.753.910	-	-	1.200.937.849	23.378.335	-	-	1.068.004.635	21.624.425	-	-	132.933.214	100,00	0,00	0,00	11,07	1,07	0,22	0,21	43,63	1,07	0,00	0,00	4,83	5,90	1,57
'06	-	-	-	1.800.123.768	1.240.000	-	-	1.697.698.159	1.240.000	-	-	102.425.609	100,00	0,00	0,00	5,69	1,07	0,22	0,21	43,63	1,07	0,00	0,00	2,48	3,56	**1,90**

Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan 30 Juni 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	063	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	86.74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.01	100%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.01	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.37		100.00				100.00				

Sumber Data: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja : 03-07-25 09:46:44 (Data omspan)

Informasi Sisa Dana Akun Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni 2025

Program/Rincian *Output*/Akun	Pagu Awal	Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni 2025	Sisa Pagu
3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	**143.370.000**	**142.950.000**	**420.000**	420.000	-
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.630.000	37.630.000	-	-	-
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.460.000	8.040.000	420.000	420.000	-
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.400.000	32.400.000	-	-	-
[-] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.880.000	64.880.000	-	-	-
3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	**465.795.000**	**272.505.000**	**193.290.000**	**107.385.000**	**85.905.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	333.945.000	160.000.000	173.945.000	88.040.000	85.905.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131.850.000	112.505.000	19.345.000	19.345.000	-
3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	**3.715.315.000**	**2.558.470.000**	**1.156.845.000**	**324.310.000**	**832.535.000**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.410.000	9.706.000	19.704.000	-	19.704.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.685.905.000	2.548.764.000	1.137.141.000	324.310.000	812.831.000
3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	**50.712.000**	**50.712.000**	**-**	-	-
[-] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	50.712.000	50.712.000	-	-	-
3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	**22.800.000**	**18.620.000**	**4.180.000**	**4.180.000**	**-**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.800.000	18.620.000	4.180.000	4.180.000	-
3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**278.446.000**	**-**	**278.446.000**	**2.125.000**	**276.321.000**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.502.000	-	43.502.000	-	43.502.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.740.000	-	103.740.000	2.125.000	101.615.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.200.000	-	43.200.000	-	43.200.000

Program/Rincian *Output*/Akun	Pagu Awal	Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni 2025	Sisa Pagu
[-] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.004.000	-	88.004.000	-	88.004.000
3165.QCD.U01 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA	**204.720.000**	**170.000**	**204.550.000**	**90.603.500**	**113.946.500**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.120.000	170.000	92.950.000	-	92.950.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.600.000	-	111.600.000	90.603.500	20.996.500
3165.QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	**271.900.000**	**209.145.000**	**62.755.000**	**14.110.000**	**48.645.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.490.000	33.890.000	23.600.000	14.110.000	9.490.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	214.410.000	175.255.000	39.155.000	-	39.155.000
3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	**531.195.000**	**437.745.000**	**93.450.000**	**-**	**93.450.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	305.950.000	250.840.000	55.110.000	-	55.110.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	225.245.000	186.905.000	38.340.000	-	38.340.000
3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	**61.215.000**	**40.315.000**	**20.900.000**	**9.420.000**	**11.480.000**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	680.000	-	680.000	-	680.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.140.000	12.700.000	14.440.000	9.420.000	5.020.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.395.000	27.615.000	5.780.000	-	5.780.000
3165.QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	**68.550.000**	**68.550.000**	**-**	**-**	**-**
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	68.550.000	68.550.000	-	-	-
3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	**273.700.000**	**255.650.000**	**18.050.000**	**15.280.000**	**2.770.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.100.000	18.050.000	18.050.000	15.280.000	2.770.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	237.600.000	237.600.000	-	-	-
3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**30.400.000**	**-**	**30.400.000**	**6.160.000**	**24.240.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.400.000	-	30.400.000	6.160.000	24.240.000
3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	**59.280.000**	**-**	**59.280.000**	**22.280.000**	**37.000.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.280.000	-	59.280.000	22.280.000	37.000.000
3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**181.180.000**	**-**	**181.180.000**	**65.410.000**	**115.770.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.880.000	-	161.880.000	65.410.000	96.470.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.300.000	-	19.300.000	-	19.300.000

Program/Rincian *Output*/Akun	Pagu Awal	Blokir	Pagu Akhir	Realisasi s.d Juni 2025	Sisa Pagu
3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	**5.480.000**	**-**	**5.480.000**	**2.780.000**	**2.700.000**
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.480.000	-	5.480.000	2.780.000	2.700.000
3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	**668.530.000**	**-**	**668.530.000**	**-**	**668.530.000**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.300.000	-	175.300.000	-	175.300.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	351.120.000	-	351.120.000	-	351.120.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137.310.000	-	137.310.000	-	137.310.000
[-] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.800.000	-	4.800.000	-	4.800.000
6384.EBA.956 Layanan BMN	**7.800.000**	**7.800.000**	**-**	**-**	**-**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.800.000	7.800.000	-	-	-
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	**604.237.000**	**442.743.000**	**161.494.000**	**40.389.899**	**121.104.101**
[-] 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.593.000	84.297.000	84.296.000	-	84.296.000
[-] 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.709.000	38.261.000	26.448.000	8.185.000	18.263.000
[-] 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.315.000	37.945.000	32.370.000	24.090.000	8.280.000
[-] 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	300.620.000	282.240.000	18.380.000	8.114.899	10.265.101
Grand Total	**7.644.625.000**	**4.505.375.000**	**3.139.250.000**	**704.853.399**	**2.434.396.601**

BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025



1500533 HALOBPOM
@bpom.jakarta
@BPOMJakarta
082211267771
021-84304046
021-84304048
bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id